

LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA, 1926 - 1999

(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)



Oleh :
Ahmad Zahro
NIM: 943024

206.612
ZAH
e
c.1

DISERTASI
Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor Dalam Ilmu Agama Islam

MILIK PERPUSTAKAAN	IPS. SK. YK
Nomor	: 0000050 / IPS. SK. H / 01
Tanggal	: 22 AUG. 2001

YOGYAKARTA
2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ahmad Zahro

NIM. : 943024

Jenjang : Doktor

menyatakan, bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Februari 2000

Saya yang menyatakan,



Ahmad Zahro
NIM. 943024



DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

DISERTASI berjudul : **LAJAN BAHESUL MASAIL HANDLATUL ULAM, 1926-1999**
(Telah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqh)

Ditulis oleh : **Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.**

NIM : **943024 / 83**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, **28 Juli 2001**

Rektor/Ketua Senat



Athomah
Prof. Dr. H.H. Atho Mubhar
NIP. 150077586

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17- 4 – 2001

Kepada:

Yth. Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian sebagaimana yang disarankan dalam ujian pendahuluan (tertutup) terhadap naskah disertasi:

Nama : Ahmad Zahro

NIM : 943024

Jenjang : Doktor

Judul : Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926 – 1999

(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)

Saya berpendapat, bahwa disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tim Penilai Ujian Pendahuluan (Tertutup):

Ketua/Ketua Senat,



Prof. DR. H.M. Atho Mudzhar



DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA/PROMOSI

Nama : **Drs. H. Ahmad Zakro, M.A**
 NIM : **943024 / 83**
 Judul : **LAJNAN BAKHSUL MASAIL MAHLIATUL ULAMA, 1926-1999**
(Telah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqh)

- | | | |
|------------|--|-------------------------------|
| Ketua | : Prof. Dr. H.M. Atho Muhsyar | (<i>Atho Muhsyar</i>) |
| Sekretaris | : Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah | (<i>Amin Abdullah</i>) |
| Anggota | : 1. Prof. Dr.H.M. Atho Muhsyar
(Promotor I/Anggota Penguji I) | () |
| | 2. Prof.Dr.H. Sa'id Agil Hussein Al Munawwar
(Promotor II/Anggota Penguji II) | () |
| | 3. Prof. Dr. Hj. Husainah Tahide Yango
(Anggota Penguji III) | () |
| | 4. Prof. Drs. H. Asyumi Abdussahman
(Anggota Penguji IV) | (<i>Asyumi Abdussahman</i>) |
| | 5. Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja
(Anggota Penguji V) | (<i>Juhaya S. Praja</i>) |
| | 6. H.A. Qodri A. Anisy, M.A, Ph.D.
(Anggota Penguji VI) | (<i>Qodri A. Anisy</i>) |
| | 7. - | () |
| | 8. - | () |
| | 9. - | () |

Diuji di Yogyakarta pada tanggal **28 Juli 2001**

Pukul **09.00** sd **11.00** WIB.

Hasil/Nilai

Predikat : Memuaskan/Sangat memuaskan/Dengan pujian *

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17-4-2001

Kepada :

Yth. Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian sebagaimana yang disarankan dalam ujian pendahuluan (tertutup) terhadap naskah disertasi:

N a m a : Ahmad Zahro

N I M : 943024

Jenjang : Doktor

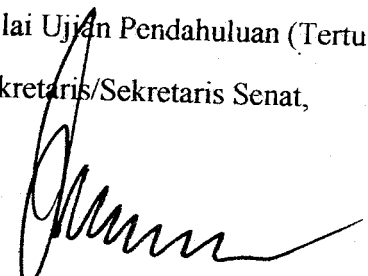
J u d u l : Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926 - 1999
(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)

Saya berpendapat, bahwa disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tim Penilai Ujian Pendahuluan (Tertutup):

Sekretaris/Sekretaris Senat,


Prof. DR. H.M. Amin Abdullah

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17-4-2001

Kepada:

Yth. Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian sebagaimana yang disarankan dalam ujian pendahuluan (tertutup) terhadap naskah disertasi:

Nama : Ahmad Zahro

NIM : 943024

Jenjang : Doktor

Judul : Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926 - 1999
(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)

Saya berpendapat, bahwa disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian penerangan (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tim Penilai Ujian Per
Promotor I



NOTA DINAS

Yogyakarta, 16-4-2001

Kepada :

Yth. Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian sebagaimana yang disarankan dalam ujian pendahuluan (tertutup) terhadap naskah disertasi:

N a m a : Ahmad Zahro

N I M : 943024

Jenjang : Doktor

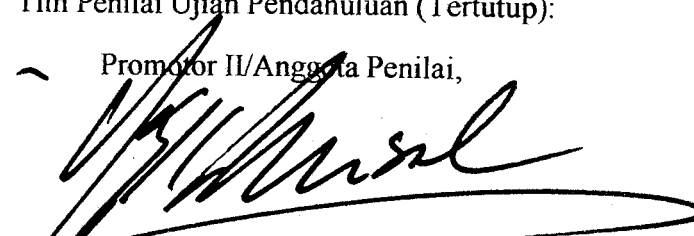
J u d u l : Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926 - 1999
(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)

Saya berpendapat, bahwa disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tim Penilai Ujian Pendahuluan (Tertutup):

Promotor II/Anggota Penilai,


Prof. DR. H. Said Agil Husein Al-Munawwar

NOTA DINAS

Yogyakarta, **16-4-2001**

Kepada :

Yth. Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian sebagaimana yang disarankan dalam ujian pendahuluan (tertutup) terhadap naskah disertasi:

N a m a : Ahmad Zahro

N I M : 943024

Jenjang : Doktor

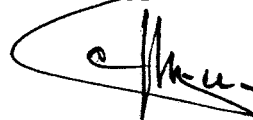
J u d u l : Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926 - 1999
(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)

Saya berpendapat, bahwa disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tim Penilai Ujian Pendahuluan (Tertutup):

Anggota Penilai,



Prof. DR. Hj. Chuzaimah Tahido

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17-4-2001

Kepada :

Yth. Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian sebagaimana yang disarankan dalam ujian pendahuluan (tertutup) terhadap naskah disertasi:

N a m a : Ahmad Zahro

N I M : 943024

Jenjang : Doktor

J u d u l : Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926 - 1999

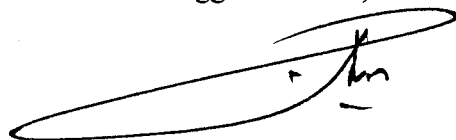
(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)

Saya berpendapat, bahwa disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tim Penilai Ujian Pendahuluan (Tertutup):

Anggota Penilai,



Prof. Drs. H. Asymuni Abdurrahman

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16-4-2001

Kepada :

Yth. Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian sebagaimana yang disarankan dalam ujian pendahuluan (tertutup) terhadap naskah disertasi:

N a m a : Ahmad Zahro

N I M : 943024

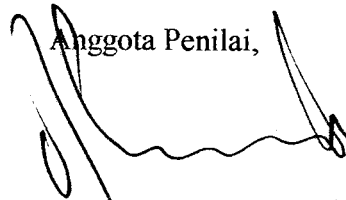
Jenjang : Doktor

J u d u l : Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926 - 1999
(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)

Saya berpendapat, bahwa disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tim Penilai Ujian Pendahuluan (Tertutup):

Anggota Penilai,


H.A. Qodri A. Azizy, MA., Ph.D.

Yogyakarta, 2001

Kepada :

Yth. Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian sebagaimana yang disarankan dalam ujian pendahuluan (tertutup) terhadap naskah disertasi:

N a m a : Ahmad Zahro

N I M : 943024

Jenjang : Doktor

J u d u l : Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926 - 1999
(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)

Saya berpendapat, bahwa disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

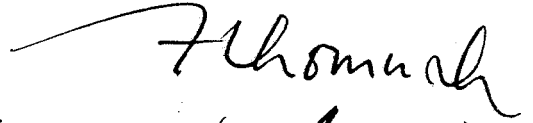
Tim Penilai Ujian Pendahuluan (Tertutup):

Anggota Penilai,


DR. H. Satria Effendi M. Zein



DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA



PROMOTOR I: Prof. DR. HM. Atho Mudzhar.



PROMOTOR II: Prof. DR. HS. Agil Husein Al-Munawwar, MA



ABSTRAK

Disertasi ini berjudul : “Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama , 1926 - 1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)” yang terfokus pada upaya menjawab tiga permasalahan pokok, yaitu:

1. Apa yang dimaksud *al-kutub al-mu'tabarah*, rujukan andalan bagi Lajnah Bahtsul Masail dalam *beristinbat* hukum fiqih.
2. Apa metode yang dipergunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail dalam *beristinbat* hukum fiqih.
3. Bagaimana validitas keputusan hukum fiqih yang dihasilkan oleh Lajnah Bahtsul Masail.

Dalam tataran teoritis penelitian ini berguna bagi khazanah pemikiran hukum Islam sebagai kajian obyektif terhadap hukum fiqih. Sedang dalam tataran praktis bermanfaat bagi Lajnah Bahtsul Masail sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk mengadakan evaluasi.

Penelitian ini dibatasi hanya mengenai keputusan hukum fiqih yang dihasilkan Lajnah Bahtsul Masail tingkat nasional mulai 1926 (Muktamar ke I) hingga 1999 (Muktamar ke XXX) dan terfokus pada *Masail Diniyah Waqi'iyah*, selain *baḥs al-masāil* dalam Muktamar ke XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV yang sampai saat ini dokumennya tidak/belum ditemukan.

Memandang agama sebagai gejala budaya, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan *uṣūl* fiqih, dengan sumber data tertulis dan tak tertulis. Data tersebut dihimpun dengan telaah dokumenter, observasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif dengan cara berfikir reflektif, komparatif dan kritis.

Lajnah Bahtsul Masail (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) adalah salah satu lembaga dalam *jam'iyah* Nahdlatul Ulama yang menghimpun, membahas dan memutuskan permasalahan yang menuntut kepastian hukum yang dalam bidang fiqih mengacu kepada mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan/atau Hanbali. Lajnah (lembaga)

ini dibagi menjadi dua sub-komisi, yaitu: Bahtsul Masail *ad-Dīniyyah al-Wāqī'iyah* (pengkajian masalah-masalah keagamaan aktual) dan Bahtsul Masail *ad-Dīniyyah al-Mauḍū'iyah* (pengkajian masalah-masalah keagamaan konseptual).

Kegiatan *baḥis al-masāil* telah ada sejak Kongres/Muktamar ke I (1926) yang sebutannya melekat pada *event* tersebut, tanpa memiliki nama tersendiri. Berdasarkan rekomendasi Muktamar ke XXVIII (Yogyakarta, 25-28 Nopember 1989) dan *halaqah* Denanyar, Jombang (26-28 Januari 1990), PBNU dengan Surat Keputusan Nomor 30/A.I.05/5/1990 membentuk "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*" sebagai lembaga permanen yang menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk menangani persoalan keagamaan dengan melakukan "*istinbāḥ jamā'iy*".

Mengenai proses terjadinya *baḥis al-masāil* dapat digambarkan sebagai berikut: jika ada permasalahan yang dihadapi oleh anggota masyarakat, maka mereka mengajukannya kepada Majelis Syuriah NU tingkat Cabang (Kabupaten, Kota atau Pesantren Besar) guna menyelenggarakan sidang *baḥis al-masāil* yang hasilnya diserahkan kepada Majelis Syuriah NU tingkat Wilayah (Propinsi) untuk kemudian diadakan sidang *baḥis al-masāil* guna membahas permasalahan tertentu yang dianggap urgen bagi kehidupan umat. Permasalahan yang belum tuntas atau masih diperselisihkan, diserahkan kepada Majelis Syuriah PBNU (Pusat) untuk diinventarisasi dan diseleksi berdasarkan skala prioritas pembahasannya, dan terkadang ditambah permasalahan yang diajukan oleh PBNU sendiri, lalu diedarkan kepada para ulama dan cendekiawan NU yang ditunjuk sebagai anggota Lajnah Bahtsul Masail agar dipelajari dan dipersiapkan jawabannya, untuk selanjutnya dibahas, dikaji dan ditetapkan keputusannya oleh Lajnah Bahtsul Masail dalam sidang *baḥis al-masāil* yang diselenggarakan bersamaan dengan Muktamar atau Musyawarah Nasional Alim Ulama NU.

Sejak 1926 hingga 1999 telah diselenggarakan sidang *baḥis al-masāil* tingkat nasional sebanyak 39 kali. Namun berdasarkan dokumen yang terhimpun, hanya ditemukan sidang *baḥis al-masāil* sebanyak 33 kali dan menghasilkan 505 keputusan yang terdiri atas 428 keputusan di bidang fiqih dan 77 keputusan non-fiqih.

Dari penelitian terhadap Lajnah Bahtsul Masail NU berkait dengan keputusan hukum fiqih, sesuai perumusan masalahnya, ditemukan jawaban sebagai berikut:

1. Dimulai dari tanpa mempersoalkan definisi, kemudian *al-kutub al-mu'tabarah* didefinisikan sebagai kitab-kitab yang berorientasi pada mazhab empat. Lalu diperjelas/diperluas lagi sebagai kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah ahlussunnah waljama'ah (Aswaja). Namun akhirnya definisi ini "mentah" lagi lantaran munculnya gugatan terhadap definisi Aswaja itu sendiri. Dalam merujuk *al-kutub al-mu'tabarah*, Lajnah Bahtsul Masail terlalu banyak menggunakan kitab-kitab *Syafi'iyah* dan kurang memperhatikan kitab-kitab dari tiga mazhab lainnya.
2. Metode *istinbāṭ* hukum yang dipergunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail adalah metode *qauliy* (langsung merujuk pada teks suatu kitab rujukan), bila tidak mungkin maka digunakan metode *ilhāqiy* (mengqiyaskan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang sudah ada kejelasannya dalam teks suatu kitab rujukan), dan apabila inipun tidak memungkinkan baru digunakan metode *manhajiy* (*istinbāṭ* hukum dengan menelusuri dan mengikuti metode yang dipergunakan oleh imam mazhab empat). Metode tersebut diterapkan dengan pendekatan *māzhabiy* (berorientasi pada mazhab), serta dilaksanakan dengan tehnik tanya-jawab dan diskusi. Dalam hal ini Lajnah Bahtsul Masail juga banyak berpihak kepada mazhab *Syafi'i*, dan ada yang langsung merujuk al-Qur'an ataupun as-Sunnah, serta ada jawaban yang tidak merujuk suatu kitab.
3. Dari 428 keputusan hukum fiqih, sebagian besar adalah valid, seperti haramnya memecah kendi dan telur dalam *wafimah al-haml*, hukum operasi ganti kelamin, bolehnya melontar jumrah sebelum *zawāl*, hukum pencarian dana dari pertunjukan, keharusan patuh pada induk organisasi dan cara penetapan awal bulan *qamariyah*. Namun setidaknya ada enam keputusan yang dianggap tidak valid, antara lain tentang bolehnya jual-beli petasan; kufur, haram atau makruhnya memakai celana, dasi, sepatu dan topi; haramnya menyuntik mayat untuk keperluan medis; tidak bolehnya harta kena zakat dikembangkan macamnya; bolehnya *fidyah* terhadap salat yang tertinggal; dan tidak sahnya Jiddah dijadikan *miqat makany*. Ada juga keputusan yang "*dinasakh*" oleh keputusan Lajnah Bahtsul Masail yang

datang kemudian, antara lain tentang bunga bank, diperbolehkannya keluarga berencana, asuransi jiwa dan transplantasi organ tubuh. Terkait dengan hal ini, keputusan Lajnah Bahtsul Masail juga terkonsentrasi pada mazhab Syafi'i, dan ada beberapa hasil keputusan yang tidak dipatuhi, antara lain mengenai hukum merujuk langsung pada al-Qur'an dan as-Sunnah, persyaratan pengajaran antar lawan jenis, hukum menjual padi di tangkainya, masalah bagi hasil pemeliharaan kambing, keharusan melepas binatang piaraan tatkala haji/umrah dan hukum program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi).

Mengakhiri disertasi ini penulis kemukakan rekomendasi teoritis berkaitan dengan perlunya penelitian terhadap "lembaga fatwa" yang dimiliki organisasi kemasyarakatan Islam lain yang belum diteliti, penelitian komparatif terhadap "lembaga-lembaga fatwa" yang sudah diteliti, dan penelitian lanjutan terhadap Lajnah Bahtsul Masail mengenai pelakunya, keputusan non fiqih dan *baḥis al-masā'il* dalam beberapa Mukhtamar yang tidak/belum ditemukan dokumennya. Dikemukakan juga rekomendasi praktis berkaitan dengan perlunya ketegasan maksud *al-kutub al-mu'tabarah*, kejelasan aplikasi metode *manhajiy*, perlunya keputusan yang berwawasan empat mazhab, disebarluaskannya hasil keputusan kepada warga NU dan peninjauan ulang terhadap beberapa keputusan yang disinyalir tidak valid dengan mengaplikasikan secara nyata "kaidah" yang populer dengan: *المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح* (memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik).

Sidoarjo, 27 Januari 2000 (jam 14.15)

Penulis,

Ahmad Zahro

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Huruf Arab (1)	N a m a (2)	Huruf Latin (3)	N a m a (4)
ا	<i>alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	b	be
ت	<i>ta'</i>	t	te
ث	<i>'sa'</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	j	je
ح	<i>ha'</i>	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	d	de
ذ	<i>'zal</i>	z	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra'</i>	r	er
ز	<i>za'</i>	z	zet
س	<i>sin</i>	s	es
ش	<i>syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	koma terbalik (di atas)
غ	<i>ghain</i>	gh	ge dan ha
ف	<i>fa'</i>	f	ef
ق	<i>qaf</i>	q	qi
ك	<i>kaf</i>	k	ka

(1)	(2)	(3)	(4)
ل	<i>lam</i>	l	el
م	<i>mim</i>	m	em
ن	<i>nun</i>	n	en
و	<i>wau</i>	w	we
هـ	<i>ha'</i>	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	<i>ya'</i>	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	a	a
—	<i>kasrah</i>	i	i
—	<i>dammah</i>	u	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat *sukun* atau didahului oleh huruf yang berharakat *sukun*.

Contoh:

رأس : ra'sun

مرأة : mar'ah

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda & Huruf	Nama	Tanda & Huruf	Nama
—	<i>fathah & ya</i>	ai	a & i
—	<i>fathah & wau</i>	au	a & u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Vokal Panjang (mad)

Harakat & Huruf	N a m a	Huruf & Tanda	N a m a
ا —	<i>fathah & alif</i>	ā	a & garis di atas
ي —	<i>kasrah & ya</i>	ī	i & garis di atas
و —	<i>dammah & wau</i>	ū	u & garis di atas

Contoh:

فِيهَا : fiḥā

يُوسُفُ : yūsufu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* yang hidup atau berharakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah*, transliterasinya adalah *t*.
2. *Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : raḍḍah al-aṭṭfal, atau raḍḍatul aṭṭfal

D. Ya Nisbah (ى)

Transliterasi untuk *ya nisbah* bagi kata yang masih lekat dengan bahasa asalnya (Arab) adalah dengan menggunakan huruf *y*.

Contoh:

البشرى : al-Basyariy

المقدسى : al-Maqdisiy

E. Syaddah (ˆ)

Transliterasi untuk *syaddah* atau *tasydid* adalah dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* (menggandakan huruf).

Contoh:

نَزَّلَ : nazzala

نُعَمَّ : nu‘‘ima

F. Kata Sandang (ال)

Transliterasi untuk kata sandang adalah:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu *l* diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf *syamsiyyah* ada 14 yaitu: ن ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

Contoh:

سِيرَةُ النَّبِيِّ : sīratun-Nabiy, atau sīrah an-Nabiy

أَسْبَابُ النُّزُولِ : asbābun-nuzūl, atau asbāb an-nuzūl

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Huruf *qamariyyah* ada 14 yaitu: ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ي

Contoh:

نُورُ الْقَمَرِ : nūrul-qamar, atau nūr al-qamar

بُسْتَانُ الْأَطْفَالِ : bustānul aṭfāl atau bustān al-aṭfāl

G. Penulisan Huruf Kapital

Huruf kapital dalam transliterasi digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Mengenai penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dalam

tulisan Arabnya lengkap, sedang jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

الأفغانستاني : al-Afghānistāniy

حزبُ الله : Hizbullāh, atau Hizb Allāh

Catatan:

Ada beberapa kata yang tidak mengikuti aturan transliterasi di atas sebagai pengecualian, yaitu:

- a. Nama orang, sesuatu atau istilah yang sudah terbiasa tertulis dan/atau terucap di kalangan umum seperti Muhammad, Abdullah, Imam Syafi'i, mazhab Maliki, Nahdlatul Ulama, Lajnah Bahtsul Masail, fiqih, wudu, salat, ustad dan sebagainya.
- b. Kata asing (Arab) yang diambil dari buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti : Murtadha Muthahhari, Baqir ash-Shadr dan sebagainya.
- c. Kata asing (Arab) yang hampir terbiasa terucap di kalangan umat Islam, tidak ditulis dengan transliterasi penuh, melainkan cukup dicetak miring, seperti : *ijma'*, *qiyas*, *syari'at*, *syara'*, *miqat* dan sebagainya.

DAFTAR SINGKATAN

AS.	: عليه السلام (semoga keselamatan dilimpahkan padanya)
ed.	: editor
et al.	: et alia (dan kawan-kawan)
H...	: Haji
... H	: Hijriyah
KH.	: Kyai Haji
km	: kilo meter
M	: Masehi
m	: meter
NO	: Nahdloetoel 'Oelama' (Nahdlatul Ulama)
no.	: nomor
pen.	: penulis
RA.	: رضى الله عنه او عنها (semoga Allah meridainya)
SAW.	: صلى الله عليه وسلم (semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan padanya)
SWT.	: سبحانه وتعالى (Yang Maha Suci dan Maha Tinggi)
ter.	: terjemahan
th.	: tahun
tp.	: tanpa penerbit
tt.	: tanpa tahun
ttp.	: tanpa tempat
w.	: wafat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له مانح الخيرات والنعيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى جميع الامم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. أما بعد :

Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya, walau banyak kendala dan hambatan, disertasi ini dapat diselesaikan dalam wujudnya yang sekarang. Salawat dan salam semoga senantiasa Dia limpahkan kepada Nabi Muhammad pembimbing umat, dahulu, kini dan masa mendatang.

Disertasi ini memusatkan bahasannya pada telaah kritis terhadap Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kitab-kitab rujukan, metode *istinbāṭ* hukum, dan keputusan-keputusan hukum fiqih yang dihasilkannya dalam rentang waktu 1926 sampai dengan 1999 (yang pertama hingga yang terakhir saat penelitian ini dilaksanakan).

Masalah Nahdlatul Ulama (berdirinya, hubungannya dengan pesantren, kaitannya dengan tasawuf/tarekat, aswaja dan politik), Lajnah Bahtsul Masail (asal-usulnya, keterikatannya dengan empat mazhab dan posisinya sebagai forum ijtihad), dan telaah kritis terhadap kitab rujukan, metode *istinbāṭ* dan hasil keputusan hukum fiqih Lajnah Bahtsul Masail adalah kandungan pokok disertasi ini.

Dalam proses penelitian dan penulisannya, tentu penulis tidak sendirian, melainkan sesuai *sunnatullah* banyak bergantung kepada berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan emas ini penulis memprioritaskan untuk setulusnya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. DR. H. M. Atho Mudzhar, MA promotor yang amat ramah, santun dan sohidur dalam memberikan bimbingan, disertai kejelian, kecermatan dan akurasi yang luar biasa.

2. Yth. Bapak Prof. DR. KH. Said Agil Husein Al-Munawwar, MA kolega yang hangat, guru yang berwibawa, dan promotor yang sangat mantap karakter keulamaannya, namun begitu toleran menghadapi promovendus yang tak sebanding kadar keilmuannya.
3. Yth. Ibu Prof. DR. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo, Bapak Prof. Drs. H. Asymuni Abdurrahman, Bapak H.A. Qodri A. Azizy, MA., Ph.D, Bapak DR. H. Satria Effendi M. Zein (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه) dan Bapak Prof. DR. H. Juhaya S. Praja yang telah memberikan masukan amat berharga bagi pembenahan disertasi ini.
- 4 Kedua orangtua, *Pak* dan *Mak*, yang amat penulis muliakan. Beliau berdualah yang ditakdirkan Allah SWT. menjadi pemelihara, pengajar dan pendidik utama/pertama yang walaupun orang kampung, memiliki kesadaran pentingnya membekali anak dengan ilmu, bukan dengan harta. Bermodal sawah yang hanya seperempat hektar (150 ru), lantaran kesadaran tadi, kedelapan anaknya *alhamdulillah* dapat mengenyam pendidikan yang lumayan memadai, sesuatu yang belum tentu dapat penulis lakukan.
5. Isteri tercinta, *ummanya* anak-anak, pendamping hidup dengan kesetiaan yang menakjubkan, kesabaran yang mengharukan, dan ketelatenan yang amat langka tandingnya. Sering tergolek di tempat tidur sendirian di saat penulis terpaksa bergelut dan bergulat dengan buku-buku hingga larut, tidak jarang sampai jam 02.00 bahkan jam 03.00 dini hari. Walaupun begitu, karena sering lupa atau enggan makan, hampir setiap hari penulis disuapi di depan komputer. Terimakasih *umma*.....! Demikian juga kepada anak-anak, mas Afthon, dik Ahib, dik Faka, dik Ladhi dan dik Azki yang untuk beberapa lama tidak mendapat perhatiannya. *Abah* minta maaf...
6. Ketujuh saudara *kandung* penulis yang tidak kecil bantuan langsung maupun tak langsungnya, khususnya Mungi, Ainung dan Irham yang amat besar sahamnya dalam ikut mencari kitab/buku, mengumpulkan data dan informasi, serta menata-tuliskan dalam komputer yang untuk hal-hal tertentu penulis sendiri kurang menguasainya.
7. Segenap *almukarramun* para guru, ustad dan dosen penulis di semua jenjang pendidikan yang pernah penulis lalui, mulai dari pesantren *diniyah* sampai jenjang

strata tiga, yang atas jasa besar beliau-beliaulah penulis dapat *melek* (sadar/mengerti) huruf, *melek* ilmu, dan semoga juga *melek* amal.

8. Yth. Bapak Drs. Akh. Minhaji, MA. Ph.D., cendekiawan muda yang berkenan meluangkan waktu untuk membaca naskah awal disertasi ini dengan wawasan keilmuan yang amat luwes dan luas, serta luar biasa tanggap, telaten dan teliti dalam mengoreksi dan memberi masukan kepada penulis.
9. *Almukarramun* para kyai, ulama, dan cendekiawan yang sering secara tidak disadari penulis curi kesempatan dan informasinya dengan seakan-akan "*ngobrol*" biasa, padahal sebenarnya sebuah wawancara serius dan ilmiah. Penulis mengkhuskan ucapan terimakasih kepada *almukarram* Drs. KH. Hasjim Abbas yang tatkala panulis bertanya tentang naskah Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama terbaru, di luar dugaan pada lain kesempatan beliau mengantarnya sendiri ke kantor. Juga *almukarram* KHA. Aziz Masyhuri, kyai - ulama - cendekiawan yang informasi tertulis maupun lisannya amat berharga bagi disertasi ini.
10. Demikian pula *almukarramun* KH. Musta'in Syafi'i (Jombang), KH. Jazuli Noor (Bangkalan), KH. Nu'man Thohir (Surabaya), DR. Muhammad Hanif (Pakistan), DR. Mohamed Chitatou (Maroko), DR. Abdullah Endut (Malaysia), as-Sayyid Muhammad Kamranian (Iran), DR. Khandakar Abu Nasr Abdullah (Bangladesh), Drs. Thoha Hamim, MA.Ph.D. (Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Ampel), Drs. Achmad Jainuri, MA.Ph.D. (Asdir. I Pascasarjana IAIN Sunan Ampel) dan Drs. Nur Kholish, M.Ed (Surabaya), serta banyak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang informasinya amat berguna bagi penulisan disertasi ini.
11. Rektor IAIN Sunan Ampel, Rektor IAIN Sunan Kalijaga, Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Direktur PPS. IAIN Sunan Kalijaga, Asdir. I dan II PPS. IAIN Sunan Kalijaga atas kepedulian, bantuan dan pengertiannya kepada penulis, sehingga studi ini dapat diselesaikan.
12. Segenap pimpinan, staf dan fasilitator LAKPESDAM PBNU di Jakarta, perpustakaan-perpustakaan IAIN Sunan Ampel di Surabaya, IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta,

IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) di Malang, IAI Ibrahimy di Situbondo dan STAI Muhammadiyah di Kediri, khususnya Pak Abdullah Ghozin, Pak Nizar Ali, Pak Muazni, pak Syatiri Ahmad, mas Syahrul A'dham, mas Burhanul Mursalin dan Mas Hanafi yang telah banyak membantu penulis dalam pencarian beberapa literatur yang dibutuhkan bagi penulisan dan penyelesaian disertasi ini.

13. Begitu juga semua ulama, pakar, penulis, editor dan jurnalis yang buku, karya atau tulisannya menjadi bagian dari disertasi ini. Tidak lupa semua karyawan-karyawati Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga yang amat besar bantuan mereka selama penulis menempuh studi program doktor.

Kepada semua yang tersebut di atas dan yang tak sempat tersebutkan tetapi memiliki saham bagi terselesaikannya disertasi ini, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih setulusnya, dan hanya dapat berdoa: جزاكم الله خير الجزاء (semoga Allah membalas kebaikan *antum* dengan sebaik-baik balasan).

Akhirnya saran dan kritik senantiasa penulis harapkan dari semua pihak, demi terkoreksinya semua kesalahan dan terlengkapinya segala kekurangan yang sangat mungkin terdapat pada disertasi ini. Kepada pihak-pihak yang penulis berbuat khilaf dan salah, lisan atau perbuatan, sengaja maupun tidak, penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga disertasi sederhana ini ada manfaatnya, *amīn*...!

Sidoarjo, 26 Januari 2000 (jam 02.05)

Penulis,

Ahmad Zahro
NIM. 943024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL, i

PERNYATAAN KEASLIAN, ii

NOTA DINAS, iii

PROMOTOR, xi

ABSTRAK, xii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN, xvi

DAFTAR SINGKATAN, xxi

KATA PENGANTAR, xxii

DAFTAR ISI, xxvi

DAFTAR TABEL, xxx

BAB I PENDAHULUAN, 1

A. Latar Belakang Masalah, 1

B. Definisi Operasional, 5

1. Lajnah Bahtsul Masail, 5

2. Nahdlatul Ulama, 6

3. Telaah kritis, 6

4. Hukum fiqih, 6

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah, 7

1. Pembatasan masalah, 7

2. Perumusan masalah, 7

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian, 8

1. Tujuan penelitian, 8

2. Signifikansi penelitian, 8

E. Studi Terdahulu, 8

F. Metode Penelitian, 12

1. Sumber data, 12

2. Metode pengumpulan dan analisis data, 13

G. Sistematika Pembahasan, 14

BAB II NAHDLATUL ULAMA DAN WACANA KEBERAGAMAANNYA, 16

A. Berdirinya Nahdlatul Ulama, 16

1. Latar belakang berdirinya NU, 16

2. Dasar faham keagamaan dan kemasyarakatan NU, 19

B. Nahdlatul Ulama dan Pesantren, 25

C. Nahdlatul Ulama dan Tasawuf / Tarekat, 35

D. Nahdlatul Ulama dan Aswaja, 45

E. Nahdlatul Ulama dan Politik, 51

BAB III LAJNAH BAHTSUL MASAIL: OTORITAS TERTINGGI DALAM

SOLUSI PROBLEM HUKUM WARGA NU, 61

A. Asal-Usul Lajnah Bahtsul Masail, 61

B. Lajnah Bahtsul Masail dan Fiqih Empat Mazhab, 74

1. Mazhab Hanafi, 76

2. Mazhab Maliki, 80

3. Mazhab Syafi'i, 82

4. Mazhab Hanbali, 85

C. Lajnah Bahtsul Masail dan Ijtihad Nahdlatul Ulama, 89

1. Definisi, dasar dan kedudukan ijtihad, 89

2. Pembagian ijtihad, 94

3. Mujtahid: persyaratan dan tingkatannya, 97

a. Persyaratan mujtahid, 97

b. Tingkatan mujtahid, 101

4. Metode ijtihad, 102

5. Metode *istinbāḥ* hukum Lajnah Bahtsul Masail, 105

a. Metode *qaḥḍiy*, 107

- b. Metode *ilhāqiy*, 109
- c. Metode *manhajiy*, 112

BAB IV LAJNAH BAHTSUL MASAIL: TELAAH KRITIS TERHADAP KITAB RUJUKAN, METODE DAN HASIL KEPUTUSAN, 130

A. Kitab-Kitab *Mu'tabarah* Dalam Lajnah Bahtsul Masail, 130

B. Metode *Istinbāt* Hukum Lajnah Bahtsul Masail, 152

C. Hasil-Hasil Keputusan Hukum Fiqih Lajnah Bahtsul Masail, 159

1. Keputusan yang diyakini valid dan masih berlaku sampai saat ini, 161

- a. Hukum memecah kendi dan telur dalam *walimah al-ḥaml*, 161
- b. Hukum operasi ganti kelamin, 163
- c. Hukum melontar jumrah sebelum *zawāl*, 166
- d. Hukum pencarian dana dari pertunjukan, 171
- e. Hukum kepatuhan pada induk organisasi, 173
- f. Penentuan awal bulan *qamariyah*, 175

2. Keputusan yang dianggap tidak valid dan tetap berlaku sampai
sekarang, 183

- a. Hukum jual beli petasan, 183
- b. Hukum memakai celana panjang, dasi, sepatu dan topi, 186
- c. Hukum menyuntik mayat untuk mengetahui penyakitnya, 188
- d. Harta kena zakat (*al-māl az-zakāwiy*), 190
- e. Hukum membayar *fidyah* untuk salat yang tertinggalkan, 200
- f. Bandar udara Jiddah sebagai *miqat makāniy*, 202

3. Keputusan yang mengalami pelenturan dan perubahan, 209

- a. Hukum bunga bank, 209
- b. Hukum keluarga berencana (KB), 219
- c. Hukum asuransi jiwa, 225
- d. Hukum transplantasi organ tubuh, 232

BAB V PENUTUP, 238

A. Kesimpulan, 238

B. Rekomendasi, 242

a. Rekomendasi teoritis, 242

b. Rekomendasi praktis, 243

DAFTAR PUSTAKA, 245

LAMPIRAN I : ABSTRAK BAHASA ARAB, xxxi

LAMPIRAN II : ABSTRAK BAHASA INGGRIS, xxxiv

LAMPIRAN III : RIWAYAT HIDUP PENULIS, xxxvi

LAMPIRAN IV : BEBERAPA KEPUTUSAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL, 1

DAFTAR TABEL

- TABEL I : FREKUENSI DAN KLASIFIKASI HASIL KEPUTUSAN
KEAGAMAAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL, 64
- TABEL II : KITAB MASYHUR MAZHAB HANAFI, 77
- TABEL III : KITAB MASYHUR MAZHAB MALIKI, 80
- TABEL IV : KITAB MASYHUR MAZHAB SYAFI'I, 83
- TABEL V : KITAB MASYHUR MAZHAB HANBALI, 86
- TABEL VI : KITAB MASYHUR EMPAT MAZHAB DAN FREKUENSI
PENGUNAANNYA DALAM LAJNAH BAHTSUL MASAIL, 88
- TABEL VII : DAFTAR KITAB MAZHAB HANAFI YANG MENJADI RUJUKAN
LAJNAH BAHTSUL MASAIL, 135
- TABEL VIII : DAFTAR KITAB MAZHAB MALIKI YANG MENJADI RUJUKAN
LAJNAH BAHTSUL MASAIL, 135
- TABEL IX : DAFTAR KITAB MAZHAB SYAFI'I YANG MENJADI RUJUKAN
LAJNAH BAHTSUL MASAIL, 136
- TABEL X : DAFTAR KITAB MAZHAB HANBALI YANG MENJADI RUJUKAN
LAJNAH BAHTSUL MASAIL, 143
- TABEL XI : DAFTAR RUJUKAN UMUM DALAM LAJNAH BAHTSUL MASAIL, 144
- TABEL XII : KLASIFIKASI KITAB RUJUKAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL, 146
- TABEL XIII : FREKUENSI PENGGUNAAN KITAB RUJUKAN LAJNAH
BAHTSUL MASAIL, 146
- TABEL XIV : 20 BESAR KITAB RUJUKAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL, 149
- TABEL XV : METODE *ISTINBA'AT* HUKUM FIQIH LAJNAH BAHTSUL MASAIL, 155

מכתב

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang Lajnah Bahtsul Masail (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) tidak dapat dilepaskan dari tradisi pemikiran fiqih *māzhabiy*, dalam konteks ini adalah fiqih empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Sebab sudah merupakan kesepakatan para ulama sejak dahulu, bahwa untuk memecahkan masalah-masalah keagamaan yang berkait dengan hukum fiqih, Nahdlatul Ulama mempergunakan acuan fiqih empat mazhab.¹

Fiqih sendiri adalah ilmu tentang masalah-masalah *syar'iyah* (ajaran agama) praktis yang berkenaan dengan *'ibādāt* (peribadatan), *mu'amalat* (transaksi dalam masyarakat), *munākahāt* (pernikahan) dan *'uqūbāt* (hukuman). Sedangkan fiqih yang difahami Nahdlatul Ulama dalam pengertian terminologis sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan amal praktis yang diambil dan

¹ Baca Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (ADNU) Bab II pasal 3 hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke XXX di Kediri, 21-27 Nopember 1999 yang menyatakan, bahwa Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah Islamiyah beraqidah Islam menurut faham ahlussunnah wal jamaah dan menganut salah satu mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Perlu diketahui, bahwa sejak Muktamar ke I sampai dengan XXX, Bab II pasal 3 ADNU ini walaupun secara redaksional mengalami perubahan, namun substansinya belum pernah berubah dan tetap berlaku sampai sekarang, misalnya :

- a. Dalam Statuten dari perkoempoelan "Nahdloet-'Oelama" di Soerabaia tahun 1930 Fatsal 2 disebutkan, "Adapoen maksoed perkoempoelan ini jaitoe: "Memegang dengan tegoeoh pada salah satoe dari madzhabnja Imam empat, jaitoe Imam Moehammad bin Idris Asj-Sjafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboehanifah An-Noe'man, ataoe Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerdjakan apa sadja jang mendjadikan kemaslahatan agama Islam".
- b. Dalam Anggaran Dasar Partai "Nahdlatul-'Ulama" tahun 1952 pasal 2 tentang Azas dan Tujuan: "Nahdlatul-'Ulama berazas agama Islam dan bertudjuan: a. Menegakkan Sjari'at Islam, dengan berhaluan salah satu dari pada 4 madzhab: Sjafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. b. Melaksanakan berlakunja hukum-hukum Islam dalam masjarakat."
- c. Dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (keputusan Muktamar ke XXVII tahun 1984) pasal 3 tentang aqidah disebutkan, "Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal-Jamaah dan mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali."
- d. Dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (keputusan Muktamar ke XXVIII tahun 1989) pasal 3 disebutkan, "Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunah wal-Jamaah dan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali".

disimpulkan dari dalil-dalil *tafṣīly* (terperinci), adalah fiqh yang diletakkan oleh para mujtahid pada dasar-dasar pembentukannya, yakni al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.²

Peran fiqh dalam kehidupan masyarakat muslim, termasuk warga Nahdlatul Ulama, tidak dapat dipungkiri. al-Maududy menjelaskan urgennya *syari'ah*, termasuk fiqh, karena sasaran *syari'ah* yang utama adalah membangun kehidupan manusia berdasarkan kebaikan dan menyucikannya dari kemungkaran. *Syari'ah* berusaha membasmi kejahatan dalam tatanan sosial dengan melarang keburukan, menjelaskan semua penyebab tumbuh dan berkembangnya kejahatan, menutup lubang-lubang masuknya kejahatan dalam masyarakat yang dapat meracuni umat manusia.³ Konsekuensi logis dari prinsip *syari'ah* yang berusaha membersihkan manusia dari kemungkaran dan menuntun ke jalan yang benar adalah diintroduksikannya *syari'ah* secara teratur, kontinyu dan menyeluruh kepada masyarakat, sehingga akan menjadi kebiasaan dan tradisi yang melekat dalam perilaku keseharian.

Dengan tradisi pemikiran fiqh yang mengacu kepada empat mazhab, Nahdlatul Ulama mencoba memberi solusi terhadap tantangan perubahan yang dihadapi masyarakat untuk melembagakan nilai-nilai baru serta tingkah laku keberagamaannya. Dengan fiqh empat mazhab ini pula, Nahdlatul Ulama secara teoritis memiliki keleluasaan menerapkan kebijaksanaan *jam'iyah* (organisasi) nya untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul, sehingga tidak rigid (kaku), karena mempunyai banyak alternatif dari pendapat-pendapat mazhab yang ada.⁴ Untuk itu Nahdlatul Ulama mempunyai suatu forum yang disebut Lajnah Bahtsul Masail yang beranggotakan para ulama dan intelektual guna memecahkan problematika keagamaan kontemporer dan aktual yang muncul dari kalangan masyarakat, pesantren, dan bahkan dari pengurusnya sendiri.

Walaupun Lajnah Bahtsul Masail tersebut belum otonom, dalam arti Nahdlatul Ulama belum membentuknya sebagai suatu badan otonom, namun dalam Mukhtamar ke

² KH.MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 30. Tampaknya penulis buku ini belum dapat melepaskan diri dari terma fiqh Syafi'i yang didasarkan pada empat asas tersebut.

³ Abul A'la al-Maududy, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, ter. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), 70-71.

⁴ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih Dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 76.

XXVIII di Yogyakarta, tanggal 25-28 Nopember 1989, Komisi I (Bahtsul Masail) merekomendasikan kepada PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.⁵ Dan akhirnya berdasarkan rekomendasi itu PBNU dengan Surat Keputusannya Nomor 30/A.I.05/5/1990 membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah pada tahun 1990.⁶

Lajnah Bahtsul Masail menarik untuk dikaji mengingat :

1. Pada tataran teoritis, Lajnah ini membahas dan memutuskan masalah-masalah yang amat urgen untuk ditetapkan kepastian hukumnya.
2. Sedang dalam tataran praktis, masyarakat Islam Indonesia, terutama warga *Nahdiyyin* (pengikut Nahdlatul Ulama), biasanya lebih patuh pada keputusan-keputusan induk organisasinya yang sebagian besar terformulasi dalam Lajnah Bahtsul Masail.⁷

Lajnah Bahtsul Masail tidak dapat dilepaskan dari kitab acuan dalam mencari jawaban terhadap masalah yang dibahas, yaitu kitab-kitab yang sudah diakui keabsahannya oleh kalangan *Nahdiyyin* yang lazim disebut *al-kutub al-mu'tabarah*. Di sini timbul pertanyaan, apa standar "*kemu'tabaran*" suatu kitab, dan apakah kitab-kitab acuan tersebut mencakup kitab-kitab yang berafiliasi kepada empat mazhab sesuai Anggaran Dasar NU Bab II pasal 3. Hal ini penting karena di kalangan masyarakat *Nahdiyyin* sendiri belum ada kepastian apa sebenarnya yang dimaksud *al-kutub al-mu'tabarah* itu, sehingga sering timbul keraguan tatkala berhadapan dengan suatu kitab (terutama kitab baru) apakah kitab tersebut termasuk *mu'tabar* (diakui) atau tidak.

Yang juga perlu diperhatikan dan dicermati adalah metode apa yang dipergunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail untuk mengambil suatu keputusan hukum fiqih dalam rangka menjawab pertanyaan dari jamaahnya. Hal ini perlu penulis lacak lebih lanjut karena dari

⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-28* (Jakarta: PBNU, tt.), 61.

⁶ Imam AZ dan Nasikh, "Liputan: Dari Halaqah Denanyar," *Santri*, no. 3, th. I (1990), 22-26.

⁷ Ini dapat dilihat antara lain, misalnya dalam penentuan awal dan akhir Ramadan, bila ada perbedaan antara pemerintah dengan Nahdlatul Ulama, maka warga *Nahdiyyin* biasanya lebih mematuhi keputusan Nahdlatul Ulama. Hal ini terjadi beberapa kali pada awal dekade sembilan puluhan yang lalu.

beberapa hasil penelitian, masih terdapat beragam pendapat mengenai metode *istinbāt* (penggalian dan penetapan) hukum yang dipergunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail.

Begitu juga yang perlu dikaji adalah validitas hasil keputusan hukum fiqih yang ditetapkan oleh Lajnah Bahtsul Masail. Masalah ini dipertanyakan karena walaupun secara umum hasil-hasil keputusannya dapat dianggap valid, dalam arti tidak bertentangan dengan *naṣ* al-Qur'an, as-Sunnah, *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan pokok *syari'at* Islam) ataupun *al-qawā'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqih), tetapi ada beberapa di antaranya yang diduga tidak valid, sehingga perlu peninjauan ulang.

Tiga poin di atas merupakan pertanyaan pokok yang menggoda penulis untuk menelusuri dan mencari jawabannya bersamaan dengan dinamika dan perubahan yang mungkin terjadi dalam Lajnah Bahtsul Masail. Menurut pengamatan sementara, Lajnah Bahtsul Masail bukanlah forum yang stagnan, statis dan tidak peka terhadap perkembangan dan perubahan di masyarakat. Karena kalau dilihat aktifitas kalangan Nahdlatul Ulama, terutama beberapa ulama dan intelektual mudanya cukup responsif terhadap kondisi yang terjadi. Bahkan bila ditinjau dari keputusan yang dihasilkan dari beberapa *baḥis al-masā'il* (pengkajian masalah-masalah keagamaan) ada perubahan, misalnya hasil Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tahun 1992.⁸

Berpijak dari deskripsi di atas penulis berusaha mengadakan penelitian dan memberikan analisis untuk mengkritisi Lajnah Bahtsul Masail dengan berangkat dari refleksi terhadap wacana keberagaman Nahdlatul Ulama dan tradisi pemikiran fiqih yang dilembagakan di dalamnya. Analisis dengan kerangka pemikiran demikian diharapkan dapat memahami pola perubahan dan dinamika Nahdlatul Ulama dalam menghadapi tantangan problematik masa depan. Penelitian ini berjudul: Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926 - 1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih).

⁸ Baca KHA. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), 364-367.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya persepsi yang berbeda terhadap judul disertasi ini, perlu adanya penegasan istilah yang dipergunakan dalam judul tersebut, sehingga secara operasional tidak ada kendala terjadinya perbedaan pemahaman menyangkut hal-hal yang dibahas berkaitan dengan penggunaan istilah-istilah berikut :

1. Lajnah Bahtsul Masail

Lajnah Bahtsul Masail (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) adalah salah satu Lajnah (lembaga) dalam *jam'iyah* Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai suatu forum pengkajian yang membahas berbagai masalah keagamaan (Islam). Lajnah ini menghimpun, membahas dan memutuskan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum, yang dalam bidang fiqih mengacu kepada empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan/atau Hanbali. Saat ini Lajnah Bahtsul Masail dibagi menjadi dua sub-komisi, yaitu: Bahtsul Masail *ad-Diniyyah al-Waqi'iyah* (pengkajian masalah-masalah keagamaan aktual, adalah istilah yang sejak lama dipergunakan) dan Bahtsul Masail *ad-Diniyyah al-Mauḍu'iyah* (pengkajian masalah-masalah keagamaan konseptual, adalah istilah baru yang secara nyata mulai dilaksanakan bersamaan dengan Muktamar ke XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya, Jawa Barat dan baru secara resmi dipergunakan dalam Munas Alim Ulama NU tahun 1997 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)⁹. Dalam disertasi ini penulis cukup menyebutnya Lajnah Bahtsul Masail, sebagai kependekan dari Lajnah Bahtsul Masail *ad-Diniyyah al-Waqi'iyah* Nahdlatul Ulama. Perlu dijelaskan adanya penggunaan dua istilah mirip yang dimungkinkan terjadi salah persepsi, yaitu: Bahtsul Masail dan Lajnah Bahtsul Masail; yang pertama adalah sebutan bagi suatu proses, sedang yang kedua adalah sebutan bagi wadahnya, walaupun dalam penuturan sehari-hari antara keduanya sering disamakan dengan hanya menyebut: Bahtsul Masail. Untuk memudahkan pembedaan antara kedua istilah yang mirip tersebut, penulis menggunakan kalimat *baḥs al-masā'il* sebagai ganti Bahtsul Masail.

⁹ Hasil wawancara dengan KH. Hasjim Abbas, anggota Lajnah Bahtsul Masail, pada tanggal 19 Januari 2000 di Jombang.

2. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (disingkat NU dan selanjutnya disebut demikian) adalah suatu *Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah* (organisasi keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M, yang berakidah Islam menurut paham ahlussunnah waljama'ah dan menganut salah satu mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), serta berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

3. Telaah kritis

Suatu penelitian, pembahasan dan pengkajian secara objektif dan kritis terhadap masalah yang timbul dalam Lajnah Bahtsul Masail. Jadi penelitian ini bukan sekedar mendeskripsi dan membandingkan, namun juga mencermati dan mengkritisi Lajnah Bahtsul Masail dalam hal penggunaan kitab-kitab rujukan yang lazim disebut *al-kutub al-mu'tabarah*, metode *istinbat* hukum fiqih yang dipergunakan, dan hasil-hasil keputusan hukum fiqih yang ditetapkannya.

4. Hukum fiqih

Yang dimaksud dengan hukum fiqih¹¹ di sini adalah hukum *syari'iy* (hukum agama) yang digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* (argumentasi) para mujtahid, baik mujtahid mutlak maupun yang tidak mutlak, baik secara individual maupun kolektif, mengenai suatu masalah praktis dan bersifat cabang yang didasarkan atas dugaan kuat terhadap dalil-dalil yang terperinci.

¹⁰ Anggaran Dasar NU Bab I pasal 1, Bab II pasal 3 dan Bab III pasal 4 hasil Mukhtamar ke XXX di Kediri, 21-27 Nopember 1999.

¹¹ Perlu dibedakan antara fiqih dengan *syari'ah* atau hukum Islam. Fiqih adalah ilmu mengenai hukum-hukum *syari'ah* praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, Juz I (Damaskus : Dār al-Fikr, 1989), 16. Sedangkan *syari'ah* adalah segala ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. atau ditetapkan dasar-dasarnya agar dipedomani oleh manusia dalam rangka menjalin hubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam dan dengan kehidupannya. Mahmud Syaltūt, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 12. Atau hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 7-12.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Dalam pembahasan ini permasalahannya dibatasi hanya dalam domain hukum fiqih¹², yakni penyelesaian masalah *fiqhiyyah* (problem fiqih) yang dilakukan oleh Lajnah Bahtsul Masail tingkat nasional yang diselenggarakan dalam Kongres atau Muktamar, Konferensi Besar, Rapat Dewan Partai, maupun Musyawarah Nasional Alim Ulama selama kurun waktu 1926 (*baḥis al-masāil* pertama) sampai dengan 1999 (*baḥis al-masāil* yang terakhir saat penelitian ini dilaksanakan) selain *baḥis al-masāil* dalam Muktamar ke XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV yang sampai saat ini dokumennya tidak/belum ditemukan. Permasalahan tersebut dikonsentrasikan pada masalah-masalah *al-Waqi'iyah* (aktual) yang merupakan bagian terbesar dari bidang garapan dan aktifitas Lajnah Bahtsul Masail (sampai saat ini sudah terselenggara 39 kali, walaupun data yang dapat dikumpulkan hanya sebanyak 33 kali). Sedangkan masalah-masalah *al-Mauḍu'iyah* (konseptual) tidak dijadikan obyek kajian, mengingat produk keputusannya masih amat sedikit dan frekuensi pelaksanaannya masih sangat rendah (sampai saat ini baru diselenggarakan sebanyak tiga kali).

2. Perumusan masalah

Secara singkat rumusan masalah yang penulis asumsi sebagai problem akademis dalam disertasi ini adalah :

- a. Apa yang dimaksud *al-kutub al-mu'tabarah* (kitab-kitab yang diakui) dalam Lajnah Bahtsul Masail sebagai rujukan guna menetapkan suatu keputusan hukum fiqih.
- b. Apa metode yang dipergunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail dalam menetapkan suatu keputusan hukum fiqih.
- c. Bagaimana validitas keputusan hukum fiqih yang dihasilkan oleh Lajnah Bahtsul Masail.

¹² Hal ini didasarkan atas pertimbangan :

- a. Sesuai vak wajib dan disiplin ilmu yang ditekuni penulis, yakni fiqih.
- b. Fiqih merupakan masalah yang paling banyak muncul di masyarakat.
- c. Masalah-masalah fiqih mendominasi hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail.

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan penelitian

Di samping untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh gelar doktor dalam ilmu agama Islam, penelitian ini juga bertujuan:

- a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud *al-kutub al-mu'tabarah* (kitab-kitab yang diakui) dalam Lajnah Bahtsul Masail sebagai rujukan guna menetapkan suatu keputusan hukum fiqih.
- b. Untuk mengetahui apa metode yang dipergunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail dalam menetapkan suatu keputusan hukum fiqih.
- c. Untuk mengetahui bagaimana validitas keputusan hukum fiqih yang dihasilkan oleh Lajnah Bahtsul Masail.

2. Signifikansi penelitian

Signifikansi penelitian ini dalam tataran teoritis adalah sebagai sumbang pikir bagi khazanah pemikiran hukum Islam di Indonesia, terutama mengenai fiqih empat mazhab dan metode *istinbat* hukum yang dikembangkan oleh Lajnah Bahtsul Masail, dan sebagai kajian obyektif terhadap keputusan hukum fiqih yang dihasilkannya.

Sedang dalam tataran praktis, di samping berguna bagi Lajnah Bahtsul Masail sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk mengadakan evaluasi, juga bagi kalangan ulama dan intelektual ketika membahas tentang hukum fiqih, utamanya yang berasal dari keputusan-keputusan Lajnah Bahtsul Masail.

E. Studi Terdahulu

Telah banyak penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang NU dengan kecenderungan mengambil tema-tema yang bernuansa politik, faham keagamaan, maupun tokohnya.¹³ Sedangkan penelitian tentang NU yang terkait dengan fiqih masih sangat

¹³ Seperti Zul Asyri, "NU, Studi tentang Faham Keagamaan dan Pelestariannya Melalui Pendidikan Pesantren," (Disertasi Doktor, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990) yang memusatkan kajiannya pada kaitan faham keagamaan NU dengan pendidikan pesantren ; Andrée Feillard, "Islam et Armée Dans L'indonésie

sedikit, itupun dengan kecenderungan tematis.¹⁴ Ada juga beberapa studi terdahulu yang memusatkan kajiannya pada produk hukum maupun metode ijtihad lembaga sejenis Lajnah Bahtsul Masail milik institusi atau organisasi kemasyarakatan Islam yang lain.¹⁵

Adapun penelitian ilmiah yang membahas tentang Lajnah Bahtsul Masail, sampai saat proposal disertasi ini diusulkan dan penelitian pendahuluan dilakukan pada akhir tahun 1996 belum diketahui adanya, kecuali sebuah skripsi Slamet Basyir, "Majlis Bahtsul Masail Syuriah NU : Studi tentang Pola Pengkajian dan Penetapan Hukum Islam" (Skripsi Drs., IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1991) yang baru sepintas membahas tentang Lajnah Bahtsul Masail. Secara garis besar skripsi ini menyatakan, bahwa Majlis Bahtsul Masail dalam memahami ajaran Islam mendasarkan kepada empat sumber hukum yang disepakati, yaitu al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*, di samping mengakui adanya sumber-sumber hukum lain yang diperselisihkan; NU menganut faham *taqlid* bermazhab yang dianggap merupakan jalan terbaik; dan dalam rangka menghadapi tantangan modernitas Majlis

Contemporaine Les pionniers de la tradition,"(Disertasi Doktor, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1993) dan telah diterjemahkan oleh Lesmana dengan judul *NU vis-à-vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999) yang merupakan studi komprehensif mengenai interaksi NU dan negara pada masa Orde Baru; Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994) yang walaupun ada pembahasan tentang Bahtsul Masail (Martin sering menyebutnya dengan fatwa), namun hanya sedikit dan sepintas ; dan S. Sinansari Ecip (ed.), *NU, Khittah dan Godaan Politik* (Bandung: Mizan, 1994). Menyusul kemudian Gregory John Fealy, "Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama 1952-1967," (Disertasi Doktor, Monash University, Victoria, 1998) yang merupakan kajian historis kiprah politik ulama NU; dan Said Jamhuri, "Kepemimpinan Karismatik Nahdlatul Ulama - Studi Kasus Abdurrahman Wahid" (Disertasi Doktor, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999).

Dapat disebutkan juga karya Muchtar Naim, "The Nahdlatul Ulama Party / 1952-1955," (Tesis MA., Mc.Gill University, Montreal, 1960); Musthofa Sonhadji, "Nahdlatul Ulama Organisasi Sosial Keagamaan tahun 1926 - 1952," (Tesis MA, IAIN Sunan Kalijaga, 1987); M. Nadjid Muchtar, "Konsep Ulama dalam Islam dan Pemikiran tentang Kedudukannya dalam Lingkungan Nahdlatul Ulama," (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1988); Hilmy Mochtar, "Dinamika Nahdlatul Ulama, Suatu Studi tentang Elite Kekuasaan Politik Islam di Jombang Jawa Timur," (Tesis MA, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989); dan Laode Ida, "Dinamika Internal NU setelah Kembali ke Khittah 1926," (Tesis MA, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995).

¹⁴ Seperti Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1994) yang merupakan penelitian tentang fiqh NU, namun bukan fiqh dalam Lajnah Bahtsul Masail melainkan dalam lapangan fiqh politik.

¹⁵ Seperti Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975 - 1988* (Jakarta: INIS, 1993) yang memfokuskan pada pengujian fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995); Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999) dan Kholidah, "Metode Ijtihad Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah Periode 1988 - 1998" (Tesis MA, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000) yang ketiganya terfokus pada kajian metodologis mengenai ijtihad di Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam) ataupun al-Jam'iyatul Washliyah.

Bahtsul Masail NU berusaha mengembangkan sistem bermazhab secara *manhaji* (yang pada saat skripsi ini selesai ditulis, hal tersebut belum menjadi keputusan-pen.).

Penelitian ilmiah yang lebih intensif mengenai Lajnah Bahtsul Masail baru ditemukan di tengah perjalanan penelitian dan penulisan disertasi ini yang sampai sekarang diketahui ada empat buah, yaitu:

1. Radino, "Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama, Kajian Terhadap Keputusan Bahtsul Masa'il NU Pusat Pada Masalah-Masalah Fiqih Kontemporer" (Tesis MA, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1997). Garis besar kandungan tesis ini adalah pembahasan mengenai enam masalah fiqih kontemporer yang diambil dari keputusan Lajnah Bahtsul Masail dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung dan Mukhtamar ke XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya dengan kesimpulan, bahwa NU lebih banyak menggunakan metode ijtihad *ta'liyy* (yang didasarkan pada *'illat*) dan *istislahy* (yang bertumpu pada asas kemaslahatan), serta sedikit sekali mengembalikan kepada kitab-kitab fiqih klasik.
2. Imam Yahya, "Bahtsul Masail NU dan Transformasi Sosial: Telaah Istinbath Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992," (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998). Secara garis besar tesis ini mengandung pembahasan tentang hasil-hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung, Mukhtamar ke XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya dan Munas Alim Ulama tahun 1997 di Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan, bahwa metode penetapan hukum yang dipergunakan oleh NU secara berurutan adalah bermazhab secara *qauli* (mengutip langsung dari naskah kitab rujukan), *manhaji* (menelusuri dan mengikuti metode *istinbat* hukum mazhab empat), *ilhāq* (menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan) dan *istinbat jamā'i* (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif).
3. Rifyal Ka'bah, "Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU sebagai Keputusan *Ijtihad Jamā'i* di Indonesia." (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998). Disertasi ini secara garis besar membandingkan antara Lajnah

Tarjih Muhammadiyah dengan Lajnah Bahsul Masa'il NU dalam hal obyek kajian tentang beberapa masalah hukum kontemporer, istilah-istilah yang digunakan, cakupan dan bentuk keputusan, metodologi, sifat perubahan dalam keputusan, usaha kodifikasi/kompilasi hukum, antisipasi tantangan masa depan dan lain-lain. Mengenai Lajnah Bahtsul Masail, yang dikemukakan adalah tentang buku-buku yang sering dikutip; metode yang digunakan, yaitu metode tanya-jawab dengan menggunakan empat langkah penentuan hukum, yakni merujuk kitab-kitab fiqih mazhab tertentu, *taqrīr jamā'ī* (penetapan secara kolektif), *ilhāq al-masā'il bi nazāirihā* (menganalogikan hukum permasalahan tertentu dengan hukum kasus yang serupa), dan *istinbāt jamā'ī*; dan jenis-jenis keputusan Lajnah Bahtsul Masail.

4. Abd. Basid, "Baḥth al-Masā'il Dan Wacana Pemikiran *Fiqh*, Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama Tahun 1985-1995," (Tesis MA, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999). Tesis ini memaparkan secara deskriptif hasil-hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail dalam Mukhtamar ke XXVIII tahun 1989 di Yogyakarta dan Mukhtamar ke XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya. Mengenai metode tidak ada penegasan dari penulisnya, selain hanya mengutip hasil keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung mengenai prosedur penjawaban masalah, yaitu: untuk menjawab masalah yang jawabannya mampu dengan menggunakan 'ibārah kitāb,¹⁶ dan dalam kitab tersebut hanya ada satu *qaul/wajah*¹⁷, maka *qaul/wajah* yang ada dalam 'ibārah kitāb itulah yang digunakan sebagai jawaban. Namun bila ternyata dalam 'ibārah kitāb ada lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrīr jamā'ī* yang berfungsi untuk memilih satu *qaul/wajah*. Untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul/wajah*, maka menggunakan prosedur *ilhāq al-masā'il bi nazāirihā* secara kolektif. Dalam kasus penyelesaian yang tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka dapat dilakukan *istinbāt jamā'ī* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji*.

¹⁶ 'Ibārah kitāb adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada dalam kitab-kitab rujukan Lajnah Bahtsul Masail.

¹⁷ *Qaul* adalah pendapat imam mazhab, sedang *wajah* adalah pendapat ulama mazhab.

Dalam kasus penyelesaian yang tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka dapat dilakukan *istinbāt jamā'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji*.

Jadi penelitian disertasi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lanjutan dan pendalaman dalam kaitannya dengan Lajnah Bahtsul Masail, mengenai kitab-kitab *mu'tabarah* dan validitas keputusannya yang belum pernah dibahas oleh penelitian terdahulu, serta mengenai metode *istinbāt* hukumnya yang dalam penelitian terdahulu, antara peneliti satu dengan yang lain terdapat perbedaan yang cukup berarti, sehingga memerlukan klarifikasi dan pelacakan lebih lanjut.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan posisi penelitian ini sebagai berikut:

1. Di tengah-tengah studi tentang NU, penelitian ini memusatkan kajiannya pada Lajnah Bahtsul Masail.
2. Di tengah-tengah studi tentang metode *istinbāt* hukum lembaga fatwa yang dimiliki organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, penelitian ini mengkhususkan diri pada lembaga fatwa milik NU, yaitu Lajnah Bahtsul Masail.
3. Di tengah-tengah studi tentang Lajnah Bahtsul Masail, penelitian ini terkonsentrasi pada kajian hukum fiqh dengan cakupan:
 - a. kitab-kitab yang diakui (*al-kutub al-mu'tabarah*),
 - b. metode *istinbāt* hukum,
 - c. validitas hasil keputusan hukum fiqh, dan
 - d. dalam rentang waktu 1926 -1999.

F. Metode Penelitian

1. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data tertulis, baik kitab, buku, karya ilmiah, surat kabar, majalah, maupun jurnal keilmuan yang berhubungan dengan disertasi ini; dan sumber data tak tertulis adalah para ulama dari kalangan NU, pesantren dan mereka yang terlibat dalam *bahis al-masā'il*, serta para intelektual lainnya.

Sumber data yang berkait langsung dengan *baḥis al-masāil*, hasil keputusan dan pelakunya dikategorikan sebagai sumber data primer, sedangkan yang tidak berhubungan langsung dengan *baḥis al-masāil*, keputusan ataupun pelakunya digolongkan sebagai sumber data sekunder.

2. Metode pengumpulan dan analisis data

Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian agama sebagai gejala budaya¹⁸ dengan pendekatan sejarah, karena membahas permasalahan yang terjadi dalam rentang waktu 1926 - 1999 dan pendekatan *uṣūl* fiqih, karena mengkaji masalah hukum fiqih, baik yang berkaitan dengan penggunaan kitab rujukan, metode *istinbāt* maupun hasil-hasil keputusan hukum fiqih dalam Lajnah Bahtsul Masail. Oleh karena itu metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan telaah dokumenter terhadap kitab, buku, karya ilmiah, surat kabar, majalah, jurnal keilmuan dan wawancara dengan para ulama yang berkompeten dalam *baḥis al-masāil* dan intelektual lainnya, serta pengamatan lapangan terhadap sidang Lajnah Bahtsul Masail, beberapa pesantren, dan perilaku sebagian warga *Nahdiyyīn*.

Perlu dijelaskan di sini bahwa untuk memperoleh sumber data tertulis, penulis berusaha melacaknya ke berbagai tempat yang memungkinkan, semisal toko buku, perpustakaan, kantor LAKPESDAM PBNU (Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), kantor PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama), pondok pesantren dan perorangan yang memiliki sumber data yang dibutuhkan.

Sedangkan untuk menentukan sumber data tak tertulis ditetapkan dengan *purposive sampling*, artinya penulis mencari dan mewawancarai sejumlah ulama yang terlibat dalam *baḥis al-masāil* dan intelektual lainnya, serta memilih dan mengamati sidang Lajnah Bahtsul Masail, beberapa pesantren dan perilaku sebagian warga *Nahdiyyīn*.

Adapun analisis datanya dilakukan dengan dua cara. Untuk data kuantitatif digunakan metode analisis kuantitatif, baik dalam wujud angka absolut maupun prosentase.

¹⁸ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 11-22.

Sedang untuk data kualitatif digunakan metode analisis kualitatif dengan cara berpikir reflektif (deduksi-induksi), komparatif dan kritis.

Prosedur analisis yang ditempuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terhadap data kuantitatif : dikoleksi, ditabulasi, kemudian dianalisis.
- b. Terhadap data kualitatif : dikoleksi, diklasifikasi, diseleksi, dikomparasi, kemudian dikritisi.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana penelitian ilmiah pada umumnya, bab satu adalah pendahuluan dengan cakupan: latar belakang masalah yang menegaskan mengapa penelitian ini dilaksanakan; dilanjutkan dengan definisi operasional untuk menghindari persepsi yang berbeda terhadap judul disertasi. Kemudian dikemukakan pembatasan dan perumusan masalah, serta tujuan dan signifikansi penelitian untuk memastikan masalah apa yang diteliti dengan keterbatasannya, serta untuk apa dan apa manfaat penelitian ini dilakukan. Dikemukakan pula studi terdahulu yang berguna untuk menegaskan posisi dan keaslian penelitian tentang Lajnah Bahtsul Masail ini, yang tidak hanya terfokus pada pembahasan deskriptif, tapi juga analisis kritis. Lalu dilanjutkan dengan metode penelitian, baik metode pengumpulan data maupun metode analisisnya dan sistematika pembahasan yang menjelaskan komponen dan kronologi penelitian ini.

Bab kedua sudah mulai masuk tahap awal penelitian. Dikatakan demikian karena bab ini berisi komponen global tentang eksistensi sebuah *jam'iyah* (organisasi) yang bernama NU dan wacana keberagamaannya. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang berdirinya NU, faham keagamaan dan sikap kemasyarakatannya. Juga dijelaskan tentang kaitan antara NU dengan pesantren untuk mengetahui anatomi kehidupan NU yang berjangtung dan berpusat di pesantren. Dalam bab ini juga dikaji wawasan keagamaan warga *Nahdiyyin* (pengikut NU), yang tidak dapat dilepaskan dari tasawuf/tarekat dan Aswaja (ahlussunnah waljama'ah). Kajian ini diarahkan untuk mengetahui masalah keilmuan yang menjadi ciri khas NU yang berpengaruh terhadap Lajnah Bahtsul Masail. Kaitan NU dengan

politik juga dikemukakan dalam bab ini guna mengetahui kiprahnya dalam percaturan politik di Indonesia yang diyakini ikut mewarnai wacana keberagamaan dan tradisi keilmuan warga *Nahdiyyīn*.

Selanjutnya bab ketiga dalam penelitian ini berusaha menjelaskan tentang Lajnah Bahtsul Masail yang merupakan Lajnah (lembaga) yang mempunyai otoritas formal secara organisatoris bagi NU untuk memecahkan problem keberagamaan warganya. Bab ini mendeskripsikan asal-usul diadakannya *baḥis al-masāil*, kaitannya dengan fiqih empat mazhab sebagai pagar pembatas pemikiran dan pengamalan fiqih warga *Nahdiyyīn*, dan Lajnah Bahtsul Masail sebagai forum "ijtihad" dengan model khusus bagi NU.

Bab keempat berisi analisis penulis tentang Lajnah Bahtsul Masail, baik yang terkait dengan penggunaan kitab-kitab *mu'tabarah* (yang diakui kesahihannya) sebagai rujukan dalam penetapan hukum fiqih, metode *istinbāt* (penggalian dan penetapan) hukum fiqih, maupun hasil-hasil keputusan hukum fiqih dalam Lajnah Bahtsul Masail.

Kemudian bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi, baik teoritis maupun praktis terkait dengan Lajnah Bahtsul Masail.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Lajnah Bahtsul Masail (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) adalah salah satu lembaga dalam *jam'iyah* (organisasi) Nahdlatul Ulama yang menghimpun, membahas dan memutuskan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum, yang dalam bidang fiqih mengacu kepada mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan/atau Hanbali. Lajnah Bahtsul Masail dibagi menjadi dua sub-komisi, yaitu: Bahtsul Masail *ad-Dīniyyah al-Wāqī'iyah* (pengkajian masalah-masalah keagamaan aktual) dan Bahtsul Masail *ad-Dīniyyah al-Mawḍū'iyah* (pengkajian masalah-masalah keagamaan konseptual).

Kegiatan *baḥis al-masāil* telah ada sejak Kongres/Muktamar ke I (1926) yang sebutannya melekat pada *event* tersebut, tanpa memiliki nama tersendiri. Berdasarkan rekomendasi Muktamar ke XXVIII (Yogyakarta, 25-28 Nopember 1989) dan *ḥalaqah* Denanyar, Jombang (26-28 Januari 1990), PBNU dengan Surat Keputusan Nomor 30/A.I.05/5/1990 membentuk "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*" sebagai lembaga permanen yang menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk menangani persoalan keagamaan dengan melakukan "*istinbat jama'iy*" (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif).

Mengenai proses terjadinya *baḥis al-masāil* dapat digambarkan sebagai berikut: jika ada permasalahan yang dihadapi oleh anggota masyarakat, maka mereka mengajukannya kepada Majelis Syuriah NU tingkat Cabang (Kabupaten, Kota atau Pesantren Besar) guna menyelenggarakan sidang *baḥis al-masāil* yang hasilnya diserahkan kepada Majelis Syuriah NU tingkat Wilayah (Propinsi) untuk kemudian diadakan sidang *baḥis al-masāil* guna membahas permasalahan-permasalahan tertentu yang dianggap urgen bagi kehidupan umat. Permasalahan yang belum tuntas atau masih diperselisihkan, diserahkan kepada Majelis Syuriah PBNU (Pusat) untuk diinventarisasi dan diseleksi berdasarkan skala prioritas pembahasannya, dan terkadang ditambah permasalahan yang diajukan oleh PBNU sendiri,

lalu diedarkan kepada para ulama dan cendekiawan NU yang ditunjuk sebagai anggota Lajnah Bahtsul Masail agar dipelajari dan dipersiapkan jawabannya, untuk selanjutnya dibahas, dikaji dan ditetapkan keputusannya oleh Lajnah Bahtsul Masail dalam sidang *baḥs al-masāil* yang diselenggarakan bersamaan dengan Mukhtar atau Musyawarah Nasional Alim Ulama NU.

Sejak 1926 hingga 1999 telah diselenggarakan *baḥs al-masāil* tingkat nasional sebanyak 39 kali. Namun berdasarkan dokumen yang dapat dihimpun, hanya ditemukan 33 kali *baḥs al-masāil* (selain dalam Mukhtar ke XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV) yang menghasilkan 505 keputusan, terdiri atas 428 keputusan di bidang fiqih dan 77 keputusan non-fiqih.

Dari penelitian terhadap Lajnah Bahtsul Masail yang berkaitan dengan keputusan hukum fiqih, sesuai perumusan masalahnya, ditemukan jawaban sebagai berikut:

1. Belum ada pemahaman final dan kesepakatan definitif mengenai apa yang dimaksud *al-kutub al-mu'tabarah* (kitab-kitab otoritatif) yang dijadikan rujukan dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum fiqih bagi Lajnah Bahtsul Masail. Dimulai dari tanpa mempersoalkan definisi, lalu didefinisikan sebagai *al-kutub 'alā al-māzāhib al-arba'ah* (kitab-kitab yang berorientasi pada mazhab empat) dalam Munas Alim Ulama NU pada tanggal 18-21 Desember 1983 di Situbondo, kemudian ditegaskan dalam Munas Alim Ulama NU pada tanggal 21-25 Juni 1992 di Bandar Lampung, bahwa yang dimaksud *al-kutub al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah ahlussunnah waljama'ah (Aswaja). Namun pengasan ini "mentah" lagi setelah adanya "gugatan dan tuntutan" redefinisi terhadap Aswaja sendiri yang walaupun sudah dibentuk tim khusus untuk itu, sampai sekarang definisi Aswaja belum *jami' mani'* (tuntas dan tegas). Berkaitan dengan penggunaan kitab rujukan yang lazim disebut *al-kutub al-mu'tabarah* ini ada dinamika yang menarik, yaitu dari dominasi mencolok kitab-kitab *Syafi'iyah* dan kitab-kitab kuning dalam waktu yang cukup lama, mulai bergeser pada dipergunakannya juga sebagian kitab mazhab lain termasuk selain mazhab

empat, bahkan beberapa kitab yang tidak berafiliasi pada mazhab tertentu dan kitab-kitab baru, walaupun dalam jumlah dan frekuensi pemakaian yang masih sedikit.

2. Metode yang dipergunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail dalam *istinbāt* hukum fiqih adalah metode *qauliy* (langsung merujuk pada teks suatu kitab/rujukan), metode *ilhāqiy* (mengqiyaskan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang sudah ada kejelasannya dalam teks suatu kitab/rujukan) dan metode *manhajiy* (menelusuri dan mengikuti metode yang dipergunakan oleh mazhab empat). Metode-metode tersebut dipergunakan secara berjenjang dengan mendahulukan metode *qauliy*, jika tidak dapat lalu metode *ilhāqiy*, dan bila tidak mungkin baru menggunakan metode *manhajiy* dan dilaksanakan dengan pendekatan *māzhabiy* (berorientasi pada mazhab empat) dalam forum “ijtihād” *jamā’iy* (kolektif), serta menggunakan tehnik tanya-jawab dan diskusi. Berkaitan dengan pendekatan *māzhabiy*, orientasi Lajnah Bahtsul Masail pada mazhab Syafi’i amat dominan dibanding mazhab lainnya. Di samping itu ada jawaban yang langsung merujuk ayat al-Qur’an ataupun teks suatu hadis, ada juga jawaban yang tidak merujuk suatu dalil. Namun diresmikannya penggunaan metode *manhajiy* dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 merupakan titik awal perkembangan metode *baḥs al-masāil* yang tentunya akan membuka wacana baru yang *luwes* (fleksibel) dan luas dalam hal produk-produk hukum Lajnah Bahtsul Masail. Dalam hal penggunaan metode penggalian dan penetapan suatu keputusan Lajnah Bahtsul Masail juga mengalami dinamika yang prospektif, yakni dari hanya dipergunakannya metode *qauliy*, beranjak pada kemungkinan terlibatnya penalaran dalam format metode *ilhāqiy*, bahkan lebih maju lagi dengan disepakati dan diresmikannya penggunaan metode *manhajiy*.
3. Dari seluruh keputusan hukum fiqih Lajnah Bahtsul Masail yang berjumlah 428 keputusan sebagian besar adalah valid dilihat dari segi tidak adanya pertentangan dengan al-Qur’an, hadis, *maqāṣid asy-syari’ah* dan *qawā’id fiqhiyyah*, seperti keputusan tentang hukum memecah kendi dan telur dalam *walimah al-haml* (tingkepan-Jawa), operasi ganti kelamin, melontar jumrah sebelum *zawal* (tergelincirnya matahari), pencarian dana dari

pertunjukan, kepatuhan pada induk organisasi, penentuan awal bulan *qamariyah* dan sebagainya. Namun setidaknya ada enam keputusan yang dipertanyakan validitasnya, yaitu keputusan tentang hukum jual-beli petasan, memakai celana/topi/dasi/sepatu, menyuntik mayat untuk keperluan medis, ketentuan harta kena zakat, *fidyah* terhadap salat yang tertinggal, dan status Jiddah sebagai *miqat makany*. Ada juga keputusan yang mengalami perubahan, "pelenturan" dan *dinasakh* (dihapus) oleh keputusan Lajnah Bahtsul Masail berikutnya, antara lain keputusan tentang hukum bunga bank, keluarga berencana, asuransi jiwa dan transplantasi organ tubuh. Dalam kaitan dengan hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail, ternyata hampir semua keputusan hukum fiqih terkonsentrasi pada mazhab Syafi'i. Ada juga beberapa keputusan Lajnah Bahtsul Masail yang tidak dilaksanakan oleh warga *Nahdiyyin*, baik secara individual maupun institusional, antara lain mengenai hukum merujuk langsung pada al-Qur'an dan as-Sunnah, persyaratan pengajaran antar lawan jenis, hukum menjual padi di tangkainya, masalah bagi hasil pemeliharaan kambing, melepas binatang piaraan tatkala haji/*'umrah*, dan program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi). Berhubungan dengan hasil keputusan hukum fiqih ternyata juga terjadi terobosan prospektif, yaitu adanya beberapa keputusan baru yang memperjelas, menambah, dan bahkan mengganti beberapa keputusan lama, sesuatu yang dalam kultur NU jarang terjadi lantaran sikap hormat dan *ta'zim* terhadap para ulama yang amat dijunjung tinggi.

4. Selama ini NU memang teguh dan konsisten dalam hal membela dan mempertahankan khazanah berharga masa silam (المحافظة على القديم الصالح), tetapi terkesan gamang mengambil dan memanfaatkan informasi positif masa kini (الاخذ بالجديد الاصلاح), terbukti dengan masih dominannya pemakaian metode *qauliy* dan/atau *ilhāqiy* untuk merujuk kitab-kitab kuning dan masih samarnya penggunaan metode *manhajiy* sebagai upaya penggalian dan penetapan hukum fiqih dalam Lajnah Bahtsul Masail.

B. Rekomendasi

Masih adanya beberapa problema berkaitan dengan penelitian ini, baik berkenaan dengan hal-hal teoritis, maupun berhubungan dengan masalah praktis, penulis merasa perlu memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi teoritis:

- a. Telah banyak penelitian dilakukan terhadap beberapa “lembaga fatwa” yang menangani permasalahan keagamaan anggotanya yang dimiliki organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, antara lain Lajnah Fatwa Majelis Ulama Indonesia oleh M. Atho Mudzhar (1990), Majlis Tarjih Muhammadiyah oleh Fathurrahman Djamil (1993), Dewan Hisbah Persatuan Islam oleh Dede Rosyada (1998), Dewan Fatwa al-Jam‘iyatul Washliyah oleh Kholidah (2000), dan Bahtsul Masail NU oleh Ahmad Zahro (saat ini). Untuk melengkapi variasi khazanah pemikiran hukum Islam di Indonesia, kiranya perlu penelitian lebih lanjut terhadap lembaga serupa yang dimiliki oleh beberapa organisasi kemasyarakatan Islam lain yang sepengetahuan penulis belum diteliti secara intensif, seperti Sarekat Islam, al-Irsyad, al-Khairiyah, Mathla‘ul Anwar, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Tarbiyah Islamiyah dan sebagainya.
- b. Terhadap beberapa penelitian yang sudah ada sebagaimana tersebut di atas, rasanya juga diperlukan penelitian komparatif guna mengetahui persamaan dan perbedaan antara beberapa “lembaga fatwa” yang ada di masing-masing organisasi, sehingga dapat ditentukan karakteristik pemikiran hukum Islam Indonesia. Dalam hal ini Rifyal Ka‘bah sudah melakukan perintisannya, yaitu perbandingan antara Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU (1998).
- c. Penelitian mengenai Lajnah Bahtsul Masail sendiri masih ada celah yang belum terliput disertasi ini dan kiranya perlu dilakukan penelitian terhadapnya, antara lain tentang pelaku *baḥis al-masāil*, sejumlah keputusan non fiqih, *baḥis al-masāil* dalam beberapa Muktamar yang sampai saat ini dokumennya tidak/belum ditemukan, yaitu Muktamar ke XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV.

2. Rekomendasi praktis:

- a. Perlu ketegasan maksud *al-kutub al-mu'tabarah* yang menjadi rujukan Lajnah Bahtsul Masail, sehingga dapat mewedahi semua aspirasi dan kecenderungan yang berkembang di kalangan *Nahdiyyin*. Penulis berpendapat, bahwa *al-kutub al-mu'tabarah* sebaiknya didefinisikan secara operasional adalah kitab yang disepakati oleh peserta Lajnah Bahtsul Masail sebagai rujukan guna menetapkan suatu keputusan hukum.
- b. Perlu kejelasan aplikasi metode bermazhab secara *manhajiy* sebagaimana dicetuskan dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung, agar metode *istinbāt* hukum dalam Lajnah Bahtsul Masail lebih inovatif dan progresif. Menurut penulis, terjadinya ketidakvalidan sebagian keputusan hukum fiqh, terutama yang menyangkut persoalan kontemporer, justru bermula dan berakar dari tetap berkuatnya Lajnah Bahtsul Masail pada pemakaian secara dominan metode *qauliy* dan *ilhāqiy* dalam *istinbāt* hukum sebagian besar permasalahan yang dihadapi. Aplikasi metode *manhajiy* mendesak untuk segera dibuktikan dengan secara konsisten dan konsekuen menelusuri dan mengikuti metode yang dipergunakan oleh keempat mazhab. Metode *manhajiy* tidaklah sekedar kehadiran ayat dan/atau hadis dalam suatu keputusan dengan tetap menyertakan pemahaman lama terhadap ayat atau hadis tersebut yang dikutip dari *al-kutub al-mu'tabarah*, melainkan dengan melakukan rekonstruksi sekaligus reformasi terhadap kitab itu sendiri. Contoh kongkrit dalam hal ini adalah pemahaman terhadap ayat al-Qur'an atau hadis tentang harta kena zakat.
- c. Sedapat mungkin diupayakan agar keputusan Lajnah Bahtsul Masail terurai, argumentatif dan berwawasan empat mazhab, sehingga dapat membuka cakrawala keberagaman warga *Nahdiyyin*. Juga diusahakan agar hasil-hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail itu dibukukan, disebarluaskan dan disosialisasikan kepada semua warga *Nahdiyyin*, agar mereka mengetahui, memahami dan mematuhi, sehingga keberadaan Lajnah Bahtsul Masail tetap signifikan.

d. Perlu diadakan peninjauan ulang terhadap beberapa hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail yang disinyalir tidak valid agar kewibawaan Lajnah Bahtsul Masail tetap terjaga. Karena itu kaidah keberagaman dan kemasyarakatan NU yang populer dengan: *المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلاح* hendaknya difahami dan benar-benar dilaksanakan, baik dalam wacana ilmiah maupun amaliah. Bahkan bila dipandang perlu, kaidah tersebut dapat dimodifikasi dengan membalikinya menjadi: *الاخذ بالجديد الاصلاح والمحافظة على القديم الصالح*, agar penekanannya dapat diletakkan pada upaya pemanfaatan informasi terbaru yang lebih baik (*الاخذ بالجديد الاصلاح*), dengan tetap memperhatikan pelestarian nilai-nilai terdahulu yang dipandang baik (*المحافظة على القديم الصالح*).

DAFTAR PUSTAKA

Kitab/Buku

al-Qur'an al-Karim.

Abadiy, Abu at-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan
Abi Dawud, juz VI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Abdussalam, Izzuddin bin, *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām*, juz II (Beirut: Dar al-
Jil, tt.

Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa, *al-Jami'aṣ-Ṣaḥiḥ wahuwa Sunan at-Tirmiziy*, juz III. Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.

al-Afghanistāniy, Sayyid Muhammad Musa "Twnānā", *al-Ijtihād wa Madā Hājātinā Ilāih fi
Hāzā al-'Aṣr*. Kairo: al-Madany, 1973.

al-Alūsiy, Syihabuddin, *Rūh al-Ma'āny*, Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

al-Āmidiy, Saifuddin Abi al-Hasan, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, Juz III. tt.: Dar al-Fikr,
1981.

Amin, Muhammad, *Hasyiyah Radd al-Muhtār*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Jatayu Sala, 1985.

Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam*, ter. Yudian W. Asmin et.al. Yogyakarta: LPMI dan
Pustaka Pelajar, 1996.

al-'Asqalāniy, Ibn Hajar, *Fath al-Bāry*, Juz II, III, IV, V, XI, XII, dan XV. Beirut : Dar al-
Fikr, 1996.

Asy'ari, KHM. Hasyim, *Qanun Asasi NU*. Kudus : Menara Kudus, 1971.

Awwamah, Muhammad, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab*, ter. A. Zarkasyi Chumaidy.
Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Azizy, Ahmad Qodri A., *Islam dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Azra, Azyumardi, *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*. Jakarta: Paramadina, 1996.

Ba'alawiy, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, *Bughyah al-Mustarsyidin*. Beirut:
Dar al-Fikr, 1995.

al-Baghdādiy, Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim, *Lubāb at-Ta'wīl fi Ma'āni
at-Tanzīl*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

Bagir, Haidar dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.

al-Bahutiy, Mansur bin Yunus bin Idris, *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Juz II.
Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

- al-Bahiy, Muhammad, *ad-Dīn wa ad-Daulah min Taujihāt al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1971.
- , *Ra'yu ad-Dīn baina as-Sā'il wa al-Mujīb*, Juz II. Kairo: Maktabah Wahbah, 1979.
- al-Baidāwiy, Nasiruddin Abdullah bin Umar bin Muhammad, *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl*, Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Baihaqi, Imam (ed.), *Kontroversi Aswaja*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- al-Bakriy, Abu Bakr Usman bi Muhammad Syattā, *Ḥasyiyah I'ānah at-Ṭalibīn*, juz II dan III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Baisūniy, Ibrahim, *Nasy'ah at-Taṣawwuf al-Islāmiy*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1969.
- al-Bājūriy, Ibrahim, *Ḥasyiyah al-Bājūriy 'alā Faḥ al-Qarīb*, juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- al-Barsany, Noer Iskandar, *Aktualisasi Ahlussunah Waljamaah*. Malang: Program Pascasarjana UNISMA dan PP Al-Hidayah, 1999.
- Ba'syan, Sa'id bin Muhammad, *Busyrā al-Karīm bisyarḥ Masā'il at-Ta'īm*, juz II. Aden: as-Saqāfah, tt.
- Bayanuniy, M.A., *Memahami Hakekat Hukum Islam*, ter. Ali Mustafa Yaqub. Jakarta: Pustaka Azet, 1986.
- Bik, Muhammad Khudariy, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmiy*. ttp.: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1967.
- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1999.
- , *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- al-Bujairimiy, Sulaiman, *Bujairimiy 'alā al-Khaṭīb*, Juz II. Mesir: Mustafa al-Bābiy al-Halabi, 1951.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, II, dan VI. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1999.
- Dawud, Abu, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II dan III. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Departemen Agama Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, tt.
- Departemen Perhubungan Badan Meteorologi Dan Geofisika, *Garis ketinggian Hilal 0° Pada Awal Bulan Qamariyah Tahun 1420/1421 H (2000)*. Jakarta: Departemen Perhubungan Badan Meteorologi Dan Geofisika, 1999.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Feillard, Andrée, *NU vis-à-vis Negara*, ter. Lesmana. Yogyakarta: LKiS, 1999.

- al-Ghazālīy, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- al-Ḥadīd, Ibn Abi, *Syarh Nahj al-Balaḡhah*. ttp.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah, 1959.
- Haidar, M. Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayān*. Jakarta: Sa'adiyah Putera, tt..
- Halim, Abdul, *Sejarah Perjuangan Kyai Haji Abdul Wahab*. Bandung: Penerbit Baru, 1970.
- Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad (CD-ROM Mausū'at al-Ḥadīs asy-Syarīf*, Sakhr Software Co. 1995-1997).
- Hasan, Husain Hamid, *Nazariyyāt al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmiy*. Beirut: Dār an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hasballah, Muhammad Ali, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmiy*. Beirut: Dār al-Fikr, tt..
- Hawari, Dadang, *al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Ibnu Hamam, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin, *Ḥāsiyyah Radd al-Muḥtār*, Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ismail, Sya'ban Muhammad, *at-Tasyrī' al-Islāmiy*. Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1985.
- al-Jamal, Sulaiman, *Ḥāsiyyah asy-Syaikh Sulaimān al-Jamal 'alā Syarḥ al-Minhāj*, juz III. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- , *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, ter. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri. Bandung: Mizan, 1996.
- , *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kualalumpur : Pelanduk Publication, 1989.
- Karārah, 'Abbas, *ad-Dīn wa az-Zakāh*. Mesir : Syirkah Fann at-Tibā'ah, 1956.
- Kendal, Ahmad Abdul Hamid (ed.), *Putusan Kongres Jam'iyah NU Kaping 12*. Kudus: T.B.S. Koedoes, 1938.
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo : Dār al-Qalam, 1978.
- , *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmiy fī mā lā Naṣṣa fih*. ttp.: Dār al-Qalam, 1970.

- al-Khatīb, Muhammad Syarbīny, *Mughny al-Muhtāj*, Juz I. Mesir: Mustafa al-Bāby al-Halaby, 1958.
- al-Khin, Mustafa Sa'īd, *Asar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1972.
- Kudus, Abdul Djalil Khamid, *Ahkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahdatul 'Ulamā'*, *Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah dalam Muktamar NU*, juz I dan II. Semarang: Toha Putra, tt.
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- , *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- , *Aslam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Madkūr, Muhammad Salam, *al-Ijtihād fi at-Tasyrī' al-Islāmiy*. ttp.: Dār an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1984.
- al-Maghribiy, Abdur Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Kairo: al-Azhariyyah, 1930.
- al-Mahalliy, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *Syarḥ al-Waraqāt fi Uṣūl al-Fiqh li Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah al-Juwainiy*, dalam *Hamisy Irsyād al-Fuḥūl*. Beirut: Dār al-Fikr, tt..
- Mahfudz, KH.MA. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*. Juz I. Mesir: Isa al-Babiy al-Halabiy, tt..
- Makdisi, George, "The Sunni Revival", dalam *Islamic Civilization 950-1150 (Papers on Islamic History III)*, ed. D.H. Richards. Oxford: Cassier -The Near East Center University of Pannsylvania, 1973.
- Ma'mūn, Syekh Hasan, *al-Fatāwā*, Juz I. Kairo: Dār at-Taḥrīr, 1969.
- Ma'shum, Saifullah (ed.), *Karisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan, 1998.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- al-Maududy, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, ter. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1995.
- Masyhuri, KHA. Aziz, *Masalah Keagamaan NU*. Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997.
- al-Mawardiyy, Ali bin Muhammad Habib, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyat ad-Dīniyyah*. Kairo: Dār al-Fikr, 1983.
- al-Mubarkafūriyy, Abi al-'Ulā Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfah al-Ahwāziyy bi Syarḥ Jāmi' at-Tirmīziy*, Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

- Muchtar, Maksum, *Transformasi Pendidikan Islam dalam Pesantren Masa Depan*. Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975 - 1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- , *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muthahhari, Murtadha, *Falsafah Akhlaq*, ter. Faruq bin Diya' . Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- , *Islam dan Tantangan Zaman*, ter. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- , *Manusia dan Agama*, ter. Haidar Bagir. Bandung: Mizan, 1992.
- an-Nabhāniy, Taqiyuddin, *Nizām al-Islām*. Damaskus: Hizb at-Tahrīr, tt.
- Najib, Mahmud Ahmad, *at-Ṭibb al-Islāmīy, Syifa' bi al-Hady al-Qur'āny*. Kairo: Dār at-Taufiq an-Namūzajīyyah, 1982.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Islam Tradisi Di Tengah Kancah Dunia Modern*, ter. Lukman Hakim. Bandung: Pustaka, 1994.
- et.al. (ed.), *Shi'ism, Doctrines, Thought, and Spirituality*. New York: State University of New York Press, 1988.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- an-Nawawiy, Abu Zakariya Yahya bin Syarf, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhāzzab*, Juz I, VI dan VIII. ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabiy, tt.
- an-Nīsābūriy, Muslim bin al-Ḥajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- PWNU (Pengurus Wilayah NU) Jawa Timur, *Khitthah NU*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, tt.
- al-Qalyūbiy, Syihabuddin dan Syihabuddin 'Umairah, *Hasyiyatā al-Qalyūbiy wa 'Umairah 'alā Minhāj at-Ṭalībīn*, juz III. Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyyah, tt.
- al-Qardāwiyy, Yusuf, *al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmīyyah*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1985.
- , *Fiqh az-Zakāh*, Jilid I. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1994.
- Qudāmah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin, *al-Mughny*, Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- al-Qurtubiy, Muhammad bin Ahmad, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, juz V (Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabiy, 1967).

- Radhi, Syarif, *Puncak Kefasihan Nahjul Balāghah*, ter. Muhammad Hasyim Assagaf. Jakarta: Lentera, 1997.
- Rahman, Abdul Hakim Abdur, *Mabāḥiṣ al-'Illah fi al-Qiyās 'Inda al-Uṣūliyyīn*. Beirut: Dār al-Basyar al-Islāmiyyah, 1986.
- Rahman, Budi Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of The Qur'an*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1989.
- Rahmat, Jalaluddin, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- , *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1997.
- Ridwan, Kafrawi et al. (ed.), *Ensiklopedi Islam*, jilid V. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid I. Semarang: Toha Putera, tt.
- aṣ-Ṣan'āniy, Muhammad bin Isma'il, *Subul as-Salām*, Juz II dan IV. Bandung: Dahlan, tt.
- aṣ-Ṣāwiy, Ahmad bin Muhammad al-Mālikiy, *Bulghah as-Sālik li Aqrab al-Masālik*, Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- , *Hasyiyah aṣ-Ṣāwiy 'alā Tafsīr al-Jalālain*, juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- ash-Shadr, Muhammad Baqir, *Sejarah Dalam Perspektif al-Qur'an Sebuah Analisis*, ter. M.S. Nasrulloh. Bandung: Pustaka Hidayah, 1993.
- Shiddiq, KH. Mahfudz, *Khiṭṭah Nahḍiyyah*. Surabaya: Balai Buku, 1980.
- Shihab, M. Quraisy, *Membumikan al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1996.
- Siradj, Saïd Aqiel, *Ahlusunnah wal Jamaah dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Sjadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- as-Subkiy, Tajuddin bin Abdul Wahab, *Jam'u al-Jawāmi'*, Juz II. ttp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.
- as-Suyūṭiy, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furū'*. ttp.: Dār al-Fikr, tt.
- , *ar-Radd 'alā Man Akhlada ilā al-Arḍ wa Jahala anna al-Ijtihāda fi Kull 'Aṣr Fard*. ttp. : Mu'assasah asy-Syabāb, tt.
- asy-Syāfi'iy, Muhammad bin 'Alān, *Daḥīl al-Fāliḥīn li Turuq Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn*, juz VIII. Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabiy, tt.

- Syaltūt, Mahmud, *al-Fatāwā*. Kairo: Dār al-Qalam, tt.
- , *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- asy-Syairāzīy, Ibrahim bin Ali, *al-Muhazzab*, Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- asy-Sya'rāwīy, Muhammad Mutawally, *al-Fatāwā*, Juz IX. Beirut: Dār al-Qalam, 1982.
- asy-Syarbīnīy, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khaṭīb, *al-Iqnā' fi Ḥall Alfāz Abī Syujā'*, juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- , *Mughny al-Muḥtāj*, Juz I. Mesir: Muṣṭafa al-Bābiy al-Halabiy, 1958.
- asy-Syarwānīy, Abdul Hamid, *Ḥawāsyiy asy-Syarwānīy*, Juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- asy-Syātībīy, Abi Ishaq Ibrahim, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, Juz II dan III. ttp.: Dār al-Fikr, tt.
- asy-Syaukānīy, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyād al-Fuḥūl*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- , *Nail al-Auṭār*, Juz IV. Kairo : Muṣṭafā al-Bāby, 1971.
- asy-Syirbāsiy, Ahmad, *al-Aimmah al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Jīl, tt.
- Syuriyah NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā'*, 2. Surabaya: PWN Jawa Timur, 1994.
- Tabātabā'iy, Sayyid Muhammad Husain, *al-Mīzān fi Tafsīr al-Qur'ān*, Juz IV. Beirut: Muassasah al-'Alamiy li al-Maṭbu'at, 1991.
- 'Uways, Abdul Halim, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, ter. A. Zarkasyi Chumaidy. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Wahid, Kamaluddin Muhammad bin Abdul, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Yatim, Badri, *Historiografi Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Tarīkh al-Māzāhib al-Fiqhiyyah*. Kairo: al-Madaniy, tt.
- , *Uṣūl al-Fiqh*. ttp. : Dār al-Fikr al-'Araby, tt.
- Zaidan, Abdul Karim, *Majmū'ah Buhūs Fiqhiyyah*. Baghdad: Maktabah al-Quds, 1975.
- , *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1994.
- az-Zarnūjiy, asy-Syaikh, *Ta'īm al-Muta'allim*. Surabaya : al-Hidayah, tt.
- Zein, A. Helmy Faishal dan Nurhakim (ed.), *Dinamika Kaum Muda*. Jakarta: PP IPNU, 1997.
- az-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz I, II, III dan VIII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

-----, *at-Tafsir al-Munir*, Juz V dan XV. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1991.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.

Zuhdi, M. Nazim et al. (ed.), *Tarekat, Pesantren dan Budaya Lokal*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 1999.

Zuhri, KH. Saifuddin, KH. Abdul Wahab Hasbullah, *Bapak dan Pendiri NU*. Jakarta: Yamunu, 1972.

Disertasi/Tesis

Asyri, Zul, "NU, Studi tentang Faham Keagamaan dan Upaya Pelestariannya melalui Lembaga Pendidikan Pesantren," (Disertasi Doktor, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990).

Basid, Abd., "Bahth al-Masa'il Dan Wacana Pemikiran Fiqh, Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama Tahun 1985-1995 (Tesis MA., IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999).

Ida, Laode, "Dinamika Internal Nahdlatul Ulama setelah Kembali ke Khittah 1926," (Tesis MA., Universitas Indonesia, Jakarta, 1995).

Ka'bah, Rifyal, "Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama Sebagai Keputusan *Ijtihad Jama'i* di Indonesia," (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998).

Kholidah, "Metode Ijtihad Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah Periode 1988-1998," (Tesis MA., IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000).

Mochtar, Hilmy, "Dinamika Nahdlatul Ulama, Suatu Studi tentang Elite Kekuasaan Politik Islam di Jombang Jawa Timur," (Tesis MA., Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989).

Muchtar, M. Nadjid, "Konsep Ulama dalam Islam dan Pemikiran tentang Kedudukannya dalam Lingkungan Nahdlatul Ulama," (Tesis MA., IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1988).

Naim, Muchtar, "The Nahdlatul Ulama Party / 1952-1955," (Tesis MA., Mc.Gill University, Montreal, 1960).

Radino, "Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama," (Tesis MA., IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1997).

Sonhadji, Musthofa, "Nahdlatul Ulama Organisasi Sosial Keagamaan tahun 1926 - 1952," (Tesis MA., IAIN Sunan Kalijaga, 1987).

Yahya, Imam, "Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Transformasi Sosial: Telaah Istinbath Hukum Pasca Munas Banda Lampung 1992," (Tesis MA., IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998).

Dokumen/Makalah

- Abbas, Hasjim, "Jeddah Sebagai Miqat Bagi Jamaah Haji Indonesia Gelombang II". Makalah, Halaqah Nasional Pembinaan Kehidupan Keagamaan di Indonesia, Denanyar-Jombang, 2000.
- Hamim Sjahid, *Riwayat Taswirul Afkar*, naskah pidato peringatan 50 tahun, Surabaya, 1968.
- H.B.N.O. (Hoofd Bestuur Nahdloetoel 'Oelama'), *Poetoesan Congres Nahdloetoel 'Oelama' ka 10 di Solo, Soerakarta*. ttp. : H.B.N.O., 1935.
- , *Verslag-Congres Nahdloetoel-'Oelama' Jang ke-XIII*. Soerabaia: H.B.N.O., 1938.
- , *Verslag-Congres Nahdloetoel-'Oelama' Jang ke-14*. Soerabaia: H.B.N.O., 1939.
- , *Verslag-Congres Nahdloetoel-'Oelama' Jang ke-15*. Ttp.: H.B.N.O., 1940.
- LAKPESDAM, *Jawaban-Jawaban Masail Yang Telah Diputuskan Dalam Mu'tamar ke 20 di Surabaya*. Jakarta: LAKPESDAM, tt.
- LAKPESDAM, *Keputusan Mu'tamar NU ke 25 di Surabaya*. Jakarta: LAKPESDAM, tt.
- "Mudzakarah Pengembangan *Ulum ad-Diniyyah* melalui Telaah Kitab Secara Kontekstual" di PP. Watucongol, Muntilan, Magelang, 15-17 Desember 1988.
- Panitia Musyawarah Nasional Alim Ulama NU, *Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, 18-21 Desember 1983*. Jakarta: Panitia Musyawarah Nasional Alim Ulama NU, 1984.
- Panitia Penyelenggara Munas dan Konbes NU, *Keputusan Munas Alim Ulama NU, 15-17 Nopember 1987 M*. Jakarta : Panitia Penyelenggara Munas dan Konbes NU, tt.
- Panitia Muktamar ke XXX, *Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Muktamar ke XXX NU*. Dokumen Muktamar dan belum diterbitkan.
- Pengurus Besar NU, *Hasil-Hasil Muktamar NU ke-28*. Jakarta : PBNU, tt.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Keputusan Muktamar NU ke-XXVI*. Jakarta : PBNU, tt.
- Sekretariat Jendral PBNU, *Materi Ahkam/Masail Diniyah Muktamar ke-29 NU*. Jakarta : Setjen. PBNU, tt.
- , *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, 17-21 Nopember 1997 M*. Jakarta: Setjen PBNU dan Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 1998.
- Siradj, Said Aqiel, "Reinterpretasi Aswaja Menuju Pemantapan Khittah '26". Makalah, Simposium Aswaja, PB PMII, 1996.
- Tjabang Nahdloetoel Oelama' Banjoemas, *Poetoesan-Poetoesan Moe'tamar ka 16*. Soekaradja : Tjabang Nahdloetoel Oelama' Banjoemas, tt.

Jurnal/Majalah/Surat Kabar

Aula, edisi Maret 1997.

Berita Nahdloel Oelama, nomor 18-19, th. V, Agustus 1936 (Masail Dinijah di Kongres ke XI).

Jawa Pos, edisi 27 Januari 1998.

-----, edisi 25 Desember 1998.

-----, edisi 29 Desember 1998.

-----, edisi 11 Januari 1999.

-----, edisi 23 Juli 1999.

-----, edisi 18 Desember 1999.

-----, edisi 5 Februari 2000.

-----, edisi 26 Juni 2000.

-----, edisi 22 Oktober 2000.

-----, edisi 28 Nopember 2000.

-----, edisi 3 Desember 2000.

-----, edisi 7 Desember 2000.

-----, edisi 9 Desember 2000.

-----, edisi 14 Desember 2000.

-----, edisi 17 Desember 2000.

-----, edisi 18 Desember 2000.

-----, edisi 20 Desember 2000.

-----, edisi 1 Januari 2001.

-----, edisi 8 Maret 2001.

Jurnal Studi Islam Al-Hikmah, edisi 2, Dzulhijjah 1410-Rabiul Awwal 1411/Juli-Oktober 1990.

-----, edisi 5, Ramadhan-Dzulqad'ah 1412/Maret-Juni 1992.

-----, edisi 10, Muharram-Rabiul Awwal 1414/Juli-September 1993.

-----, edisi 11, Rabiul Tsani-Rajab 1414/Oktober-Desember 1993.

-----, edisi 13, Dzulqad'ah 1414-Muharram 1415/April-Juni 1994.

-----, edisi 17, volume VII/tahun 1996.

Oetoesan Nahdloel 'Oelama', nomor 3, th. I, Romadlon 1347 H (Poetoesan-Poetoesan
Congres Nahdloel Oelama ke I).

Republika, edisi 15 Februari 1998.

Soeara Nahdloel 'Oelama', nomor 3, th. II, Rabi'ul Awal 1347 H (Hasil Kongres NO ke
III).

-----, nomor 10, th. II, Syawal 1347 H Hasil Kongres NO ke IV).

-----, nomor 4, th. III, Rabi'ul Akhir 1348 H (Hasil Kongres NO ke V).

-----, nomor 7, th. III, Rajab 1348 H (Hasil Kongres NO ke VI).

-----, nomor 11 th. III, Dzulqa'dah 1348 H (Hasil Kongres NO ke VII).

Santri, nomor 03, th. I, 1990.

Tashwirul Afkar, edisi no. 1/Mei-Juni 1997.

Warta NU, nomor 37, th. VII, Maret, 1991.

Wawancara

Wawancara dengan KHA: Aziz Masyhuri, ketua Lajnah Bahtsul Masail, pada tanggal 21
Maret 1998, tanggal 19 Januari 2000 dan tanggal 3 Maret 2001.

Wawancara dengan Muhammad Hanif, Pejabat Kementerian Pendidikan Pakistan, pada
tanggal 12-10-1999.

Wawancara dengan Mohamed Chitatou, Staf Ahli ISESCO (The Islamic Scientific,
Educational and Cultural Organization) yang berkedudukan di Rabath-Maroko, pada
tanggal 12-10-1999.

Wawancara dengan Abdullah Endut, Pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia, pada
tanggal 13-10-1999.

Wawancara dengan as-Sayyid Muhammad Kamranian, pejabat Kementerian Pendidikan
Iran, pada tanggal 14-10-1999.

Wawancara dengan Khandakar Abu Nasr Abdullah, Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas
Islam Negeri Banglades, pada tanggal 14-10-1999.

Wawancara dengan KH Musta'in Syafi'i, salah seorang Pengasuh Pondok Pesantren
Tebuireng Jombang, pada tanggal 18 Nopember 1999.

Wawancara dengan KH. Hasjim Abbas, anggota Lajnah Bahtsul Masail, pada tanggal 19
Januari 2000.

Wawancara dengan M. Nawawi, salah seorang pemangku Pondok Pesantren Qomaruddin,
Bungah, Gresik, pada tanggal 6 Februari 2001.

تلخيص

هذه الرسالة تحت عنوان : لجنة بحث المسائل الدينية التابعة لجمعية نهضة العلماء: 1926 - 1999 (دراسة نقدية على المقررات الفقهية)، تركز على محاولة الاجابة عن أهم التساؤلات هي :

1. ماهو المراد بالكتب المعتمدة التي ترجع اليها اللجنة عند استنباط الاحكام الفقهية ؟

2. ماهى الطريقة المستخدمة فى استنباط الاحكام الفقهية ؟

3. كيف صحة المقررات الفقهية التي أصدرتها اللجنة ؟

من فوائد هذا البحث فى المجال النظرى هى الاسهام الفكرى فى الفقه الاسلامى، وفى المجال العملى هى افادة المعلومات لتضعها اللجنة فى عين الاعتبار عند اجراء التقويم.

هذه الرسالة تتحصر فى بحثها على المقررات الفقهية التي أصدرتها لجنة بحث المسائل الدينية على المستوى القومى منذ السنة الاولى (1926) الى السنة الاخيرة (1999) وتتركز على المسائل الدينية الواقعية.

ان المدخل التاريخى والاصولى (أصول الفقه) هما المستخدمان فى هذه الرسالة. أماطريقة جمع البيانات (مكتوبة كانت أو غير مكتوبة) فباطلاع الوثائق والمشاهدات والمقابلات. واستخدم الكاتب طريقة التحليل الكمية والكيفية بالاستنتاج والاستدلال والمقارنة والنقد.

ويعد البحث والاستقراء وجد الكاتب الأجوبة التالية :

1. ان المراد بالكتب المعتمدة عند الجمعية هي الكتب على المذاهب الاربعة. ويتغير هذا المعنى الى معنى اوسع بان المراد بها هي الكتب الاسلامية التي تتناسب وعقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن هذا التعريف مشكوك فيه بعد ظهور المتطلبات التي تريد تجديد معنى أهل السنة والجماعة في حد ذاتها. من حيث استعمال الكتب تميل اللجنة الى الكتب الشافعية أكثر من استعمالها كتب المذاهب الثلاثة الباقية.

2. ان طريقة استنباط الاحكام الفقهية التي استخدمتها اللجنة استخداما مرتبا هي الطريقة القولية (الرجوع المباشر الى نصوص الكتب) ثم الطريقة اللاحاقية (قياس المسائل الجديدة بالمسائل القديمة المنصوصة في الكتب المعتمدة) ثم الطريقة المنهجية (تتابع واتباع مناهج الأئمة الاربعة). ولذلك فان مدخل الاجتهاد لهذه اللجنة هو المدخل المذهبي مع استعمال اسلوب "الأسئلة والأجوبة والمناقشة". وفي تطبيق الطريقة وجد الباحث اللجنة أنها تركزت على الشافعية، وفي بعض مقرراتها تستدل بالقران الكريم أو الحديث الشريف مباشرة، أو لا تستدل بأى دليل.

3. من بين 428 مقرة فقهية وجد الكاتب ست مقررات غير صحيحة باعبار أنها غير مناسبة بالايات القرانية أو الاحاديث الشريفة أو مقاصد الشريعة أو القواعد الفقهية. وتلك المقررات هي : جواز استخدام الفرقة أو الطرطقة، وكراهة (بل وحرمة) البنطالون والكرافطة والحذاء والبرنيطة، وحرمة تشريح الجثث لحاجة طبية، وعدم جواز تنويع الاموال الزكاوية المنصوصة، وجواز اسقاط الصلوات المتروكة عن الموتى بالفدية، وعدم جواز أخذ مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ميقاتا مكانيا للحجاج. ووجد بعض المقررات نسختها اللجنة منها جواز: فائدة البنك وتنظيم النسل وتأمين النفس ووصل أعضاء الجسم من شخص لآخر. وهناك مقررات فقهية لا

يطيعها أعضاء الجمعية فريدة كانت أو مؤسسية وذلك ما يتعلق بمنع مباشرة الاستئلال بالقران الكريم والحديث النبوى الشريف ، وعدم جواز تعليم الرجال للنساء الا بشروط شديدة، وحرمة بيع الأرز قبل حصاده، وعقد المضاربة فى الاضام بأخذ المولود منها، ووجوب اطلاق سراح الحيوانات الوحشية التى يملكها الشخص عند الأحرام للحج أو العمرة، وفساد عقد زراعة القصب السكرى المكثفة التى تنأتى من قبل السلطة الحاكمة تجاه أصحاب الاراضى.

ختاماً لهذه الرسالة قدم الكاتب التوصيات النظرية المتعلقة باجراء البحوث فى لجان الفتاوى التابعة لجمعيات اسلامية أخرى ودراسة المقارنة بينها و البحوث اللاحقة فى لجنة بحث المسائل التابعة لجمعية نهضة العلماء. وكذلك التوصيات العملية المتعلقة بلزوم التعريف الجامع والمنايع للكتب المعتمدة المستخدمة فى لجنة بحث المسائل الدينية، والحاجة الماسة الى تطبيق الطريقة المنهجية لحل المشكلات الفقهية المعاصرة، وضرورة اعادة النظر الى المقررات الفقهية التى ظنها الكاتب انها غير صحيحة.

تحريره بسيدوارجا : 29 يناير 2000 (الساعة 14.30 ظهره)
الفقير الى رحمة الله :

أحمد زهرا

ABSTRACT

Title of this dissertation : “*Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama: 1926 -1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh)*” or : “The Nahdlatul Ulama’s Legal Forum in Contemporary Religious Issues : 1926 -1999 (A Critical Analysis on the Islamic Legal Decisions)” focuses on three main problems:

1. The meaning of *al-kutub al-mu’tabarah* (the authoritative references), the prime references of the *Bahtsul Masail* commission to handle all religious issues that *Nahdiyyin* (NU followers) face.
2. The *Bahtsul Masail* commission method to handle all religious issues.
3. The validity of the Islamic Legal products of the *Bahtsul Masail* commission, particularly if referred to the Qur’an, the Sunnah, *maqāsid ash-sharī’ah* and *qawā’id fihiyyah*.

This research theoretically contributes to the Islamic Legal thought and practically gives a contribution to the *Bahtsul Masail* commission as an evaluation consideration.

This research is limited to the Islamic Legal domain that has been decided by the *Bahtsul Masail* commission at national level from *Muktamar I* in 1926 to *Muktamar XXX* in 1999.

Viewing religion as a cultural paradigm, this research uses historical and *uṣūl fiqh* (Islamic legal theory) approaches. Meanwhile, the data of this research are gathered using documentary, observation and interviewing methods, and analyzed by quantitative and qualitative methods using comparative, reflective and critical thinking.

This research answers the three main problems mentioned above as follows :

1. The *Bahtsul Masail* commission defines *al-kutub al-mu’tabarah* as the reference books based on the four schools (Hanafite, Malikite, Shafiite and Hanbalite). This formulation is extended and made clear to those are based on *ahlussunnah waljama’ah (aswaja)*

doctrines. But such formulation is now disputed after the demand of *aswaja* redefinition surfaced. Meanwhile, the *Bahtsul Masail* commission refers to the references of Shafiite school more than three others.

2. The method and procedure used by the *Bahtsul Masail* commission to handle all religious issues are chronologically : *qauly* method (refers to a reference text directly), *ilhāqy* method (analogizes a new issue to the old one found at a reference text), and *manhajy* method (pursues the four mazhab methodologies). All of these methods are applied by *mazhaby* approach with question-answer and discussion techniques. The *Bahtsul Masail* commission tends to Shafiite opinions more than three others, refers directly to the Qur'an and the Sunnah, and decides some issues without any references.
3. With regards to the *Bahtsul Masail* commission of Islamic Legal products there are at least six invalid decisions i.e : the admission of firecrackers; the forbidden of trousers, necktie, shoes and hat; the prohibition of injecting corpse for medical purpose; the prohibition of developping the kinds of *zakat* properties; the allowance of redemption of the missing *salat*; and the invalidity of Jiddah as a place for starting *hajj* or '*umrah*. In addition there are at least three decisions that are abolished by the new *Bahtsul Masail* commission i.e : the permission of family planning, life insurance and transplantation of human organ. There are also found the domination of the Shafiite school; direct refering to the Qu'ran or the Sunnah; and the disobedience to several Islamic Legal decisions, such as the buying rice before harvest time, the obligatory to release cattle while performing *hajj* or '*umrah*, the sharing profit of baby goat, the strict regulation of inter-gender in educational process, and the invalidity of contract of sugar cain plantation.

Finally this dissertation recommends the *Bahtsul Masail* commission to distinctly define *al-kutub al-mu'tabarah*, to apply *manhajy* method, to produce an applied Islamic Law and to evaluate the invalid Islamic Legal products.

Sidoarjo, January 31, 2000 (22.50 pm)

the author,

Ahmad Zahro

LAMPIRAN III :

RIWAYAT HIDUP PENULIS

IDENTITAS DIRI DAN KELUARGA

N a m a : Ahmad Zahro

Kelahiran : Nganjuk, 7 Juni 1955

A y a h : Imam Sardjuni (74 tahun)

I b u : Siti Aminatun (66 tahun)

Saudara : 1. Muzayyin, 19 Januari 1953,
2. Ahmad Zahro, 7 Juni 1955,
3. Moh. Shodiq, 5 Oktober 1959,
4. Siti Umi Durriyatin, Juli 1962,
5. M. Asymuni, September 1965,
6. Siti Shobiyatul. Hani'ah, 21 Oktober 1968,
7. Ainur Rofiq al-Amin, 25 Juni 1972,
- 8. Irham Zacky, 1 Agustus 1975.

Isteri : Fariyal Naftalin, 10 Juni 1970.

Anak : 1. M. Afthoni Adyatama, 15 Juni 1989,
2. M. Haiba 'Abqary, 30 Juni 1992,
3. M. Fakkar Muttaqy, 7 Juni 1995,
4. M. Ishlah Balady, 20 Mei 1998,
5. M. Adzkiya' Alfaini, 24 Oktober 2000.

Alamat : Jalan Jatisari Besar 71 C Pepelegi, Waru, Sidoarjo
Telp. (031) 8536807 / 08123548581

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Jabatan : Lektor Kepala Madya (IV/b) dalam matakuliah Fiqih dan Pembantu
Dekan III di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-
sekarang).

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Pesantren Diniyah "an-Nur" (sore dan malam) di Tuko, Sugihwaras, Prambon, Nganjuk (1961-1975).
2. SDN (Sekolah Dasar Negeri) di Watudandang, Prambon, Nganjuk (1966-1969).
3. MTsAIN (Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri) di Prambon, Nganjuk (1969-1972).
4. PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) 4 tahun di Mrican, Kediri (1972-1973).
5. MAAIN (Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri) di Kertosono, Nganjuk (1973).
6. PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) 6 tahun di Kediri (1973-1975).
7. Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Tulungagung (1975-1979).
8. Menghafal al-Qur'an di Pondok Pesantren Putera "al-Fattah" Mangunsari Tulungagung (1976-1979).
9. Sarjana Lengkap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang (1979-1983).
10. Fakultas Adab Universitas al-Azhar (pagi) di Cairo, Mesir (1984-1985).
11. Takhaṣṣuṣ Tafsir Ahkām pada Majma' al-Buḥūt al-Islāmiyyah al-Azhar (sore) di Cairo, Mesir (1984-1985).
12. Diploma 'Alīy pada Ma'had al-Khurtūm ad-Dauly li al-Lughah al-'Arabiyyah di Khartoum, Sudan (1985-1986).
13. Magister pada Ma'had al-Khurtūm ad-Dauly li al-Lughah al-'Arabiyyah di Khartoum, Sudan (1986-1987).
14. Kursus Bahasa Inggris TOEFL di IIA (Lembaga Indonesia Amerika, sekarang PPIA = Pusat Persahabatan Indonesia Amerika) Surabaya (1989).
15. Program Doktor pada PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994-2001).

Perlu dijelaskan mengapa dalam studi pașcasarjana (S3) ini penulis mengambil disiplin ilmu fiqih / hukum Islam padahal latar belakang pendidikan penulis heterogen. Hal ini disebabkan beberapa faktor:

1. Sejak di pesantren diniyah sebagian besar waktu penulis gunakan untuk mengaji kitab-kitab fiqih

2. Penulis amat tertarik dan menekuni bidang studi fiqih ketika menempuh pendidikan menengah pertama/atas, sehingga nilai fiqih selalu berada di atas rata-rata
3. Begitu juga saat penulis menempuh program sarjana muda pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Tulungagung, nilai fiqihlah yang tertinggi, yaitu 10 (sepuluh) satu-satunya nilai yang pernah ada di Fakultas tersebut.
4. Demikian pula tatkala penulis menempuh program sarjana lengkap pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang nilai tertinggi juga fiqih (tepatnya masāil fiqhiyyah), yaitu 7,5 (tujuh setengah) suatu nilai yang saat itu amat sulit diperoleh, apalagi dari Prof. H. Masyfuk Zuhdi (alm.) pengampu matakuliah tersebut.
5. Pada saat berada di Mesir penulis tetap tertarik pada bidang fiqih, sehingga kalau pagi mengikuti kuliah di Fakultas Adab Universitas al-Azhar (untuk mencari ilmu alat), maka sorenya mengikuti Takhaṣṣuṣ Tafsir Ahkām (spesialisasi tafsir ayat-ayat hukum) pada Majma' al-Buḥūt al-Islāmiyyah di al-Azhar (untuk mencari bahan baku).
6. Di antara kitab-kitab yang penulis koleksi, sebagian terbesar adalah kitab-kitab fiqih dan uṣūl fiqih, di samping tafsir dan hadis.

Oleh karena itu, dibanding ilmu pendidikan dan bahasa Arab (yang secara formal melatar belakangi pendidikan tinggi penulis), penulis merasa lebih memiliki potensi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu fiqih, dan karenanya pula matakuliah wajib bagi penulis di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah (juga) Fiqih.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Umum OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) MTsAIN di Prambon, Nganjuk (1971-1972).
2. Ketua LPM (Lembaga Perwakilan Mahasiswa) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Tulungagung (1977-1978).
3. Ketua Presidium Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Tulungagung (1978-1979).
4. Wakil Ketua LPM Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang (1980-1982).

5. Ketua Umum KOMI (Korps Mahasiswa Indonesia) Kabupaten/Kotamadya Malang (1982-1984).
6. Instruktur PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang (1983-1984).
7. Wakil Ketua PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) di Sudan (1986-1987).
8. Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Pengajar Bahasa Arab se Indonesia (1991- sekarang).
9. Ketua Umum Himpunan Alumni Timur Tengah se Jawa Timur (1992-sekarang).
10. Na'ib Ra'is Majlis 'Ilmy Pengurus Pusat Jam'iyatul Qurra' wal Huffaz (1994-sekarang).
11. Bidang Perhakiman PW. LPTQ (Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Jawa Timur (1996-sekarang).
12. Penasehat Jam'iyatul Huffadh Mahasiswa Surabaya (1997-sekarang).
13. Bidang Ta'lif wan Nasyr PWN (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jawa Timur (1998-sekarang).
14. Anggota Konsorsium Ilmu Fiqih IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-sekarang).

KARYA TULIS ILMIAH

1. طرق تدريس اللغة العربية (Surabaya : LPBA, 1996-2000) ditulis bersama Ust. HM. Ali Tsauri, Lc., adalah buku wajib di Lembaga Pengajaran Bahasa Arab Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya dan beberapa Jurusan Bahasa Arab di Lingkungan Kopertais Wilayah IV.
2. العربية الميسرة (اربعة مجلدات) (Surabaya: Bina Ilmu, 1994-1998) ditulis bersama tim, adalah buku wajib di IAIN Sunan Ampel dan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kopertais Wilayah IV.
3. Membincang Feminisme (Surabaya: Risalah Gusti, 1996-...) ditulis bersama tim, adalah buku tentang fiqih wanita.
4. Di Bawah Naungan al-Qur'an, terjemahan في ظلال القرآن للسيد قطب (Jakarta : Gema Insani Press, 2000) diterjemahkan bersama tim.

5. Partisipasi Mahasiswa Dalam Menegakkan Keadilan (Risalah BA, IAIN Sunan Ampel, Tulungagung, 1979)
6. Problema Kehidupan Mahasiswa Dalam Studi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang (Skripsi Drs., IAIN Sunan Ampel, Malang, 1983)
7. معهد الخرطوم الدولي للغة العربية (Risalah Dip., اسهام اللغة العربية فى اللغة الاندونيسية, Khartoum, 1986)
8. فى تعليم اللغة العربية فى المعاهد الاسلامية والجامعات الاسلامية باندونيسيا (دراسة مقارنة (Tesis Magister فى تعليم اللغة العربية, معهد الخرطوم الدولي للغة العربية, Khartoum, 1987).
9. Beberapa hasil penelitian, baik individual maupun kolektif, antara lain :
 - a. Kurikulum Pondok Pesantren di Jawa Timur (Penelitian Kolektif Tim Sembilan, Malang, Februari, 1984)
 - b. Analisis Kebutuhan Guru Bahasa Arab pada Madrasah Aliyah/SMA di Jawa Timur (Penelitian Kolektif Dosen Fakultas Tarbiyah Surabaya IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Desember, 1990)
 - c. Analisis Kebutuhan Pendidikan Agama Kawasan Industri di Sidoarjo (Penelitian Kolektif Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Juli, 1991)
 - d. Problema Perkuliahan dan Pengaruhnya terhadap Prestasi Studi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Surabaya IAIN Sunan Ampel (Penelitian Individual, Surabaya, Agustus, 1992)
 - e. Penelitian Pengajaran Bahasa Arab Untuk Non Arab (Penelitian Individual, Surabaya, Maret, 1993)
 - f. Sejarah Tiga Masjid Tertua di Jawa (Penelitian Kolektif Dosen IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Nopember, 1993)
 - g. Persepsi Masyarakat Pinggiran Kota terhadap Pembangunan (Kerjasama dengan PAPPEDA Jatim, Surabaya, Mei, 1994)
 - h. Bai'at Kepada Imam: Penelitian Sanad Hadis Dalam Kancah Fiqih Siyasa (Penelitian Individual, Surabaya, April, 1995)

- i. Wali Dalam Pernikahan: Penelitian Sanad Hadis Dalam Pespektif Fiqih Perempuan (Penelitian Individual, Surabaya, Juni, 1995)
 - j. Pengaruh Pendidikan Agama terhadap Perilaku Masyarakat Kawasan Paeriwisata di Pacet-Mojokerto (Penelitian Kolektif Fakultas Tarbiyah Surabaya IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Agustus, 1996)
 - k. Studi Korelasi Antara Hasil Tes Masuk Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa IAIN (Penelitian Individual, Surabaya, Juli, 1997)
 - l. Managemen Madrasah Aliyah di Kabupaten Jombang (Penelitian Kolektif Dosen Fakultas Tarbiyah UNDAR, Jombang, Nopember, 1998)
 - m. Aneka Ragam Hukum Waris di Indonesia: Studi Komparatif (Penelitian Individual, Surabaya, Desember, 1998)
 - n. Pidana Bersyarat Dalam KUHP: Studi Analisis Hukum Islam (Penelitian Individual, Surabaya, Juni, 1999)
 - o. Matla' Dalam Perspektif Hukum Fiqih Pada Era Modern (Penelitian Individual, Surabaya, Desember, 1999)
10. Beberapa makalah seminar, baik lokal, regional, maupun nasional, antara lain :
- a. Tanda Tanya, Suatu Perbandingan Islam-Kristen (Seminar Sehari di Fakultas Pertanian UNIBRAW, Malang, 1988).
 - b. Dimensi-Dimensi Da'wah Islamiyah (Seminar Sehari di Fakultas Tarbiyah UNISMA, Malang, 1988).
 - c. Paradigma Baru Pengajaran Bahasa Arab di Indonesia (Seminar Sehari di IAIN Sunan Ampel, Malang, 1989).
 - d. Format Pendidikan Islam Masa Depan (Seminar Sehari di Fakultas Tarbiyah UNDAR, Jombang, 1989).
 - e. Pendekatan Komunikatif Dalam Pengajaran Bahasa Arab (Seminar Sehari Guru-Guru Bahasa Arab di Surabaya, 1990).
 - f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku Manusia Menurut al-Qur'an (Seminar Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1991).

- g. Ijtihad dalam Kancah Pemikiran Islam Modern (Seminar Sehari Ramadhan Mubarak, Jombang, 1991).
- h. Abu Hurairah di Mata Pendukung dan Pengecamnya (Seminar Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1992).
- i. Menggagas Kurikulum IAIN (Sarasehan Nasional Alumni Luar Negeri di Lingkungan Depag RI, Jakarta, 1992).
- j. Islam di Indonesia di Mata C. Snouck Hurgroje (Seminar Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1993).
- k. Potensi Sumber Daya Muslim dalam Menyambut PJPT II (Seminar Sehari di STIT Bahrul Ulum, Jombang, 1993).
- l. Teori Pendidikan dalam al-Qur'an (Seminar Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1994).
- m. Pendidikan Islam, antara Harapan dan Tantangan (Seminar Sehari di PP Ihya'ul Ulum, Gresik, 1994).
- n. Tradisi Burhani Dalam Kancah Pemikiran Filosof Muslim (Seminar Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1995).
- o. al-Qur'an Pedoman Hidup (Pelatihan Instruktur Terjemah al-Qur'an Sistem 40 Jam Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 1995).
- p. Islam dan Wanita (Seminar Sehari di Fakultas Farmasi UNAIR, Surabaya, 1996).
- q. Mabda' Islam di Tengah Ideologi-Ideologi Sekuler (Seminar Sehari di Fakultas Ekonomi UNAIR, Surabaya, 1996).
- r. Rekonstruksi Pemikiran Islam, Tinjauan Metodologis (Seminar Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1997).
- s. Nikah Mut'ah Dulu dan Kini (Seminar Sehari di STIT Qomaruddin, Gresik, 1997).
- t. Strategi, Metodologi dan Tehnik Pembelajaran Bahasa Arab Intensif (Seminar Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1997).
- u. Fundamentalisme antara Barat dan Dunia Islam (Seminar Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998).

- v. Remaja Muslim dan Godaan Pergaulan Bebas (Seminar Sehari di UBAYA, Surabaya, 1998).
- w. Beberapa Dimensi Hifdhul Qur'an (Pembekalan Para Huffadh Jam'iyatul Huffadh Mahasiswa, Surabaya, 1998).
- x. Pemikiran Shah Wali Allah al-Dahlawy Tentang Gerakan Reformasi Islam (Seminar Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998)
- y. Tiga Senjata Perang Budaya, Narkoba-Free Sex-Bahasa (Sarasehan Kepala Madrasah se Jawa Timur, Surabaya, 1999).
- . Pendidikan Islam di Tengah Tantangan Global (Seminar Sehari Dosen Tutor D3 se Jawa Timur, Surabaya, 1999).
- aa. Masalah Dan Determinisme Historis: Kajian Uşul Fiqih dari Konsep al-Tufi dan Determinismenya Karl Marx (Seminar Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999)
- bb. Māl Zakāwy: Kajian atas Keputusan Bahtsul Masail NU Dalam Bingkai Fiqih Kontemporer (Seminar Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999)
- cc Islam dan Kebangsaan: Telaah Fiqih Siyasah (Seminar Nasional Pengembangan SDM NU Era Indonesia Baru, IKAPMII Pusat Malang, 2000)
- dd. *Miqat Makany* Jamaah Haji Dari (arah) Indonesia (*Halaqah* Nasional PP. RMI dan PWNU Jawa Timur, Denanyar-Jombang, 2000).

Sidoarjo, 29 Januari 2000 (jam 02.35)

Penulis,

Ahmad Zahro

جمل تفسیر جلالین. سورة الجن.

(٢١) صدقة على الميت بخصوص الايام كادوس كاليمبراهاني
 تباغ جوتي تلوغ دينا، ميتوغ دينا، متاغ قولوه
 دينا، ياتوس دينا، يابوو دينا. مئگاد مشهورى تباغ
 اللامقاهان مكاتين واهو بدعة مكر وها. هاناغيبغ
 كسبات ووتن كتب مطالع الدقائق مكاتين:
 قل النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواح المؤمنين
 ياتون في كل ليلة جمعة اويوم العيدين ويوم عاشوراء
 اولية نصف من شعبان ويقومون على ابواب
 بيوتهم فيقولون يا بني ويا ولدي ارحموني رحمك
 الله ترانا الى قبر ضيق ونغم طويل ثم قال الصحابة
 رضي الله عنهم: يا رسول الله يا معني ارحموني؟ فقال
 النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والصدقة حدية الى
 الموت. ويستحب ان تصدق لارواح الميت. وديلنا
 اخذا من قول عمر رضي الله عنه. الصدقة بعد
 الدفن ثوابها الى ثلاثة ايام. والصدقة في ثلاثة ايام
 يبقى ثوابها الى سبعة ايام. والصدقة يوم السابع يبقى
 ثوابها الى اربعين يوما. ومن الاربعين الى مائة.
 ومن المائة الى سنة. ومن السنة الى ايام. اه قونكا
 حديث سها اثار فونقا صحيح او ضعيف او موضوع؟
 والله اعلم. (قدس)

(المؤتمر الخامس هانراشا كن)

دينى واهو حديث. لن اثار. قوتىكا كيتا ديز ريغ ناني مانغكه
 ووتن كتب الاحاديث الصحيحة. وفيها علامة الوضع.
 والله اعلم.

(٢٢) هبع ستاجع نكاري بيايه ووتن تباغ ايسترى
 وامرات (حمل) اول مرة نيكام امراتن واهو
 سمقون فتوغ ساسي سلاجع دامل وليمة (تغكف)
 واه ميتوني. اغ غريكو ماوى سديا كذي
 (كون) ايتكالك ايارا كالا اف اغ لا واغ بعد داهاران

القول (يسير اويوه) اغدالم نجس ايقون. لن واجب
 سلة. وغيرها. متصلا بحيض قبله او منصلا. (تفوغ كيان
 حيل شاجع اتوين فيساد) بين اغكغ مدان قونىكا روفى
 (دم) سناغوسا روفى توبا كونىغ. قونىكا لاجع
 ايقون تفسين: وين بوتن نفوغ كيان حيل شاجع. حكوم
 بقون اغكغ كدوس كغ كسبات. بين فيساد كيان
 حيل شاجع لاجع حكوم ايقون حيل بشرطه. موندوت
 كتر اغانل سكيغ ككتاب منهاج التويم باب حيل. لن
 سكيغ بديغ صحيفة (٣٢) مثله ي.

(٣١) صدقة يرمى اغكغ سمقون مشهور اغ فوندى
 نكاري. مئگاد كاظاهي اهل غز بكو ساسي
 هانراشا كن ساهيني قونىكا للا مقاه. قونىكا ايقون
 ووتن اوكي ووتن اغكغ شاعكغ وانغان ماله
 شاعكغ او ووتان ارطا شاعكغ نومس كيو كادامل
 صدقاهان يوسى سها اغكغني داهاران ستاهي ووتن
 سأل يد ايقون مسجد. اغكغ قونىكا كولوغان
 قوم ساتري. سادير يغ ايقون داهار شاعكغ
 ديقون چر ييوساكن غاتورى اتوي مولىه ذاباغ
 اغكغ بهو وكسا يوسى دوسون غريكو سوادوس
 سابين اتوي فكاو سانس ساسي لوجع اغمال
 فانغركاني ذاباغ واهو. ووندينن قارا كياهي اوكي
 كاظاه اغكغ هاندريك حاضر اتاغغ كاظاهي
 تاسيك مشكل اوكي ستاهي كياهي اغكغ وبعاتن
 هانكغني راووه كراتن ضررة يعنى اجر به فته.
 كنادوش فوندى حكوم ايقون صدقاهان سها
 كياهي اغكغ هانسان ضررة؟ (واقعة جبالاواغ)

(فوتوسا ايقون مؤتمر)

فنداملان كغ كسبات اغ واهو سؤال قونىكا حرام.
 موندوت كتر اغانل سكيغ ككتاب مجموعة نشر بقه كار اغان
 ايقون سكيهي صالح ذارات سباراغ سها سكيغ حاشية

(كوغكريس قاريغ كترانغان)

سلاكي واهو تحريف (غواهي) اغ كلة اغكغ سانس كلة سكيغ
قران. توين حديث. أو اسم من الاسماء المعظمة التوقيفية.
قونيكايوتن وونتن الاغان (بوتن حرام) مقگاه شرعي
داداي اغكيه ماسيه اغسال كانجاران (نواب من الله)
موندوت كترانغان سكيغ شرح احياء علوم الدين. جز
سادس في باب السماع. صحيفة (٥٥٧). لن سكيغ حديقه
التدبیه صحيفة (١٦٧).

(المجلس السادس)

ديتن خمس ١٧ ربيع الثاني ايشكيه قونيكايوتن
ايقون مجلس الشورى. (نساء الله حسنه) كير اغ لاغكوغ
جهم 8 اينجيج قارا كياهي. واه قارا تامو كيشغال ستمون
راقت وونتن مجلس. ساه دير يعنى مشاوره. لاغكوغ غرومين
فانجغتايقون كياهي هاشم اشعري جوباغ رئيس النهضة
قونيكايوتن. غنديكا وونتن غر سانيقون حاضرين: سار بينج
فانجغتاي ستمون لامي (داعو) اغكيشون جومنت دادوس
رئيس ايقون قونيكايوتن جمعيه. (نهضة العلماء) ويوت غادك
ايقون واهو جمعيه دمولي ساه قريكي دير يعنى تاني كيندل
غاسوه (استراحة) سكيغ كرائيان. هيج ساه ماغكي
فانجغتايقون كياهي. پرون غاسوه (استراحة) ساه ماغكي
قارا حاضرين كاكرسا اكن سوفادوس هامليه قوسيتن
اغكغ ديقون موفاقتي دينج تباغ كاظام اغكغ دادوس
كانتوسيقون كياهي هاشم. (دادوس رئيس النهضة) هيج
مجلس قارا حاضرين سامي كروسوك سدايا ماتور: بوتن
موفاقة. واه كامراتان ذاتغ استراحة ايقون كياهي هاشم. لا
سدايا حاضرين نيون كيان ساعث فانجغتايقون كياهي
كاكرسا اكن تنف (نيوس) هانجشي دادوس رئيس
هذه الجمعيه (نهضة العلماء) - لاجيج كياهي هاشم نولاه نولاه
(فانتفت يينا. وشمالا) نيغالي اغ حاضرين كيشغال سدايا

سلاجج بعض الحاضرين موندوت ذاتغ واهو
سكندي نولي ديقون باتيغ اغزيستي سراتا ماهوس
صلوات: اللهم صل على محمد. جهرا. سلاجج سدايا
جواب اللهم صل عليه. غانن واهو قونقا كالت
دعاه حاليه مقسود سوفادوس مدالي باي كامشيل
سكادوس مدالي تويبا سكيغ واهو كندي. قونقا
كالت نذير: (فكولوغان)

(الجواب سكيغ كوغكريس)

ديني هامباتيغ كندي دموكي فجاه قونيكايوتن
حكوم نذير. موندوت كترانغان سكيغ كتاب باجوري
عني التتريب. جز اول باب الحجير.
(٢٣) القيام عند ذكر مولد النبي سلم. اهو عرف شرعي
فلايختلف باختلاف الانسان والبلدان او عرف
عادي يختلف باختلافهم فان اجتم انه عادي فيل
الافضل على اهل الجاوه. القيام نظرا الى كونه سلم
عربيا او القعود نظرا كونه عرف بلد هم وادبهم
عند لقاء الامراء والرؤساء. (منيس بانن)

(كترانغايقون كوغكريس)

ديني القيام عند ذكر مولد النبي صلى الله عليه
وسلم. قونيكايوتن عرف شرعي. موندوت سكيغ كتاب
كوكب الانوار في عقد الجوهر. صحيفة (٦٠) لن سكيغ
كتاب مسام المييد في حكمة القنيد.
(٢٤) الذكر انحرف تحريفا بغير المعنى بمد المقصود وعكسه
كما وقع في اهل المولود وذلك نحو: مارحبا
ياتور وعايني مارحبا. طالعا البدر وعلانا مارحبا.
وكما وقع في تهليل صاحب الورد من الجهل. هل
يجوز ذلك ويثاب فاعله. اه واقعة في منيس وبانن
وغرها.

(واقعة منيس)

Keputusan Muktamar X NU

Tentang Hukum Membanting Kendi dan Telur dalam *Walimatul hamli*

Sumber: H.B.N.O., *Poatoesan Congres Nahdloel Oelama ka 10* (ttp.: H.B.N.O., 1935)

﴿ فتوتوسان كوئغكريس نهضة العلماء كا ١٠ ﴾

٢٢

(مسئلة كادوا فولوه دلافان)

اوراغ برومه ذي لوار سور البلد. مقاسيهكن زكاة
كاذالم سور البلد ايتو افا نما نقل الزكاة انا تيدا؟
اوراغ ذي لائين نكري. اخير رمضان فولغ، غروب
الشمس ماسيه ذي تمه جلان. ايتو اوراغ زكاتبا فطرة
ذيما؟ اوفا ايتو زكاتبا فطرة ذي رومها سنديري صح
افا تيدا؟

(جواب مسئلة كادوا فولوه دلافان)

كوغكريس موئوسكن بهوا يغ سنديكيان
ايتو ذي نماكن نقل الزكاة اتفاقا جيكالو الى محل تقصر
فيه الصلاة. فان جيكالو تيدا الى محل تقصر فيه الصلاة
مك اذا خلاف. فان اوراغ يغ فولغ، كاغروبان ذي
تمه جلان. مك واجب زكاتبا ايتو. ذي تمفات كاغروبان.
كالو ايا من اهل الوجوب كالو ايا وقتو غروب تيدا
مضوياني افا ٢٢ مك تيدا واجب زكاة. انافون زكاة فطرة
ذي رومها يغ ترسبوت فالم سوال مك صح ميتوروة
قول يغ مقهاروسكن نقل الزكاة. مقمبيل كتراغاف
فاري كتاب بنيه صحيفة ١٠٥ ونصه. واختر جمع الجواز
الح فان مسئلة ي.ك. ونصه لايجوز نقل الزكاة الح.

(مسئلة كادوا فولوه سميلان)

انك تهادي برعقد نكاح ذغن اجبار. مك تاه صح له
نكاجبا. افايلا ايتو نكاح ذي سمكا صح، سهيئكا
برستوبوه (ذي وطئي) مك ايتو ستوبوه شبهة (وطئي
شبهة) كالو برستوبوه فالم سأسوداها كياتاهن تيدا
صحا ايتو فراكوينان فان سبيلوم مثولاغي لائي تجديد
النكاح مك ايتو برستوبوه جاتوه زنا، افا فونبا انك.
مك ايتو انك بوكان انكبا ايتو لاكيي. مقمبيل كتراغاف
فاري كتاب تحفه جز ٣ صحيفة ٢٠٨ فان اغامة جز ٣
صحيفة ٢٤٠

(مسئلة كادوا فولوه توجو)

مبنتيغ كندي فان تلور كوتيك وليمه الحمل يغ
سوداه ذي فوتوس ذي كوئغكريس فكالوغان تيدير.
ايتو افا تيدير حرام افا اذا تيدير سلائينبا حرام. افتونا
ولكم الاجر والثواب ايني مسئلة واقمة.

(جواب مسئلة كادوا فولوه توجو)

كوغكريس موئوسكن بهوا كرجان سنديكيان
ايتو ذي نماكن تيدير يغ حرام. تتاغ تيدير ايتو افا يغ
چوما مكروه سهاجا. مقمبيل كتراغاف فاري كتاب
باجوري جز اول صحيفة ٢٩٨ نصه او يرميه في البحر
او الطرية الح فان. كتاب اقباع نصه ا.مه في البحر

Keputusan Muktamar XXVI NU Tentang Hukum Penggantian Kelamin

Sumber: K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Naidlatul Ulama* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997).

mbolehkan mendengarkan piringan hitam dengan istilah La-ba'sa bihi. Beliau mendengarkan ini dengan syairnya:

وقد سئلت عن سماع طربه : فقلت بحثائه لا بأس به .

- b. Pendapat Syekh Muhammad Ali Al-Maliki dalam kitabnya *Anwarusysyuruq fi-ahkamish-shunduq* halaman 30 setelah beliau memberi alasan-alasan secara panjang lebar akhirnya beliau memberi kesimpulan bahwa: merekam Al-Qur'an dalam kaset atau piringan hitam dalam menggunakan selanjutnya itu tidak sunyi dari menghina atau merendahkan martabat Al-Qur'an. Karena itu merekam Al-Qur'an dalam kaset atau piringan hitam sebagaimana yang maklum itu hukumnya haram pula mendengarkan Al-Qur'an dari padanya.
- c. Menurut qaul-mukhtar 'indal-Hanafiyah sebagaimana tersebut dalam *Al-Fatawi Asy-Syar'iyah* juz awal halaman 289:

وقد نص الحنفية ان سماع اية السجدة من الطير كالبيغاء لا يجب عليه السجدة في القول المختار لانها ليست قراءة بل محاكاة لعدم التمييز. وقيل يجب لانها السامع قد سمع كلام الله وان كان من الطير المحاكي .

327. S. *Bagaimana hukumnya terjemahan/tafsiran Al-Qur'an dalam bahasa asing oleh orang-orang yang bukan Islam atau orang-orang Islam yang menterjemahkannya dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing itu?*

- J. Terjemahan atau tafsiran Al-Qur'an yang dibuat oleh orang yang tidak beragama Islam sangat diragukan kebenarannya. Maka bagi orang awam dilarang membaca dan mengutip dari terjemahan/tafsir yang seperti itu.

→ 328. S. *Bagaimana hukumnya penggantian kelamin?*

- J. Penggantian kelamin hukumnya haram.

لَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّسَاءِ فِي الْآيَةِ ١١٩ :
وَلَا ضَلِيلَتُهُمْ وَلَا مَنِيْنُهُمْ وَلَا مَرْثُهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ إِذَا ت

الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْثُهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ٥. (قوله : فليغيّر
خلق الله) أي ما خلقه ومن ذلك تغيير صفات نبيّنا صلى
الله عليه وسلم الواقع من اليهود والنصارى وتغيير كتبهم
ومن ذلك تغيير الجسم بالوشم وتغيير الشعر بالوصل .
اهـ . الصادق .

Demikianlah Keputusan Muktamar NU di Semarang. Akan tetapi seminar tinjauan syariat Islam tentang operasi ganti kelamin oleh PBNU Jatim tgl. 24 - 26 Mukharom 1410 H / 25 - 28 Agustus 1989 M telah mengupas persoalan ini sampai mendalam sebagai berikut:

Soal 1 : Seorang laki-laki atau perempuan yang normal, dalam arti alat kelamin luar dan dalamnya tidak ada kelainan, lalu karena sesuatu hal dia minta dioperasi agar kelamin luarnya dirubah menjadi jenis kelamin yang berbeda atau berlawanan dengan jenis kelaminnya yang dalam. Bagaimana hukumnya?

Jawab : Hukumnya adalah "HARAM", sebab termasuk merubah ciptaan dari Allah dan mengecoh orang lain!

Dasar Pengambilan Hukum:

1.1. Imam Al Qurthubi dalam kitab tafsirnya Juz III halaman 1963 mengatakan sebagai berikut:

قال ابو جعفر الطبري : حديث ابن مسعود دليل على انه لا يجوز تغيير شيء الذي خلقها الله عليه بزيادة او نقصان الى ان قال ، قال عياض : ويأتى على ما ذكره ان من خلق باصبع زائدة او عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا ترعه لانه

Keputusan Muktamar XXIX NU

Tentang Hukum Melontar Jumrah *Qabla az-zawāl*

Sumber: Sekretariat Jendral PBNU. *Materi Ahkam/Masail Diniyah Muktamar ke-29 Nahdlatul*

Ulama (Jakarta: Setjen PBNU, tt.)

أركانها رضيع لبن ومرضع وشرط فيه كونه آدمية حية
بلغت سن حيض وفي الرضيع كونه حيا ولم يبلغ حولين
يقينا وفي اللبن وصوله أو ما حصل منه جوفاً إلخ -- فتح

الوهاب شرح منهج الطلاب ج: ٢ ص: ١١٢.

5. Salah satu sebab dari tragedi 'jamarat' di Mina beberapa waktu lalu karena adanya asumsi di kalangan masyarakat umum bahwa melontar jumrah harus dilakukan setelah zawalusy syamsi. Sementara itu, jumlah hujjaj yang bertambah terus tiap tahun tidak dapat diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang cukup. tragedi jamarat terjadi, karena semua orang hendak melontar setelah zawal, sementara tempat melontar jumrah tidak cukup luas untuk menampung jumlah hujjaj yang begitu besar, sehingga terjadilah desak-desakan.

→ **Pertanyaan:**

- a. Bagaimana hukum melontar jumrah qoblaz zawal ?

Jawabannya:

- a. Hukum melontar jumrah qoblaz zawal terhitung sejak Thulu'ul Fajri adalah diperbolehkan, menurut Imam Rofi'i yang didukung oleh Imam Asnawi, Qoul tersebut dinilai dlo'if namun boleh diamalkan demi keselamatan para hujjaj. Sedang melontar jumrah pada tanggal 11 untuk digunakan tanggal 12 Dzulhijjah adalah tidak boleh.

Pengambilan dalil antara lain dari :

عبارة: (مسألة) جزم الرافعي وتبعه الأسنوي وقال إنه المعروف
بجواز رمي كل يوم قبل زواله وعليه فيدخل بالفجر إهـ --

أحمد العينين هامش بغية ص: ٦٩

يصح رمي الحاضر قبل الزوال لكن مع الكراهة وجزم به
الرافعي واعتمده الأسنوي وقال إنه المعروف مذهباً، قال

في التحفة وعليه فينبغي جوازه بعد الفجر كغسله اهـ --
موهبة ذي الفضل ج: ٤ ص: ٥٣٠

والمعتمد من اضطرب في ذلك جوازه فيهما بخلاف تقديم
رمي يوم على زواله فإنه ممتنع كما صوبه المصنف
وجزم الرافعي بجوازه قبل الزوال كالإمام ضعيف وإن
اعتمده الأسنوي وزعم أنه المعروف مذهباً وعليه فينبغي
جوازه من الفجر اهـ -- تحفة المحتاج ج: ٣ ص: ٢١٧

فإن قلنا أداء فجملة أيام مني في حكم الوقت الواحد، فكل
يوم للقدر المأمور به وقت اختيار كأوقات اختيار الصلوات
ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال، ونقل إمام
الحرمين أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمي يوم إلى
يوم قال الرافعي لكن يجوز أن يقال إن وقته يتسع من جهة
الآخر دون الأول فلا يجوز التقديم على كلام الرافعي وهو
كما قال، فالصواب الجزم بمنع التقديم وبه قطع الجمهور
تصريحاً ومفهوماً اهـ -- المجموع ج: ٨ ص: ٢٤

جزم الرافعي وتبعه الأسنوي وقال إنه المعروف بجواز
رمي كل يوم قبل زواله وعليه فيدخل بالفجر اهـ -- الثار
البيان ص: ٧٢

6. Praktek bisnis modern berkembang begitu cepat, sehingga muncul ber-
bagai praktek mu'amalah haditsah yang belum pernah dikenal dalam ma-
sa lampau. Di antara praktek muamalah haditsah itu adalah munculnya ju-
al beli surat-surat berharga, seperti obligasi, saham, dan lain-lain.

Pertanyaan:

- a. Bagaimana hukum memperjual-belikan surat-surat tersebut?

Tentang Mencari Dana dari Pasar Malam, Tonel dan Sejenisnya untuk
Memelihara Anak Yatim, Fakir Miskin dan Sebagainya

Sumber: H.B.N.O., Poatoesan Congres Nahdotoel Oelama ka 10 (ttp.: H.B.N.O., 1935)

﴿ مؤتوسان كوئشكر يس نهضة العلماء كا ١٠ ﴾

نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد حاتم اي انتقص ثوابهم
بتقويته ما طاب لهم فيكره ذلك اما ورود النص بافراد
الدعاء في غير القنوت فيفرد.

← (مسئلة كا سمييلان بلاس)

بايمنا حكوميا اوراغ فيارا انك يتيم فقير مسكين
ساتروپيا، فاكئي بنذا هرتا برأسها ذاري مائين فوتيل،
فاسر مالم تونيل، واماها؟

(جواب داري مسئلة كا سمييلان بلاس)

كوغكريس بموتوس هوا سكير مائين فوتيل،
فاسر مالم، فان بوكاه تونيل ايتو حرام، ملك حرامه
فربواتان يع ترسبوت ذالم سؤال. مسميل كترانغان ذاري
قاعدده دفع المقاد مقدم على جاب المصالح.

(مسئلة كا دوا فولوه)

اوراغ يع برمذهب شافعي يع -وذاه مقرتي بتول
اتو سوداه ذي كابي تاهو فذا واحبنا معاذف عين التابة
ذيذالم صلاة، ايتو چوكوف (صح) افا تيذا صلاة ذعن
معاذف جهة القبلة ساجا. سفرتي ذي تانه جاوا معاذف
كا بارات جفات سوندر برفاليع (انحراف) افا موستينا.
ذان لائي مسجد ٢ يع بلون مقبلة بتول افا تيذا سيوكيا

تيذا سديميكيان بك صح. اخذا من فتح القريب في
احكام الطلاق ونصه وشرط الاكراه الخ فان بغية
المترشدين صحيفة ٢٣١ ونصها لان الائمة الحقوا حكم
الحاكم.

(مسئلة كا دلا فان بلاس)

بايمنا حكوميا ساوراغ ماموم الكن امام يع بجا
دعه قنوت تخصيص لنفسه سفرتي اللهم اهدني فيمن
هديت الخ افاكه كوگور (لياف) فضيلها جماعة افا تيذا؟

(جواب داري مسئلة كا دلا فان بلاس)

كوغكريس بموتو يكن بهوا تخصيصا امام
سديميكيان ايتو مقوراغن فضيلها جماعة بائي امام فان
ماموم. مسميل كترانغان ذاري كتاب كفاية الاخبار جز
١ صحيفة ١١٢-٧١ ونصه ويقت الامام بلفظ الجمع بل يكره
تخصيص نفسه بالدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد
قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد حاتم
رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. ثم سائر
الادعية في حق الامام كذلك اي يكره له افراد نفسه سرح
به الغزالي في الاحياء. فان شرح بداية الهداية. صحيفة
٥٣-٦٤ باب الامامة ونصه ولا يخص الامام نفسه بالدعاء في
قنوت الصبح فلا يقول اللهم اعدني بل يقول اللهم اهدنا اي

Keputusan Muktamar XIV NU

Tentang Mencari Dana dari Pasar Malam, Komedi dan Sepak Bola
untuk Membangun Masjid, Madrasah dan sebagainya

Sumber: H.B.N.O., *Verslag-Congres Nahdotoel-'Oelama' Jang ke-14* (Soerabaia :H.B.N.O.,

1939)

١٩

فوتوسان كو غكريس كا ١٠

سؤال b دان c مكا ترما-ؤ ناما تصوير كتراعن داري كتاب الجواب الشافي س
٢٠ وعبارته: لان التصوير هوا مجاد الصورة بمعنى ان المصور يحدث صورة
حيوان بفعله وسنمه . دان قاموس الربوي ، وعبارته: التصوير لغة وشرعا ايجاد
الصورة واحداثها.

(٩) اوليه كرنا فامر يثناه سيني نترال داري الگاما ، بايگنا سيكفا كو غكريس لندا
سوفيدي ؟ اومفما كو غكريس موهون دي سماكن حقا -وفيدي بئغ كندا
الگاما اسلام دغن الگاما لاينبا افا ماسوك قاعدة : دره المفاقد مقدم على جلب
المصالح افا تيداء ؟
(جولاجف)

(٩) الجواب : تيداء دي بيچاراكن .

(١٠) اب من بعض البلبا التي امتحن الله عزوجل بها ايمان امتنا الاسلامية عموما
وعلمائها خصوصا ان قوما غير مسلمين اقتنوا بعضا من مسلماتنا خليلات فهم
يشارونهن ويقومون عليهن وهن يخصمن لهم وينقدن تحت اطلمهم . اوانك
المسلمات في حكم الاسري لهؤلاء القوم ، فيجب علينا اتقاهن ام لا ؟ اقتونا
انابكم الله تعالى
(جولباغ).

(١٠) الجواب : هو بعض المسلمات بئغ ترسبوت ديدالم سؤال
ايتو ، تيداء ماسؤ منجدي اسري تانفي كتا مسلمين برسما ؟ كواحيان اتقاذ
منولوغ دان ملسكن ، ازالة للمنكر . كتراعن داري اعانة الطالبين ص ١٩٦
الجزء الرابع . وعبارته قوله (باسر) متعلق يبرق والمراد به الاستيلاء والقهر . دان
حدث من راي منكم منكر الخ .

(١١) اوراغ ماو بيكين مسجد اتوا كدوغ سكو لهان اتو منولوغ اوراغ بئغ كساغسارائن ،
مكا دي اتاكن فاسار مالم اتوا كوميدى اتوا فرتديشان فوتيال دغن اذا بااران
بئغ تتو ، سرتا اذا نيتكن ابني اوراغ (فنداقتان با) كليانيا داري فدا سگلا
اغكوس بئغ ترسبوت ، بوات بيكين مسجد اتوا كدوغ سكو لهان اتوا فنولوغ
اوراغ كساغسارائن ، مكا بايگماناكه اوراغ فنداقتان بئغ ترسبوت ايتو .
حلال كه اتوا تيداء ؟
(مرتافورا)

(١١) الجواب : جيڪالو ذاتيها فرماله دان سبائيا ايتو مشاندوغ
 بئغ دي حرمڪن اوليه شرع اسلام مڪا حرام له واغ ايتو ڪرن ترماؤ واغ
 بئغ دي فراويله دغن جلالن بئغ بوڪن مستيبا وبئغ حق ڪتراغن داري ڪتاب
 الزراجر ص ١٨٧ الجزء الاول وعبارته : لان الاكل بالباطل يشمل كل مأخوذ
 ببئغ حق ، سواء كان على جهة الظلم كالنصب والحيانة والسرقة أو الهزؤ واللغو
 كالأخذة بالقطار والملاهي وسبأني ذلك على جهة المكر والحديسة كما لمأخوذة
 بمقد فاسد . دان بمفر گوناڪن واغ ترسيوت گونا مندبير بڪن مسجد دان سبائيا
 فوف حرام جوگا . ڪتراغن داري الاحياج ٤ ص ٣١٥ : القسم الاول
 الماصي وهي لا تتغير عن موضعها بالنية الى ان قال اوييني مدرسة
 اومسجدا اوروباطا بمال حرام وقصد الخير فهذا كله جهل — والتية لا تؤثر
 في اخراجه عن كونه ظلما وعدوانا وممضية

﴿(باب الزكاة)﴾

(١٢١) باگمانا حڪميا اوراغ متجاريني نفعها انا يتيم مغن ميتاه زكاة فدا هال انا يتيم
 سديڪيان بوڪن ترماؤه اصناف الثمانية ؟ دان جيڪائو هاروس افاڪه صح زكاة
 تاهادي ؟
 (تماغكوغ)

(١٢٢) الجواب : منريماڪن زكاة ڪفدا اوراغ اوتتؤ نفعها انا
 يتيم ايتو صح جيڪالو انا يتيم ايتو ترماؤ اصناف الثمانية ڪرن فقير اتو
 ميڪين دان بوڪن داري بني هاشم اتو بني المطاب ڪتراغن داري كفاية الاخبار
 جز (١) ص ١٢٢ « فرع ، الصغير انا لم بڪن له من ينفق عليه ، الى ان
 قال قلت امر التيمية في زمتها هذا قد تمطل في بعض النواحي لجور
 الحكام فينبغي انقطع بجواز اعطاه التيم من الزكاة م .ت .الا ان يكون شريفا
 فلا يعطى وان منع من خمس الخمس على الصحيح .

(١٢٣) باگمانا حڪميا مقومفولڪن زكاة النبات فاذا اتوا زكاة التجارة گونا خصوص
 بوات مندبير بڪن مسجد اتو الاثني ٢ ؟
 (ونوسا)

Keputusan Mukhtamar XIV NU

Tentang Hukum Kepatuhan pada Induk Organisasi

Sumber: H.B.N.O., *Verslag-Congres Nahdotoel- 'Oelama' Jang ke-14* (Soerabaia :H.B.N.O., 1939)

فوتوسان سو عكريس ١٠٥

١٨

(٧) بالذمنا حكوميا جيانغ ن. ع. بنغ - ساجا تيداه - سو كامتر جاكين فوتوسان كو غريس اتوا ه ب كومي ناسي . افاكه مباح افاكه حرام . جيكا مباح الحمد لله في الحال والله اعلم في المال . جيكا حرام . افاكه - ساجيا تيداه - منجادي اصرار بالذنب . جيكا اصرار افاكه بوكان من المنكرات التي فسادها بحمول علينا نموذ بالله . افيدونا مأجورين (بريس)

(٧) الجواب : بهوا ليد جيانغ ترسيوت ديدالم - سوال ايتو ، بردوسا ، كرنا ه . ب . ايتو منجدي ولي الامر في الجمية ؛ سباب اغفكانان ليد ه . ب . ايتو سبائي بيعة الامارة ، جادي جيانغ ياغ سنانياسا مليهمكن فوتوسن بنغ ترسيوت دالم - سوال ايتو مصر على الذنب كتر اغن داري كتاب تحفة جز ١ ص ٧٦ وتتمقد الامامة بطرق احدها بالبيعة كما بيع الصحابة ابا بكر والاصح ان المعتبر هو بيعة اهل الحل والمقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذي يتيسر اجتماعهم حالة البيعة . دان داري كتاب الاذكياء : اطلب متابا بالندامة مقلما ، وبغزم ترك الذنب فيما استقبلا .

(٨) مسله تصوير الحيوان بصورة كاملة ! :
a عبارة دالم كتاب ترشيح المستفيدين في باب الوليمة مانصه : ويجوز اتخاذ الصورة المأخوذة بالفوتوغراف الخ ، افاكه بويه كيتا مضميل دليل اوتتوك كهاروسانيا مو تريك حيوان دغن ايتو عبارة افاكه تيداه ؟ .

b مبيتمفل دان - باكيا دغن ستمفل يتغ اذا كُبار حيوان لالو وجود كُباردي اتاس براغ بنغ دي ستمفل افاكه تراسوك حكوم تصوير افاكه تيداه ؟

c كرتاس اتوا كايو بيرافا فوتوغ جيكلو دي اتور (دي تاا) ييسا وجود بروفا حيوان افاكه تراسو حكوم تصوير افاكه تيداه . (قرشيني)

(٨) الجواب : بهوا عبارة كتاب ترشيح المستفيدين وانظر ما عمت به البلوى الخ ايتو تيداه بويه دي فركوناكن دليل اوتتو كهاروسانيا مو تريك حيوان كرن معنى اتخاذ الصور ايتو اقتناه الصور (مبيتمن كاهبار) ادا فون

٢
 فر سيدن دكفالا نكارا ، دان اله انكار . اواله ولي الامر ضروري
 بالشوكة باع دى قولو سكان اوليه كونفر ينسى عالم علماء دغن
 مندرى اكما دى جيفاناس ر باكي مؤتمن لمامنة العلماء كـ ٢٠ دى
 سورابيا مهميتو كان اتا و كه منياله تن ك مينتادليل باع صريح .
 داري جباغ بليبار

٣
 الجواب : مؤتمن منبولو جوي دان مهمتر كان قولو سكان كونفر ينسى عالم علماء
 دى جيفاناس بجكال ٢ - ٧ مرات ١٩٥٤ هـ مال ولي الامر ضرورة بالشوكة
 دان دليل ٢ با دغن دى تمناه كتر اغن داري كتاب احياء جز اول
 ص ١٤٧ . عبار تبا دمكيان : الاجمل الضائر . انه لو تصذر وجود
 الوريح و الصلم فتمن تصدى للامامة ، الى ان قال . وذلك محال ونحن نقضى
 بنفوذ قضاء اهل البقي في بلادهم لمسيب حاحيه فكيف لا نقضى بصحة
 الامامة عند الحاجة و الضرورة . دان داري كتاب اقفائة الانبياء
 عبار تبا دمكيان : فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاة سلطان ذو شوكة
 وان كان جاهلا او قاسقا لئلا تتخلل مضار المسلمين .

٤
 اكا مانا بحكومها معومو مكان اول رمضان اتو اول شوال ياي حساب اتو
 اوراق باع مهمتر جاي ياي با دغن منوروة قد اقات حسابيا ، توليه كه الفر
 تيداء ؟ كمرنا ساها كيبان باياك ياي معوم باع مهمتر جاي ياي برانج
 معومو مكان سبلوم فضومومان كمنري بيان اكا مانا داري جباغ بابو و اعني

٥
 الجواب عن المسئلة الثالثة و التاسعة بمختر داري مسئلة تمناه عن اوليه كمرنا
 مسئلة ايبي مضان ذومع بر اقا قرتيان ، ملك مؤتمن منجوي دغن پدرا قا جرابان :
 ١ - تيداء بر دافت و دالم حديث دان انار بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم
 دان ساتر و سببا معنجر كني تنفيا صوم / عند دغن حساب سدع خر حان
 اوراق باع مهمر ليها كان قواسا دغن حساب اياه مطرف كور و لها امامه بخاري .
 ٢ - معومو مكان تنفيا قواسا ريبا ياي و اسار حساب دغن سورة بتسليباران
 دان سبباها كنيها هي عكار رعية منجادي كامخاو بالاو سدع قائمومبان
 تر سبوت مند الهلوي فخورمات خبر ينياه ، ملك مؤتمن مضان كاش

Keputusan Munas Alim Ulama NU tanggal 18-21 Desember 1983

Tentang Penetapan Awal Ramadan dan Syawwal

Sumber: Panitia Munas Alim Ulama NU, *Laporan Penyelenggaraan Munas Alim Ulama NU - 1983* (Jakarta: Panitia Munas Alim Ulama NU, tt).

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA yang ber-
langsung pada tanggal 13 - 16 Rabiul Awwal 1404 H/18 -
21 Desember 1983 M di Sukorejo, Situbondo Jawa Timur,

Memperhatikan : 1. Khutbah Iftitah Rois Aam PB Syuriah NU;
2. Pidato Pengarahan PB Syuriah NU;
3. Maqalah PB Syuriah NU tentang Bahtsul Masail Diniyah.

Mendengar : 1. Laporan Komisi Masail Diniyah Musyawarah Nasio-
nal Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang pemoha-
an, illat, adillah syar'iyah dan ittifaq atas
beberapa masalah diniyah yang dilakukan dalam
permusyawaratan pada tanggal 14 sd 16 Rabiul
Awwal 1404 H/19 sd. 21 Desember 1983 M.
2. Pembahasan dan ittifaq Peserta Musyawarah Nasio-
nal Alim Ulama Nahdlatul Ulama dalam permusya-
waratan paripurnanya hari ini. atas laporan Ko-
misi Masail Diniyah tersebut.
Maka dengan berdoa:

اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا

Mensahkan : I. ITTIFAQ DENGAN ADILLAH SYAR'IYYAH ATAS HUKUM DA
RI BEBERAPA MASALAH DINIYAH DENGAN RUMUSAN SE-
BAGAI BERIKUT:

→ 1. PENETAPAN AWAL RAMADLAN DAN SYAWAL.

Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadhan dan awal Syawwal dengan menggunakan dasar hi sab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut Jun-hurus Salaf bahwa tsubut awal Ramadhan dan awal Syawwal itu hanya birru'yah au itmamil adadi tsalatsina yauman.

Antara lain tersebut dalam:

- Bughyatul Mustarsyidin, shahifah (s) 108, maa nasshohu (masalah):

لا يثبت رمضان كغيره من الشهور الآبرؤية الهلاك
اواكمال العدة ثلاثين بلا فارق .

- Al Ilmu Al-Mantsur fii Itsbatis Syuhur, s. maa nasshohu :

قال سند المالكية : لو كان الامام يرى الحساب في الهلاك
فان ثبت به لم يتبع ، لاجماع السلف على خلافه .

Adapun mengamalkan hisab untuk menetapkan awal Ramadhan dan awal Syawal, boleh hanya bagi Ahli Hisab itu sendiri dan orang yang mempercayainya.

2. AL KUTUBUL MU'TABARAH

Al-Kutubul Mu'tabarah fil Masail Al Diniyah 'indana ialah kitab-kitab alaa Al-Madzahib Al-Arba'ah.

Kamaa fii (seperti antara lain tersebut dalam):

- Al-Bughyah (Bughyatul Mustarsyidin), s, 8
maa nasshohu:

نقل ابن الصلاح الاجماع على انه لا يجوز تقليد غير الائمة
الاربعة، اى حتى العمل لنفسه، فضلا عن القضاء و
الفتوى، لعدم الثقة بنفسيتها لاربابها باسانيد تمتع
التحريف والتبديل

Wamitsluhu maa fii (dan ketentuan yang sama dalam) Al-I'anah (I'anatut Thalibin), juz I s. 17 wa Sab'ati Kutubin Mufidah, s. 50.

3. PEMOTONGAN HEWAN

Memukul hewan untuk memudahkan pemotongan (disembelih) seperti terjadi di rumah pemotongan hewan dengan mesin, hukumnya haram, karena termasuk ta'dzibul hayawan.

Adapun pemotongan (penyembelihan) yang didahului semacam itu, jika pada hewan tersebut masih terdapat hayah mustaqarrah, hukumnya sah dan madzbuhnya halal.

Sedangkan menguliti hewan sesudah dipotong (disembelih) tetapi masih bergerak-gerak (belum mati), demikian pula memotong-motong dagingnya, hukumnya makruh, tetapi dagingnya tetap halal.

Kamaa fii (seperti ketentuan, antara lain dalam): 290 s. 195

فلو ادخل سكيننا باذن الحيوان-كالثعلب وقطع الحلقوم
والمريء وبه حياة مستقرة، حل المذبوح وان حرم هذا
الفعل لما فيه من التعذيب.

- Al-Bujairimi alaa Al-Khatib, juz IV s. 250
maa nasshohu:

ويكره له ابانة رأسها حالا، وزيادة القطع، وكسر العنق، و
قطع عضو عنها، وتحريكها، ونقلها، حتى تخرج روحها.

- Jawahirul Iklil lis Syaikh Khalil, Madzhab Imam Malik, Dasrut Tanzil, s. 213:

4. Penetapan awal Ramadan dan Syawal

A. Mengingat :

- a. Anggaran Dasar Jam'iyah NU pasal 4 yang selanjutnya bahwa 4 Mazhab : yaitu, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, kesemuanya tidak membenarkan penetapan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha secara umum oleh Qodiy atau penguasa melalui dasar Hisab tanpa di - hasilkan Ru'yatul Hilal atau Istikmal (Kitab Fiqh al-Mazahibil Arba'ah).
- b. Perlu adanya keseragaman dikalangan warga NU dalam melaksanakan keputusan Mu'tamar NU ke 27 tentang penetapan awal Ramadan, Idul Fithri dan Idul Adha.
- c. Ditinjau dari segi Ilmiah Syar'iyah, maka dasar Ru'yatul Hilal/Idul Istikmal dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha adalah dasar yang dipakai oleh Rasulullah saw dan para Khulafaur Rasyidin serta dibenarkan oleh seluruh Ulama', sedangkan dasar Hisab falak untuk penetapan tiga hal tersebut adalah dasar yang tidak pernah dipakai oleh Rasulullah saw dan para Khulafaur Rasyidin serta diperselisihkan keabsahannya dikalangan para Ulama'.
- d. Jamiyah NU adalah Jamiyah yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah yaitu Jamiyah yang menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah saw dan tuntunan para Sahabat serta Ijtihad para Ulama' mazhab empat yaitu ; mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali .
Dari alasan-alasan yang tersebut diatas, maka Musyawarah Nasional Ulama' NU tahun 1987 menegaskan kembali keputusan NU bahwa penetapan awal Ramadan, Idul Fithri dan Idul Adha oleh Qodiy atau Penguasa yang diberlakukan kepada Masyarakat harus berdasarkan ku'yatul Hilal atau Istikmal .

B. Penjelasan :

1. Untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas, maka seluruh warga NU agar supaya menta'ati keputusan Peme-

(0)

2. Sudah lama Jamiyah NU mengikuti pendapat para Ulama' yang tidak membedakan mathla' dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha, yaitu hasil Ru'yatul Hilal disalah satu tempat di Indonesia yang diterima oleh Pemerintah sebagai dasar penetapan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha, maka berlakulah penetapan Pemerintah tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda mathla'nya .

- Melakukan Ru'yatul Hilal untuk penetapan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha menurut mazhab empat selain mazhab Hambali adalah fardlu Kifayah, dan hal tersebut menurut mazhab Hambali adalah Sunnah (Kitabul Fiqh alal - mazahibil arba'ah) .

- Selama ini Pemerintah Republik Indonesia/Departemen Agama selalu menjalankan Ru'yatul Hilal untuk bulan-bulan tertentu, terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.

Dari alasan-alasan tersebut, maka melakukan Ru'yatul Hilal untuk penetapan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha yang dilakukan oleh Pemerintah/Departemen Agama adalah cukup sebagai melakukan fardlu Kifayah bagi seluruh Ummat Islam Indonesia .

Hamun demikian, Majelis Falakiyah dan Ru'yat Pengurus Besar Nahdlatul'Ulama supaya membuat kepastian awal bulan Sya'ban dengan Ru'yat/ Istikmal untuk keperluan penetapan awal Ramadhan .

3. Untuk keperluan memulai puasa Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha, maka warga Nahdlatul'Ulama terutama para anggota Pimpinan dari Pusat sampai Daerah yang paling kecil (Ranting) diperintahkan untuk menyimak pengumuman Pemerintah/Departemen Agama dalam penetapan tiga hal tersebut melalui RRI atau TVRI. Bila ternyata pengumuman tersebut berdasarkan Ru'yatul Hilal atau Istikmal, maka pengumuman tersebut wajib diikuti dan dita'ati. Tetapi bila keputusan tersebut hanya berdasarkan Hisab yang tidak disertai hasil Ru'yatul Hilal atau Istikmal, maka supaya dalam melaksanakan tiga hal tersebut; Puasa Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha pada hari berikutnya. Hal ini sesuai dengan keputusan Mu'tamar Nahdlatul'Ulama ke 27 dan melaka-

lakukan hal tersebut dilindungi oleh Undang-undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2 .

4. Khusus mengenai Idul Adha ,dimana Pemerintah/Departemen Agama kadang-kadang tidak memberi pengumuman penetapan .. tanggal satu bulan Zulhijjah secara terperinci, maka dalam hal ini Lajnah Falakiyah/Pengurus Besar Nahdlatul'Ulama'-supaya melakukan ru'yatul Hilal pada malam ke 30 bulan Sya wal dan malam ke 30 bulan Zulqaidah serta menghubungi pihak Departemen Agama menayakan hasil Ru'yatul Hilal tanggal 1 bulan Zulhijjah, Dan hasilnya segera diberitahukan kepada se luruh Pimpinan Wilayah dan Cabang Nahdlatul'Uloma diseluruh Indonesia untuk keperluan penetapan Idul Adha .

C. Dasar hukum penetapan awal Romadlon dan Syawal:

Mu'tamar NU ke 27 di Situbondo memutuskan bahwa Penetapan Pemerintah tentang awal Romadlon dan awal Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut "Jum-hurus Salaf" bahwa tsubut awal Romadlon dan Syawal itu hanya dengan "RU'YAH" atau "ISTIKMAL".

Keterangan dari kitab:

- 1- فتنة المسترشدين ص ١٠٨ ماضيه : لا يثبت رمضان كغيره من الشهور البرؤية الهلال او اكمال العدة ثلاثين بلانفارق
- 2- العلم الطنثوري اثبات الشهور ماضيه : قال سند اطلاقية : لو كان الامام يرى الحساب في الهلال فائتت به لم يتبعه لانماخ السلف على خلافه .

Keputusan Mukhtamar XXX NU

Tentang Penetapan Awal Bulan Qamariyah dengan Rukyat Hilal Internasional

Sumber: Panitia Mukhtamar XXX, Hasil Keputusan Bahtsul Masail XXX NU (Dokumen Mukhtamar dan belum diterbitkan)

→ **Masalah 1** : Penetapan awal/akhir bulan dengan rukyat internasional. (Mutabaqqiyat dari reaksi warga Nahdliyyin pada perilaku Yayasan Al-Ihtikam).

Deskripsi Masalah :

Visibilitas *hilal* yang terjadi dengan melihat hilal memperbantuan indera mata (رؤية الهلال) merupakan pilihan utama dalam pemikiran *jumhur fuqaha* bila akan menetapkan awal/akhir bulan qamariyah. Cara lain bila mengalami kegagalan adalah dengan metode *istikmal*.

Hisab astronomi (perhitungan falakiah) ditempatkan sebagai pendukung, guna memprakirakan waktu konjungsi (الاجتماع) dan kadar ketinggian *hilal* di atas

ufuk. Konsekuensi dari metode hisab astronomi adalah berlakunya peta *mathlak* secara lokal (per negara). Penetapan *mathlak* hanya berlaku lokal negara setempat bisa difahami dari perintah Rasulullah SAW kepada pejabat Amir kota Makkah saat beliau menunaikan ibadah haji. (HR Abu Dawud dari Husein bin Al-Haris Al Jadaly).

Masyarakat akhir-akhir ini sering dikacaukan oleh seruan berhari raya Idul Fithri berpedoman pada hari Idul Fithri di negeri Saudi Arabia. Baru-baru ini Yayasan al Ihtikam melaksanakan hari raya Idul Adha juga mengikuti Idul Adha negeri Saudi Arabia. Kedua cara tersebut bermaksud melegalisir ru'yatul hilal negara Saudi Arabia sebagai rukyat internasional.

Pertimbangan Hukum :

1. Lokasi kepulauan Indonesia jelas berbeda *mathlak*nya dengan Arab Saudi.
2. رؤية الهلال yang gagal terjadi diseluruh wilayah Indonesia, bisa saja berhasil dilakukan oleh negara lain, termasuk Saudi Arabia karena saat terbenam matahari mereka 4 (empat) jam lebih kebelakang dibanding waktu standar Indonesia.

3. Kriteria امكنة الاصل hasil kesepakatan MARIMS adalah :

b. Umur bulan minimal delapan jam saat konjungsi.

4. Ibnu Abidin dalam kitab الرد المختار جزء ٢ ص ٣٩٣ dalam substansi uraiannya menempatkan mathlak negara setempat sebagai acuan pokok penetapan awal /akhir bulan qamariyah, utamanya bulan Dzulhijjah.

Pertanyaan :

- Bagaimana hukum menetapkan awal bulan qamariyah khususnya awal ramadhan, syawal dan dzul hijjah berdasarkan rukyat al hilal Internasional untuk pedoman beribadah di Indonesia ?

Jawab :

- Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti rukyat al hilal Internasional karena berbeda mathlak dan tidak berada dalam kesatuan hukum.

Dasar Pengambilan :

١. فتح البارى بشرح البخارى للحافظ ابن حجر العسقلانى الجزء الرابع ص ١٢٣ وعبارته : ثانيها مقابله اذا رؤي ببلدة لزم اهل البلد كلها وهو المشهور عند المالكية , حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه وقال اجمعوا على انه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد.
٢. فتاوى شرعية "عبد الله ابن عمر ابن يحيى العلوى" ص ١١٠ وعبارته : (الاول) لزوم الصوم على جميع الناس المصدق بالرؤية وغيره وشرطه ان يتحد مطلع البلدين او البلدان وان زاد ما بينهما على مسافة القصر.
٣. فتح البارى الجزء الرابع ص ١٢٣ وعبارته : وقال ابن الماجيشون : لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذى ثبتت فيه الشهادة إلا ان يثبت عند الإمام الاعظم فيلزم كلهم, لأن البلاد فى حقه كالبلد الواحد اذ حكمه نافذ فى حكمه.

Masalah 2 : Doa bersama antara umat beragama.

Diskripsi Masalah :

Adanya krisis (moneter, kepercayaan, keimanan) yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini, menuntut bangsa Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Diantara usaha-usaha yang dilakukan adalah mengadakan upacara doa bersama antar berbagai umat beragama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha).

Pertanyaan :

1. Bagaimana hukum doa bersama antar umat beragama yang sering dilakukan di Indonesia ?

Keputusan Mukhtamar II NU

Tentang Hukum Jual Beli Petasan

Sumber: Abu Hamdan Abdul Jalil Hamid, *Ahkām al-Fuqahā' fī al-Mu'amarāt Nahdatul 'Ulamā'*,
Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah dalam Mukhtamar NU ke 1 s/d 15. Semarang : CV Toha
Putra, tt.

في المؤتمر الثاني

٢٤

مقررات المسائل

القول بجذيد الاظهر. قال في شرح سلم التوفيق في باب الربا ما نقله: (وما لم يره) قبل
العقد حذر من الغرام الخطر لما روى مسلم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام في البيع
المشتمل على الغرر في المبيع. قال الحصني: وفي صحة بيع ذلك قولان: احدهما انه يصح
وبه قال الامة الثلاثة ومطابقة من ائمتنا منهم البغوي والرويان. والجديد
الاظهرا انه لا يصح لانه غرر اهـ.

- ٢ ما قولكم فيمن اشترى بضاعة بنصف ربية فاعطى ربية واحداً فضة. فقبط المشتري
من البائع بضاعة ونصف ربية فضة فهل البيع صحيح اولاً لكونه مثل بيع مدعجوة؟
ج ان ذلك البيع صحيح عند الشافعي وبعض المالكية. قال في شرح الاشراف للشيخ محمد
علي المالكي (١) ما نقله: قال الدسوقي نقلاً عن شيخه العدوي والعلامة الدردير لجاز
بعضهم ذلك في الريال الواحد او نصفه او ربعه للضرورة كما جاز يعرف الريال الواحد
بالفضة العديدة وكذلك نصفه وربعه للضرورة وان كانت القواعد تقتضي المنع اهـ
وفي الام (٢) ما نقله: اوباعه ثوباً بنصف دينار فاعطاه ديناراً واعطاه صاحب الثوب
نصف دينار ذهباً يمكن بذلك بأس لان هذا بيع حادث غير البيع الاول اهـ.
٣ هل يصح بيع المطرطوعة وهي التي يسهونها (مخون) او قسبان، لكونه الاعياد
والولايم ونحوها اولاً؟
ج نعم يصح بيعه لوجود الغرض الصحيح وهو التلذذ ولا ينسأ لمصوتها. قال في عانة

tetapi Imam Syafi'i dalam qoul Jadid menganggap tidak sah !

Keterangan : Dalam Kitab syarh Sullamut Taufiq bab "Riba".

31. S. Bagaimana pendapat Mu'tamar terhadap orang yang membeli barang seharga Rp. 0,50 (setengah rupiah) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) kemudian ia menerima barang dengan pengembalian Rp. 0,50, sah-kah jual beli tersebut atau tidak ? Karena menyerupai jual-beli "Muddu-ujwah" (campuran).
J. Jual-beli tersebut hukumnya sah! menurut pendapat Imam Syafi'i dan sebagian Ulama Maliki.

Keterangan : Dalam Kitab Syamsul-Isyroq karangan Imam Ali al-Maliki.

32. S. Sahkah jual-beli petasan (mercon - jw.) untuk merayakan hari Raya atau Penganten dan lain-lain sebagainya ?
J. Jual-beli tersebut hukumnya sah ! karena ada maksud baik, ialah :

المطالبين في باب الحجر مانعته: وأما صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطعم والملابس والهدايا التي لا تليق به فليس بتبذير (قوله فليس بتبذير) أي على الأصح لأن له في ذلك غرضاً صحيحاً وهو الثواب أو التلذذ ذموم ثم قالوا: لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. وفي الباجوري في كتاب البيوع مانعته: (بيع عين مشاهدة) أي حاضرة (نجائز) إذا وجدت الشروط من كون المبيع طاهرًا منتقاهً مقدورًا على تسليمه للعاقدة عليه ولاية وفي الجمل على فتح الوهاب في باب البيع مانعته: والحق في التعليل أنه (أي اللذان) منبفع به في الوجه الذي يشتري له وهو شربه اذ هو من الباحات لعدم قيام دليل على حرمة قطعها انتفاعاً به في وجه مباح. ولعل ما في حاشية الشيخ منبني على حرمة وعليه في فرق بين القليل والكثير كما علم بما ذكرناه فليراجع امر. رشيدى على م ر و عبارة شيخه امي ش علم ر فائدة وقع السؤال في الدرر عن الدخان المعروف في زماننا هل يمتح بيعه ام لا والجواب عنه الصحة لانه طاهر منتفع به كسحقين الماء ونحوه كالنظليل به امر.

٣٢ ما قولكم فيمن لبس البنطلون وكراثة (داسي) مع القنطرة والبرنيطة وهو من ابناء جاوا فهل يحرم ذلك للتشبه بالكفار اولاً؟

ج اذا قصد بلبسه ذلك التشبه بالكفار في شعار كفه فقد كفر قطعاً. وفي شعار اليد مع قطع النظر عن الكفر ايخر ولكنه ياتم. وان لم يقصد التشبه بهم اصلاً ورأساً فلا شيء عليه بكنهه مكروه كما ذكره في التاوس الكبرى وبغية المسترشدين في باب الردة مانعته: (مسألة ٥) حاصل ما ذكره العلماء في الترتي بزعم الكفار انه اما ان يترقي بزعم مبالاة انديهم وقاصداً التشبه بهم في شعار الكفار ويمشئ معهم الى معتقداً تم

adanya perasaan gembira menggembirakan hati dengan suara petasan itu.

Keterangan : Dalam Kitab 'I'anatut Tholibien bab "Pembekuan harta"

33. S. Bagaimana pendapat Mu'tamar, tentang orang yang memakai celana panjang, dasi sepatu dan topi ? sedang orang itu orang Indonesia, haramkah demikian itu, karena dianggap meniru orang kafir ?

J. Apabila memakainya itu sengaja meniru orang kafir untuk turut menyemarakkan kekafirannya, maka hukumnya orang itu menjadi kafir (dengan pasti). Apa bila sengaja orang tersebut turut me-

Keputusan Muktamar II NU

Tentang Hukum Memakai Celana Panjang, Dasi, Sepatu dan Topi

Sumber: Abu Hamdan Abdul Jalil Hamid, *Ahkām al-Fuqahā' fi al-Mu'tamarāt Nahdatul 'Ulamā'*, Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah dalam Muktamar NU ke 1 s/d 15. Semarang : CV Toha Putra, tt.

والمؤتمر الثاني

٢٥

مقررات المسائل

المطالين في باب الحجر مانعته: واما صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس والهدايا التي لا تليق به فليس بتبذير (قوله فليس بتبذير) اى على الاصح لان له في ذلك غرضا صحيحا وهو الثواب والتلذذ وهو من ثم قالوا: لا اسراف في الخير ولاخير في الاسراف. وفي الباجوري في كتاب البيوع مانعته: (بيع عين مشاهدة) اى حاضرة (بخائز) اذا وجدت الشروط من كون المبيع طاهرا متفقا به مقدورا على تسليمه للعاقدة عليه ولاية وفي الجمل على فتح الوهاب في باب البيع مانعته: والحق في التعليل انه (اى الدخان) منتفع به في الوجه الذي يشتري له وهو شربه اذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمة تعامله انتفاع به في وجه مباح. ولعل ما في حاشية الشيخ مبنى على حرمة وعليه في فرق بين القليل والكثير كما علم بما ذكرناه فليراجع امر. رشيدى على ر و عبارة شيخه اى ع ش على م ر فائدة وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يمتنع بيعه ام لا والجواب عنه الصحة لانه طاهر منتفع به كسخين الماء ونحوه كالانظليل به امر.

٣٣ ← ما قولكم فيمن لبس البنطلون وكرا فتة (داسى) مع القنطرة والبرنيطة وهو من ابناء جاوا فهل يحرم ذلك للتشبهه بالكفار اولا؟

ج اذا قصد بلبسه ذلك التشبهه بالكفار في شعار كفه فقد كفر قطعاً. او في شعار العيد مع قطع النظر عن الكفر والكفر ولكنه ياتم. وان لم يقصد التشبهه بهم اصلاً ورأساً فلا شيء عليه لكنه مكروه كما ذكره في الفتاوى الكبرى وبغية المسترشدين في باب الردة مانعتهما: (مسألة) حاصن ما ذكره العلماء في التزني بزينة الكفار انه اما ان يتزني بزينة مبالاً الى دينهم وقام هذا التشبهه بهم في شعار الكفار ويمشى معهم الى متعباتهم

adanya perasaan gembira menggembirakan hati dengan suara petasan itu.

Keterangan : Dalam Kitab 'I'anatut Tholibien bab "Pembekuan harta".

→ 33. S. Bagaimana pendapat Mu'tamar, tentang orang yang memakai celana panjang, dasi sepatu dan topi ? sedang orang itu orang Indonesia, haramkah demikian itu, karena dianggap meniru orang kafir ?

J. Apabila memakainya itu sengaja meniru orang kafir untuk turut menyemarakan kekafirannya, maka hukumnya orang itu menjadi kafir (dengan pasti). Apa bila sengaja orang tersebut turut me-

فيكون بذلك فيها، وأما ان لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعار العيد او التوصل الى معاملته جائزة معهم فيأثم وأما ان يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في العتلاة .

٢٤ ما حكم استعمال ريش القلم من الذهب فهل يحرم اولا ؟ .

ج تم يحرم استعماله لانه من الاواني كالمرود . فيحرم استعماله على مذهب الشافعي وعند الحنفية قول بجوازه . فعلى من ابتلى به تغليظك ليتخلص عن الحرمة . وفي الباجوري على فتح القريب في فصل الآتية مانعه : (ولا يجوز) في غير ضرورة لرجل وامرأة (استعمال) شئ من (اواني الذهب والفضة) وعند الحنفية قول بجواز طروف القهوه . وان كان المعتمد عندهم الحرمة . فينبغي لمن ابتلى بشئ من ذلك كما يقع كثيرا تقليد ما تقدم ليتخلص من الحرمة (قوله في غير ضرورة) فان دعت ضرورة الى استعمال ذلك لمرود بحسب الميم من ذهب او فضة يحتمل به لاجلاء غينه اه .

٢٥ هل يجوز لمن يسعي لطلب التبرعات لنحو اقامة المسجد او المدرسة او اطعام الفقراء او الايتام اخذ شئ لنفسه من تلك التبرعات اولا ؟

nyemarakkan Hari Raya dengan tidak mengingat kekafirannya, maka hukumnya tidak kafir, tetapi berdosa. Apa bila tidak sengaja meniru sama sekali, tetapi hanya sekedar berpakaian demikian, maka hukumnya tidak terlarang tetapi makruh.

Keterangan : Dalam kitab Fatawil-Kubro dan Kitab Bughyatul-Mustarsyidien bab "Murtad".

34. S. Bagaimana hukumnya memakai pen dari emas ? Haramkah atau tidak ?

J. Hukumnya memakai pen dari emas Haram ! karena termasuk larangan memakai bejana dari emas; seperti tempat celak (mirwad) demikian ini menurut madzhab Syafi'i, tetapi dalam madzhab Hanafi, terdapat pendapat yang memperbolehkannya, oleh karenanya, para pemakai supaya mengikuti pendapat tersebut (madzhab Hanafi) supaya terhindar dari hukum haram.

Keterangan : Dalam kitab Bajuri ala Fatchil Qorieb Fasaf "Bejana" (Aaniyah).

35. S. Bolehkah orang yang memungut derma untuk mendirikan masjid, madrasah atau untuk bantuan kepada Faqir-miskin dan Yatim, mengambil sebagian untuk dirinya sendiri ?

Keputusan Mukhtar VI NU
Tentang Hukum Menyuntik Mayat

Sumber: Soeara Nahdotoel Oelama, th. III, Syawwal 1350 H

(سوارا نهضة العلماء) ١٧٠

موندوت كيتج كتاب نهاية المحتاج جز ٢ ص (١٥٩) لن مرشد الانام جز ٢ ص (٤٠٤) بن اخانة الطالبين
جز ٢ ص (١٣٥) هيج قوتوسان كاليه قونيك ائكئف لئكاه دادوس مندر الماخه فائجئفان ايئون الرئيس
كياهي هاشم تيو ايرغ جز مياغ. (١٣٥) هيج قوتوسان كاليه قونيك ائكئف لئكاه دادوس مندر الماخه فائجئفان ايئون الرئيس
مسئلة باني ذئفئف كاليه ائكئف سئوئكئف فئجاه كادوس قوندي اعئكئفئفون ميارا مؤئر نهضة العلماء قوتوس
مناوي كوزغاع كانيه سرتا بونن باهائي فائغ ائكئف كساغ مؤغكا واجئف موقوع مناوي باهائي مؤغكا بونن
كئفئف دئفون قوتوع فائغئف واجب مولا سارا ائكئف ساكوزغاعئفون اشكئف مئكئا سدوسئف غولسي
بالائي سلاجف دئفون جار اكن مر بظلي بين سئفون مر بظلي لاجف قوندي ٢ كغ مر بظلي واجب دئفون
قندم مكائن واهو موندوت كيتج كتاب بحريئف فئج الوهاب جز اول ص (٤٥٢).
مسئلة حكوم ايئون بوتئف فئغ فئجاه مؤئر نهضة مؤتوس بوتئف مئف مكائن واهو حرام مئتوروت
كتاب مؤهبة ذئ الفضل جز ثاني ص (٤٠٩) كوزغكرئف نهضة مؤتوس واجب اتاس كئئا سدايا بونن
فائغ قاهر رتاه اغ ائجالي كاووشئان مكائن واهو
مسئلة نقا علة ايئون اغ فائفئف كوزغاروه وبرايم الحاصل ابئ كوز بونن وادم عايه السلام ابئ شوري
نهضة مؤتوس ميلا مكائن مكائن هامركئ مئكئا مئتوروت آية (بئة ايكم ابرايم الابه) موندوت كئفئف فئسئر
بئضاوي جز رابع ص (٢١) اعءالم فئسئر آية وما جعل عليكم في الدين من حرج الاية مئسئر
مسئلة ماغان وونن اغ مئجد كغ سرتا كئجر قونيك كئفئف قونقا بونن كوزغكرئف نهضة مؤتوس (ماغان)
ونن مئجد سكاللا امواغئ ساه سائبي بالوغ اغ واهو مئجد مئكئا وونن فئصئل ايئون مناوي هاندوكئئاكن
اغ كئفونئ فئغ مئكئا حرام مناوي بونن هاعئكئواكن مؤغكا خلاف الاولى موندوت كئفئف كتاب فئاوي
صالح الرئس عن ابئ الهادي فئ باب احكام المساجد مناوي كئجر فائقا سئجا مؤغكا فائغ اوقامئ واهو
كئجر فائتوس هاعئكئواكن مؤغكا واجب هامرئفئف دادوس فائغ فئافئفون موندوت كئفئف فئاوي
صالح فائجف واهو سها كئفئف كتاب فئاوي النورئ ص (٢٠١) سها اغ اعئكاف مئف اعئكاف مئف (٣٠٨)
(٧) مسئلة نقا كئفئف هاندوغا فئعئف دئا كغ واردة اغ القرآن اعئالم قركاوتئف كغ بونن كوزغاع حاصل ايئون اعئالم
دئا اعءالم عاده كادوس (اللهم انزل علينا مائدة من السماء) اتوي مئجئل اعءالم علة ابئ اعئالم شرع
كادوس (رب ارزقنا من السماء) موهوغ فئجا دوغا اوقامئ كئفئف نقا اعئال كئجر ابئ ماهدوس اوقامئ بونن
اعئال كئجر ابئ ماهدوس اوقامئ كئفئف نقا هاندوغا فئعئف واهو دوشا كلايئ فئجا ماهدوس
القران كرائئف فئفالي فئفلامئ ماهدوس القرآن نقا هاندوغا كايان دوشا داهه فئ فئسهاك كغ بونن مئجئل
اغ قونيك سؤال مؤئر نهضة العلماء جواب كادوس مكائن بونن فئفئف هاندوغا كلايئ كغ كوارد اغ
القران واهو مناوي ماغئا حاصلئف ائكئف دئفون سونن وونن هيج فئفئف كغ زاهو قركاوتئف مئجئل
حاصلئفون عقلا او سرتا او عاده مناوي هاندوغا فئعئف واهو دئا مئصود ماهدوس قران مازون مؤغكا
كئفئف لن اعئال كئجر ابئ ماهدوس القرآن لن واهو دئا مئصود ماهدوس القرآن لاغكو
اوقامئ كانيه فئغ فئعئف (فئعئف فئسهاك) اعءالم كغ بونن مئجئل مكائن واهو موندوت كئفئف
حاشئف الصاري جز اول ص (٢٧٤) فئ فئسئر قوله تعالى (اتقوا الله) الاية ان صئتاب اعئال السادة الفئف

Keputusan Mukhtamar VIII NU

Tentang Zakat Ikan dalam Tambak

Sumber: Abu Hamdan Abdul Jalil Hamid, *Ahkām al-Fuqahā' fi al-Mu'amarāt Nahdatul 'Ulamā'*,
Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah dalam Mukhtamar NU ke 1 s/d 15 (Semarang : CV Toha
Putra, tt.).

في الموتر الثامن

11

مقدمات المسائل

137 ← ما قولكم فيمن ربي السمك في بركته (تباك) واعتادانه باعه
مرتين في السنة فكيف يؤدي زكاته؟ هل يؤدي مثل زكاة
الزروع او مثل زكاة التجارة؟ (دمك)
ج ان نوى في وقت شراء اولاد السمك والبركة التجارة بان قصد
بيعها بربح فيجب عليه زكاة التجارة عند احوال. فان كانت البركة
مملوكة له او مستأجرة ويشترى اولاد السمك بنية التجارة فيؤدي
زكاة تجارة السمك فقط. قال الجهل على فتح الوهاب في بكرة
الثاني في باب الزكاة (1) مانصه: والواجب (فيما ملك
بمعاوضة) مقرونة (بنية تجارة) وان يجدها في كل تصرف
(كشراء واصداق) وهبة بثواب واكتراء لا اقالة ورد بعيب
وهبة بلا ثواب واحتطاب لا نفاء المعاوضة (ربيع عشر

→ 137 S : Bagaimana pendapatmu sekalian, atas hukumnya orang memelihara ikan dalam tambak (kolam) kebiasaan diambil dua kali setahun, maka bagaimana caranya memberikan zakatnya ? (Demak).

Jaw. : Kalau sewaktu membeli bibit ikan dan tambaknya untuk berdagang, yakni sengaja akan dijual lagi dengan keuntungan, maka kewajiban memberikan zakat-perdagangan itu, dalam akhir tahun, kalau membelinya kolam itu untuk dimiliki atau menyewa dan membelinya bibit ikan itu untuk berdagang maka hanya berkewajiban membayar zakat Tijarahnya ikan saja dalam akhir tahun (terhitung mulai membeli bibit).

Keterangan dari Kitab Jamal Fatkhul Wahhab J. II Bab zakat dan Syarwani-Tukhfah J. III.

Tidak diragukan lagi dalam masalah ini, bahwa yang diperdagangkan adalah bibit ikan itu, bukan keturunannya.

Sedang ikan itu, bukan termasuk barang yang wajib di Zakati seperti padi dll. (Penulis).

قيمتها) وفي الجزء الثالث من الشرواني على التحفة (٢) مانصه
 وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بعروضه
 (قوله إذا اقترنت نيتها) أي نية التجارة بهذا العرض يكسب ذلك
 العرض وتملكه بعروضه. وتقدم أيضاً أن التجارة تقلب
 المال بالتمرف فيه بنحو البيع لطلب النماء. فتبين بذلك أن
 البذر المشتري بنية أن يُزرع ثم يجر ما ينبت ويحصل منه كبذر
 البقم لا يكون عرضاً لتجارة لاهو ولا ما يُنبت منه إلى أن قال:
 ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس
 بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشتري لا بما ينشأ
 منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك إلى أن قال: فالججارة
 هناك أيضاً بعين المشتري لا بما هو ناشئ منه بخلاف البذر
 المذكور اهـ.

ولا يخفى أن التجارة في هذه المسألة بعين اولاد السمك لا بما
 ينشأ منها وليست هي من الاموال الزكوية. فزكاتها زكاة التجارة
 لا غير اهـ. الكاتب

١٣٨ ما المراد بالامن في حديث من مات يوم الجمعة اوليلتها امن
 من عذاب القبر هل أمنه من العذاب في يوم الجمعة فحسب
 اوالى يوم القيامة؟ (فكالوشن)

138 S : Apa yang diartikan aman dalam Hadis yang artinya : siapa yang meninggal dunia pada hari Jum'at maka ia aman dari siksa Qubur. Apakah amannya itu hanya pada hari Jum'at itu ? ataukah sampai hari Qiamat ? (Fekalongan).

Keputusan Munas Alim Ulama NU tanggal 15-17 Nopember 1987

Tentang Zakat Peternakan Bandeng, Perkebunan Tebu dan Usaha Perhotelan

Sumber: Panitia Penyelenggara MUNAS dan Konbes NU, *Keputusan Munas Alim Ulama NU*

(Jakarta: Panitia Penyelenggara MUNAS dan Konbes NU, tt.)

(2)

Wajibkan zakat hasil Peternakan? , kalau wajib, kapan dia wajib mengeluarkan zakatnya? dan kalau tidak wajib, dapatkan dicontohkan peternakan hewan bukan zakawi yang memenuhi syarat-syarat tijaroh?

Jawab : " Tidak wajib zakat, sebab tidak memenuhi persyaratan zakat tijaroh.

Adapun contoh peternakan hewan bukan zakawi tetapi wajib zakat ialah peternakan bandeng yang sengaja diperdagangkan dan memenuhi syarat-syarat yang lain.

Keterangan dari kitab :

المترتب ب. ج. ١ ص ١٥٩ مائنه : ولا يصير العرض للتجارة الا بشرط
احدهما ان يملكه بفسد يجب فيه البيع ، كالبيع والاجارة والتملك
والخلق ، والثاني ان ينوي عند العقد ان يملكه للتجارة ،
وكذا في اقسام الصغراء ج. ٢ ص ١٣ ، وج ٣ ص ٢١ ، وفي احمد
ص ٢١ - ٢٩ مائنه : مسألة : افاد ايضا ان مذهب ابن حنبل
مرجوب الزكاة في كل ما فرج من الارض الا طبيا او قصبا او
حشيشا ولا يصير نصا ، وعند الامام احمد فيما يقبل او يرد
او يد فر للتجارة ، ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعي . ومثله
في تحفة المحتاج ج. ٢ ص ١٩٥ .

orang yang menanam tebu disawah dengan tujuan kalau sudah sampai waktu panen, maka tebut-tebut itu akan dijual semua, dan hasil penjualannya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Setelah tebu berumur 18 bulan, ditebang dan dijual semua. Hasil penjualan tebu itu mencapai uang senilai setengah kg gram mas. Maka kewajiban orang ini membayar zakat hasil penjualan tebu itu? Apakah alasannya? Kalau tidak wajib, dapatkan dicontohkan penanaman tanaman yang bukan zakawi yang memenuhi syarat-syarat tijaroh?

Jawab : " Tidak wajib zakat, karena tidak memenuhi persyaratan tijaroh.

Adapun contoh tanaman bukan zakawi tetapi wajib zakat ialah tebu perkebunan tebu

Keterangan dari Kitab :

بشر الكريم ج ٤ ص ٥٠ ونصه ومروي ابو داود باخراج الصيغة ما نصه
ليس اه . وفي العناوين المدينة ج ٢ ص ٩٥ ما نصه : وقد مررتنا ان ما
لازكاة في عينه يجب فيه زكاة التجارة من الخبز والخبز والارض
اذ ليس في هذه المذكورات زكاة عين . وما لا زكاة في عينه يجب فيه
زكاة التجارة اه .

3.c. Apakah wajib zakat usaha perniagaan modern yang bergerak didalam, bidang jasa seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya ?

Jawab : " Tidak wajib zakat "

Adapun contoh perhotelan dan sesamanya yang wajib zakat ialah perhotelan yang hasil usahanya pertahun telah memenuhi persyaratan tijarah.

Keterangan dari Kitab :

كفاية الاخبار ج ١ ص ١٧٨ وعبارته :
يلزم اهر الشخص ماله او نفسه وقصد بالاجرة اذا كانت عرضا للتجارة
تصير مال تجارة ، لان الاجارة مباحة . ومثله ما في التخت ج ٣ ص ٩٤
من الطهنية ج ٤ ص ٣١ والجموع شرح الطهنية ج ٦ ص ٤٩ وعبارته : ومن
اهر نفسه او شخصيا افر بغيره من العروض بقصد التجارة صار ذلك العرض
مال تجارة فيجب الزكاة .

3. Bagaimana pendapat musyawarah mengenai orang-orang yang hampir selalu musafir, dan orang-orang yang mempunyai dua tiga tempat tinggal yang berjauhan dan sama-sama ditinggali, hubungannya dengan ruhsotus safar.?

Jawab : a. orang yang selalu musafir tersebut dalam ruhsot mengqosor sholat, hukumnya lebih utama itmam (tidak mengqoshor)

Adapun didalam ruhsot ifthor (tidak puasa), apabila ada harapan dapat mengqodlo puasanya dihari lain, maka boleh ifthor. Dan apabila tidak, maka tidak boleh ifthor. Demikianlah pendapat Imam Subki yang didukung oleh Imam Romly. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar Al Haitami, boleh ifthor secara mutlak.

b. Orang yang mempunyai dua tempat atau lebih yang berjauhan apabila sedang berada di tempat tinggal yang mana saja hukumnya sama dengan orang yang mukim, karena dia tinggal di rumah sendiri. Adapun jika pergi dari tempat tinggal yang satu ke tempat tinggal yang lain, selama dia dalam perjalanan termasuk musafir / "munsyi'us safar" yang berarti boleh melaksanakan "rukhsah safar", namun untuk meninggalkan shalat Jum'ah dan berbuka puasa masih disyaratkan keluar dari batas desanya sebelum fajar.

Keterangan dari kitab:

١- الباهر ج ١ / ٢٠١ ما نصه : وخرج بقولنا
ولم يختلف في جواز قصره من اختلاف في جواز قصره كطلاق يسافر
في البحر ومعه عياله في سفينة ومن يديم السفر طلقا كالساعي فان
الاصل افضل له فخرجها من خلاف من اوجبها كالامام احمد رضي الله عنه
٢- كتاب التخت ج ٣ ص ٤٣٠ وعبارته : وقال السبكي حقا ولا
اي لا يجوز الاظهار له

Keputusan Mukhtamar XXVIII NU

Tentang Tidak Dapat Dikembangkannya *Mal Zakawi*

Sumber: PBNU, Hasil-hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-28 (Jakarta : PBNU, tt.)

مقرر بئز او تربية يتيم - اهـ .

٢- الجامع لاحكام القران للقرطبي الجزء ١٦ الصفحة ٣١٣ :
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود . قال الزجاج : المعنى
اوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضهم على بعض اهـ .

→ Masalah 8.

Dapatkah *Mal Zakawi* itu dikembangkan macam-macamnya mengingat sekarang ini lapangan usaha ekonomi semakin luas?

Hasil pembahasan :

Sesuai dengan ketentuan Kutubul Fiqh, maka *Mal Zakawi* tidak dapat dikembangkan macam-macamnya, kecuali dengan cara menjadikan tijaroh,

Pengambilan dalil antara lain dari :

١- فتح الوهاب الجزء الاول الصفحة ١١٢ :
والواجب فيما ملك بمعاوضة مقرونة بنية تجارة وان
لم يجددها في كل تصرف كسراء واصدق وهبة بثواب
واكتراء لا كاقالة ورد بعيب وهبة بلا ثواب واحتطاب
لاتقاء المعاوضة ربع عشر قيمته - اهـ .

٢- المذهب الجزء الاول الصفحة ١٤٠
ومن وجبت عليه الزكاة وقد رعى اخراجها لم يجز تأخيرها
لانه حق يجب صرفه الى الادى توجهت المطالبة
بالدفع اليه فلم يجز له التأخير . كالوديعة اذا طالب
صاحبه فان اخرها وهو قادر على ادائها ضمنها .

﴿ قوتوسان كوڤكريس نهضة العلماء كا ١٠ ﴾

١٢

ثمانية ايام . فامر بعض العلماء لورثته ان يخرج الفدية لاجله قدر اربعين مدا . لانه يتركها في ثمانية ايام . فقال بعض العلماء الاخر لا تفعل كذلك بل من حين بلوغه الى موته قلت فاي الفريقين احق ؟ بينوا لنا جوابا شافيا لانه قد اشترت الخالفة بين العلماء بفكالووغان حتى كاد بينهم المحاربة .

(جواب دارى مسئلة كادوا)

كوڤكريس بموتوسكن بهوا يع بتول ، يا ايتو فريتاهبا علماء يع فرتما ذالم سؤال ترسبوت . معميل كتراعان ذاري كتاب اعانة الطالبين جز ثاني صحيفة ٢٣٩ نصه وفي وجه عليه كثيرون من اصحابنا الخ .

اذافون فريتاهبا علماء يع كاذوا ذالم ابني سؤال . مك ايتو سلام . (ميدا بتول)

(مسئلة كايسكا)

كان بعض التجار بفكالووغان وهو يا كل الطعام في نهار رمضان فسئله رجل لم لم تصم في هذا اليوم العظيم . فقال كيف ان اصوم وعندي اشياء كثيرة من المسأكل والمشارب والصوم عنى من لم يرشينا عنده من الطعام ، قلت وهل القائل بذلك من الماندين

١ افايلا ايتو اوراغ مياقيسكن اتواظن . بهوا ايا ميذا مفويائي قضاء مك حرامله نية قضاء يع سديميكيان ايتو تهادى .

٢ افايلا ايتو اوراغ اذا شك بهوا ايا مفويائي قضاء . مك ايتو اذا خلاف . سكو لوغان علماء ميبلاغ صح ذان او تما . ذان سكو لوغان ميبلاغ ميذا صح .

٣ تتافى افايلا ايا يقين . اتواظن مفويائي قضاء ذعن مفريط (بلاعذر) مك واجب له ايانية قضاء .

اذافون افتايا ايتو كياى يع ترسبوت ذالم سؤال . مك جيكا ميتوروت ابني تفصيل ، بنارله افتايا . سياليكيا افايلا ميذا ميتوروة ابني تفصيل ، مك ماله .

معميل كتراعان ذارى كتاب بغية المسترشدين . صحيفة ٣٦ مسئلة ك . نصه شك في فوائت الخ ذان فتاوى لبرى جز ٢ صحيفة ٨٩ ونصه فيهدنا يعلم ان الافضل الخ ذان منهاج القويم كردي جز ٢ صحيفة ١٥٢ ونصه وتجب المبادرة وموالاته ان افطر بغير عذر . ذان موهبة ذى الفضل جز ٢ صحيفة ٧٤ نصه لانه تعاطي عبادة فاسدة الخ .

(مسئلة كادوا) ←

Keputusan Munas Alim Ulama NU tanggal 30 Agustus 1981

Tentang Memulai Ihram dari Jeddah

Sumber: K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP RMI dan

Dinamika Press, 1997).

بعوض من العروض بقصد التجارة صار ذلك العوض مال تجارة
فتجب الزكاة .

وفي بغية المسترشدين ما فضله :

ان العرض كل ما قابل التقدين . اهـ . والله اعلم

339. S. *Bagaimana yang berlaku secara umum dibidang keuangan dengan digantikannya peranan uang emas/perak oleh uang kertas, cek, obligasi, saham-saham perusahaan dan macam-macam kertas berharga?*

J. Uang kertas, cek, obligasi, saham-saham perusahaan dan sesamanya, apabila telah mencapai seharga emas satu nishab dan telah haul, maka wajib zakat seperti emas.-

Keterangan kitab:

1. Ahkamul Fuqoha' I/57.
2. Al Mauhibah IV/
3. Al Fiqih 'alal madzhibil 'arba'ah I/605.

في احكام الفقهاء ج اص ٥٧ ، مسألة رقم ٩٠ - وفي الترمذي ج ٤ -
ومثله ما في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ١/٦٠٥ وعبارته:
جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الاراق المالية ، لانها حلت
بمحل الذهب والفضة في التعامل . اهـ .

→ 340. S. *Orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji melalui Jeddah yang akan langsung menuju Mekkah, apabila mereka memulai ikhramnya dari Jeddah, apakah terkena wajib membayar dam bagi mereka?*

J. Mengingat bahwa lapangan terbang Jeddah dimana jama'ah haji Indonesia mendarat, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai miqat, maka apabila para jama'ah haji Indonesia (yang

berangkat pada hari-hari terakhir) akan langsung menuju Mekkah, hendaknya mereka melakukan niat ihramnya pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qornul Manaazil atau daerah Yalamlam atau miqat-miqat yang lain (yaitu setelah mereka mendapat penjelasan dari petugas pesawat udara yang bersangkutan). Untuk memudahkan pelaksanaannya, dianjurkan agar para jama'ah memakai pakaian ihramnya sejak dari lapangan terbang Indonesia tanpa niat terlebih dahulu. Kemudian niat ihram baru dilakukan pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qornul Manaazil atau Yalamlam. Tetapi kalau para jama'ah ingin sekaligus niat ihram dari Indonesia, itupun diperbolehkan.

Keterangan dari kitab:

1. Al Muhadzdzab I/303.
2. Al Majmu' VII/178.

المهذب ج ٣٢ وعبارته ،

(فصل) ومن كانت داره فوق الميقات ، فله ان يحرم من الميقات وله ان يحرم من فوق الميقات . اهـ . وهكذا ما افتاه النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب ج ٧ ص ١٧٨ ، وعبارته :
 واما اذا اتى من ناحية ولم يحرم ميقات ولا حاذه (اي كما في القليوبي)
 فقال اصحابنا لزمه ان يحرم على مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل
 عمر رضي الله عنه في توقيته ذات عرق .

341. S. Bagaimana hukumnya pemotongan hewan dengan mesin?

J. Hukumnya pemotongan hewan dengan mesin adalah halal, kalau mesin dan cara pemotongannya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pemotongnya seorang muslim.
- b. Alat mesin yang dipergunakan untuk penyembelihan tersebut memenuhi syarat-syarat penyembelihan syar'i.

Keputusan Mukhtamar II NU

Tentang Hukum "Bunga" Gadai

Sumber: Abu Hamdan Abdul Jalil Hamid, *Ahkām al-Fuqahā' fī al-Mu'amarāt Nahdlatul 'Ulama'*,

Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah dalam Mukhtamar NU ke 1 s/d 15. Semarang : CV Toha

Putra, tt.

والمؤتمر الثاني

٢٢

مقررات المسائل

المؤتمر الثاني الذي عقد في مدينة سورابايا بتاريخ ١٢ ربيع الثاني ١٣٤١ هـ (١٩ أكتوبر - ١٩٦٧ م) ما قولكم في رهنه يتفق بالرهون كما اذا كان نحو بستان اخذ المرتهن غلته من غير شرط في صلب العقد غير ان ذلك امان ان يكون على عادة او بشرط قبل العقد او بكتوب بدون قرأه وقت العقد فهل يكون ذلك داخلا في الربا المأجور عنه او لا؟
ج. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال: قيل انه حرام لانه داخل في قرضه نفعاً وقيل انه حلال لعدم الشرط في صلب العقد او في مجلس الخيار والعادة المطردة لا ينزل منزلة الشرط عند الجمهور. وقيل شبهة لاختلاف العلماء فيه. والمؤتمر قرران الاحوط القول الاول وهو المحرم. وفي الاشباه والنظائر في البحث الثالث (٢) ما نقله: ومنها الوعم في الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يبسط الرهن قال الجمهور لا. وقال القفال نعم. وفي عانة الطالبين في باب القرض (٢) ما نقله: وجاز القرض نفعه يصل له من مقررته كره الزائد قدره واصفة والاجود في الردى (بلا شرط) في العقد بل يست ذلك للمقرضين الى ان قال: واما القرض بشرط جرت نفعه لقرض ففاسد لخبر كل قرض جرت نفعه فهو ربا (قرا ففاسد) قال ع ش: ومعلوم ان محض الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد. اما لو توافق ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ

MU'TAMAR NAHDLATUL 'ULAMA KE II DI SURABAYA

(12 Rabiut-Tsani 1346 - 9 Oktober 1927)

- 28. S. Bagaimana hukumnya orang yang menerima gadai dengan mengambil manfa'atnya, misalnya, sebidang tanah yang digadaikan, kemudian diambil hasilnya dengan tanpa syarat pada waktu aqad diadakan demikian itu, baik sudah menjadi kebiasaan atau sebelum aqad mamakai syarat atau dengan perjanjian tertulis, tetapi tidak dibaca pada waktu aqad, hal demikian itu apakah termasuk riba yang terlarang atau tidak ?
- J. Dalam mas'alah ini terdapat tiga pendapat dari para ahli Hukum ('Ulama) :
- a. Haram : sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente).
 - b. Halal : sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sebab menurut ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
 - c. Syubhat : (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli Hukum selisih pendapat.

- ٢٩ ما قولكم فيمن باع بضاعة. وشرط لمشتريه قبل العقد أنه سيشتريه منه بثمن معهود فهل يصح البيع أولا؟ وهل على المشتري الوفاء أولا؟
- ج ان ذلك البيع صحيح ما لم يكن الشرط في سلب العقد ولا في مجلس الخيار. وعلى المشتري وفاء ما التزمه. وهو المسمى بيع العهدة. قال في ترشيح المستفيدين في باب البيع (٤) تنبيه اعلم ان بيع العهدة الشهير بحضور موت العرف في مكة المكرمة يبيع الناس وبيع عدة وامانة صحيح اذا جرى من مطلق الثمرف في ماله ولم يذكر الوعد فيه في نفس العقد ولا ذكر بعدك في زمن الخيار. وموزنه كما في فتاوى حج. ان يتفقا على بيع عين بدون قيمتها على ان انبائع متى جاء بالثمن ردة المشتري عليه مبيعه واخذ ثمنه ثم يعقدن على ذلك من غير ان يشترطاه في سلب العقد الى ان قال وان موقع خارج العقد لزم المشتري ما التزمه ووعد به ويجب عليه عند دفع البائع الثمن في الوقت المشروط ايقاع الفسخ وقبض الثمن اهـ.
- ٣٠ ما قولكم فيمن اشترى شيئا لايأه قبل العقد كاللبن في انائه والبصل في الارض والتزجيل في قشرته العليا فهل يصح البيع أولا؟
- ج اختلف العلماء في صحة ذلك البيع قيل انه صحيح وعليه الاثمة الثلاثة وقيل لا. وهو

Adapun Mu'tamar memutuskan, bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama (haram).

Keterangan : Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab Asybah wan Nadho'ir dalam pembahasan ke-tiga.

29. S. Bagaimana pendapat Mu'tamar tentang jual beli "sende" iaiah : Menjual barang dengan perjanjian sebelum aqad, bahwa barang tersebut akan dibeli lagi dengan harga tertentu, sahkah atau tidak jual beli semacam ini ? dan wajibkah pembeli menepati janji ?
- J. Jual beli tersebut hukumnya sah ! asal perjanjian tersebut tidak dalam 'aqad atau tidak didalam majlis-khiyar, dan bagi pembeli wajib menepati janji dan jual beli tersebut namanya "bai'ul-'uhdah" (jual-beli dengan janji).
- Keterangan : Dalam Kitab Tarsyikhul Mustafiqien bab "Jual-Beli".
30. S. Bagaimana pendapat Mu'tamar tentang membeci barang yang belum diketahui sebelum 'aqad, seperti : Meik dalam kaleng, berambang dalam tanah, kelapa dalam sabutnya, sah-kah juai-beli semacam itu atau tidak ?
- J. Jual-beli tersebut sah ! menurut Imam Syaifi, Maliki dan Hanafi,

Keputusan Muktamar XII NU

Tentang Hukum Bunga Bank

Sumber: Ahmad Abdul Hamid Kendal, Peotoesan Congres Djam 'iyyah Nahdloetoel 'Oelama'

Kaping 12. Koedoes: T.B.S., 1938.

مسألة نومر - ۱۴ -

- ۱۶ -

«جواب» واهو تباع ضال مضل (سار تور سارا کی)

(فونڈوتان) تنویر القلوب ۴۳ نصہ: ومن لم یقلد واحدا منهم الخ

(۱۳- سوال) تباع غلبتا کی اُرتا وونتن باع اِیع ووصنا منیکا اُرتا دیفون

تاریک فاجک فنداملان. جاران واهو اُرتا تنو فیکاتو کاوتوغن رینتن. فونفا

کیغیع موندوت رینتن کشکی بیار فاجکیفون لن فونفا کیغیع غلبتا کی اُرتا

وونتن واهو باع فرلو انجا کی کامنان؟ *جبر*

«جواب» دینیع حکمیفون غلبتا کی اُرتا اِیع باع. منیکا کدوس حکمی

گادے (مسألة نومر ۱) تکسی وونتن قول تیککا: حلال، حرام، شبهہ. نوع

کو عریس میلیہ اِیعکع حرام.

(فونڈوتان) کدوس فونڈوتانی مسألة نومر ۱.

(۱۴) (سوال) جاریت اِیعکع وونتن کتیبی لاموہ کع معفو. نولی دیفون

اِغشی تباعکع بعد ادوس رسیک (بوتن سنتہ بوتن واجب) منیکا کدوس فونڈی

حکمی کتیبہ اِیعکع نیفیل بدان تلس نفا تاسیہ دیفون معفو؟ کرانتن اِغیل غر کسان

فونفا بوتن معفو؟ کرانتن نیفیل دانغ تلس اِیعکع بوتن کاسو مفریہ شرع *طوبان

جواب

Keputusan Mukhtamar XIV NU

Tentang Hukum "Bunga" Koperasi

Sumber: H.B.N.O., *Verlag-Congres Nahdotoei-' Oelama ' Jang ke-14* (Soerabaia :H.B.N.O.,

1939)

٢٣

قوتوسان كو غنكر يس كا ١٥

ابن عجيل جاهل بمقصود هذه الآية او اشتبه عليه معناها فتونى اياها الموهتمرون بالبيان الواضح. وقد عرضنا هذه المسئلة للمؤتمر العاشر فى صولو ولكن لم يحصل الجواب. (بأغسكالن)

(١٧) الجواب: فتدافتان ابن عجيل بهوا زكاة فطرة ايتو بوليه دي كاسيكن كندا ساوراغ، وجهها كرناماله المسالين دان ساما يادالم آية زكاة، ايتو للجنس، مكا ساوراغ ساجامنجوكونى له ايا منجيا زكاة ايتو، كترافن دارى الميزان للشهرانى ج ٢ ص ١٦. ومن ذلك قول ابى حنيفة، الى ان قال... ووجه الاول المراد بصفة جمع الفقراء فى آية. انما الصدقات للفقراء والمسالين: الجنس، فكل من كان فقيرا اعطى الزكاة ولو كان واحدا.

﴿ باب البيع ﴾

(١٨) بائينا حكما شركة ماسوكن اواغ دالم انديل بيع تيداه برسما اواغنيا انترا ساتو دان لاينت (ادا بيع دغن اواغ ماس. ادا جوگله بيع دغن اواغ فيراك: روفيه ٠١ اوكون دان سباغيا)؟ دان اوفا تيداه افا ادا قول بيع بمبوليهكن؟ (فوروليشكوه).

(١٨) الجواب: ماسوكن واغ بيع برلائينان جنسبا (ماس دغن فيراه) دالم انديل شريكة منوروت مذهب الشافى تيداه صح. كترافن دارى كتاب شرح التحرير بمحاشية الشراوى ج ٢ ص ١١٤ وان يتحد المالان جنسا وصفة بحيث لو خلط لم يتميزا. اداقون قول بيع بمبوليهكن يا ايتو ساله ساتو دارى دوا فتدافتان امام مالك. كترافن دارى بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٤٩: واما ان كان الصفتان مما لايجوز فيهما الباء مثل الشركة بالذاتير من عند احد هما والدرهم من عند الاخر: او بطعامين المختلفين فاختاف فى ذلك قول مالك فأجازه مرة ومنه مرة.

(فوروا كرتنا)

(١٩) بائينا حكما كريديت كو فراسي؟

(١٩) الجواب: مينجم واغداري كوريديت كوونكراسي ابوتوكمبا تفصيل!

(١) جيكا ادا جانجي rente دالم عقد اتو سوداها تئاني سابلومبا تنف، مكا حرام اتفاقا كرنا ماسو ربا .

(٢) جيكا تيداء ادا فرجانجيان سما سكالى بائيڪ دغن فركاتائين اتوتوليسان، مكا هاروس .

(٣) جيكا ادا فرجانجيان تئاني دغن توليسان ساجا، مكا ادا دوا قول:

حرام دان هاروس كترائن داري كتاب فتح الممين ص ٢٠ جز

٣: ومن ربا الفضل ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض غير

نحو رهن لكن لا يحرم عندنا الا اذا شرط في عقده . دان داري صحفة

٢٤ جز ٢ من التحفة: والحاصل ان كل شرط منافع لمقتضى المقدم انما

يبطال ان وقع في صلب المقدم او يمدد وقبل لزومه لا ان تقدم عليه

ونو في مجله دان ص ٥٦ ج ٣ من فتح الممين عامة الطالبين وجاز لمقرض

تقع بصل له من مقرض كرد الزاد قدرا اوصفة والا جود في الرديء .

بلا شرط في المقدم بل يسن ذلك لمقرض لقوله صلى الله عليه وسلم

ان خياركم احسنكم قضاء الى ان قال واما القرض بشرط جر نفع لمقرض

ففساد لجر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضمه بحيثي معناه عن

جمع من الصحابة . ومنه القرض لمن يستاجر ملكه اى مثلا باكثر

من قيمته لاجل القرض ان وقع ذلك شرطا اذ هو حينئذ حرام اجماعا

والا لره عندنا وحرم عند كثير من العلماء قوله ففساد قال ع ش ومعلوم

ان محل الفساد حيث وقع الشرط في طاب المقدم اما لتوافقا على

ذلك ولم يقع شرط في المقدم فلا فساد . دان داري بنية المسترشدين

١٧٦ مسألة ب مذعب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود

والاخبارات والانشائات ليس بحجة شرعية دان الاشياء والمظانر ص ٦١

والعامة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه صور . الى ان

قال - ومنها لوجرت عادة المقترض بردياً يزيد مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم اقراضه ، وجهان اتخمتها لا .

الجلسة الخامسة ليلة الاربعاء ١٧ جمادى الاولى سنة ١٣٥٧

الرئيس فضيلة المحترم الشيخ عبدالله سراج ماقلاغ

الكتاب الاول « الشيخ نحرأوى طاهر مالاغ

الكتاب الثانى « سهل منصور - سيدامرجا

الاعضاء : « الشيخ شعبان سماراغ

الاعضاء : « الشيخ خزيمى فاسوروان

الاعضاء فضيلة المحترم الشيخ رادين كمال قدس

« « « « عباس شربوف

« « « « شاطبي بايوماس

« « « « رادين عبدالله ماقلاغ

« « « « فاضل جياميس

(٢٠) بائيمنا حكما بيع الذمة فادى سرتا مراغبا ، انو تمفة فادى سرتا مراغبا

فولا كما هو المعتاد فى بلدنا الجاوي افاكه صح بيع الذمة دميكيان ايتو ؟ على

المتمدد فى مذهب الامام الشافعى ؟ او فاما تيداء صح افاكه ادا قول يتحصحمكن

ولوفون ضميف ؟ اتودارى - ناله سانوبا المذاهب الاربعة اتوصح كه تمفة

سدميكيان ايتو تقليد للامام النووي اتو تيداء ؟ اوليه كرنا اني مسئله منجادى

خلاف بين العلماء قديما وحديثا فى قطراناموهون كفتا حضرات علماء المؤتمر

الاكبر مومتوسكنيا - بينوا لنا الجواب ولكم الاجر والثواب .

(فسوروان)

Keputusan Konferensi Besar Syuriah NU tanggal 19 Maret 1957

Tentang Hukum Bunga Bank dan Gadai

Sumber: K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997).

صلى الله عليه وسلم مستغنيا عنها ولكن اراد ان تصير سنة للحكام. الى
ان قال المراد بالفتهاء كما قاله جمع من الاصحاب الذين يقبل قولهم في
الافتاء فيدخل الاعى والعبد والمرأة.

- 282. S. Mohon ditinjau kembali sekitar masalah: bank dan gadai yang sudah diputuskan:
- Bagaimana hukumnya bank dan segala bentuk dan macamnya?.
 - Uang rente/bunga yang dipungut oleh bank penggadaian dan lain sebagainya dari orang yang mengebankkan itu bagaimana hukumnya?.
 - Apakah hukumnya seperti NV, CV, Firma dan sebagainya yang mengambil uang bank dengan ditentukan membayar bunganya kepada bank. Dan kalau tidak mau membayarnya, tidak diberinya hutang. Apakah hal yang sedemikian itu telah sampai ke hutang darurat yang memperbolehkan mahdhurat?. Dan apakah tulis menulis dalam perjanjian itu sama dengan lafadh?. (NU Cab. Jambi)
 - Bagaimana hukumnya lotre dengan segala macamnya? (NU Cab. Kota Besar Bandung)
- J. Mengenai a, b, ialah sebagai jawaban Mukhtar NU ke-2 di Surabaya dan Mukhtar NU ke-12 di Malang dan Mukhtar NU ke-14 di Magelang dan Mukhtar NU ke-17 di Madiun tentang masalah gadai, kredit, koperasi dan bank. Sedang masalah c, tidak termasuk qaidah darurat tersebut di atas. Dan jawaban itu terdapat tiga faham yaitu: Pertama faham haram, kedua faham halal dan ketiga faham syubhat. Maka Mukhtar berpendapat bahwa Al Ahwath (berhati-hati) adalah faham yang haram.

Keterangan: a. Dalam kitab I'anatul-Thalibin III/20

b. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj I/24

c. Dalam kitab Bughyatul Mustarsidin 176

d. Dalam kitab Al Asybah Wan Nadhair: 16

Tentang masalah d, yaitu hukum lotre. Lotre adalah bahasa asing yang artinya adalah undian atau qur'ah/yanashib. Adapun hukumnya apabila surat membeli lotre itu didasarkan atas untung atau rugi, maka haram sebab termasuk qimar/judi seperti surat-surat lotre yang biasa.

Sedang lotre yang tidak didasarkan untung atau rugi seperti membeli barang dengan harga mitsil (sepadan) dengan mendapat kupon hadiah yang akan dilotre, atau bershadaqoh untuk mendirikan sesuatu kebaikan, seperti Madrasah, Pondok Pesantren, Masjid dan lain sebagainya dengan mendapat kupon hadiah uang akan di lotre, maka tidak haram, karena tidak termasuk qimar/judi dengan catatan bahwa, barang hadiah yang akan dihadiahkan itu tidak di ambil dari hasil shadaqoh tersebut.

Keterangan: a. Dalam kitab Al-Bajuri II/177

b. Dalam kitab Al Amradl Al Itjima'iyah pagina 391

في الجزء الثالث صحيفة ٢٠ من اعانة الطالبين ونصه : ومن ربا الفضل
ربا القرض وهو كل قرض جرنفعا للمقرض غير مخورهن لكن لا يحرم عندنا الا
اذا شرط في عقده اهـ . وفي الجزء الرابع صحيفة ٤١ من التحفة مانصه ، والماصل
ان كل شرط مناف لمقتضى العقد انما يبطل ان وقع في صلب العقد او بعده
وقبل لزومه لا ان تقدم عليه ولو في مجلسه اهـ .

وفي الجزء الثالث صحيفة ٥٣ من اعانة الطالبين مانصه : وجاز لمقرض نفع
يصل له من مقرض كرد الزائد قدرا او صفة والاجود في الردى بلا شرط في
العقد بل يسن ذلك لمقرض لقوله صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء
الى ان قال - واما القرض بشرط جرنفعا لمقرض ففاسد (قال ع ش ، ومعلوم
ان محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد . اما لو توافقا على ذلك
ولم يقع شرط في العقد فلا فساد) لمخبر كل قرض جرنفعا فهو ربا . وجه

ضعفه بجي معناه عن جمع من العمالة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه اى
مثلا باكثر من قيمته لاجل القرض ان وقع ذلك شرطا اذ هو حينئذ حرام
اجماعا والاكره عندنا وحرام عند كثير من العلماء اه .
وفي الصحيفة ١٧٦ من بغية المسترشدين مانضه :
مسئلة ب. مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود والاخبارات
والانشآت ليس بحجة شرعية اه . وفي الاشباه والنظائر صحيفة ٦١
مانضه : العادة المطردة في نلحية . هل تنزل عادتهم منزلة الشرط ؟
فيه مهور الى ان قال - ومنها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض .
فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم اقراضه ؟ وجهان امحهما لا اه .
في الجزء الثاني من البناجورى ونضه : وهو اى القمار . كل لعب ترد
بين غنم وغرم كاللعب بالورق وغيره .
وفي كتاب الامراض الاجتماعية صحيفة ٢٩١ مانضه : ومن شر القمار شراء
الاوراق المسماة بيانضيب فهى حرام على اللذاهب الاربعة اه .

Keputusan Munas Alim Ulama NU tanggal 15-17 Nopember 1987

Tentang Uang Administrasi Koperasi Simpan Pinjam

Sumber: Panitia Penyelenggara Munas dan Konbes NU, *Keputusan Munas Alim Ulama NU - 1987*

(Jakarta: Panitia Penyelenggara Munas dan Konbes NU, tt.).

6. Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) apakah boleh? Dan apakah uang administrasi termasuk "riba"? Dan apakah wajib zakat?

JAWAB:

1. Modal yang dikumpulkan oleh KOSIPA dari uang "simpanan pokok" dan "simpanan wajib" para anggota koperasi untuk dipinjamkan kepada yang memerlukan pinjaman, tidak dapat memenuhi ketentuan "syirkah" sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, karena:
 - 1.1. Dalam "syirkah" pengumpulan modal itu disyaratkan harus ada lafal yang dapat dirasakan sebagai pemberian izin dalam perdagangan. Sedangkan dalam "kosipa" pengumpulan modal tersebut dimaksudkan untuk dipinjamkan.
 - 1.2. Dalam "syirkah", modal harus sudah terkumpul sebelum dilakukan akad syirkah. Sedangkan dalam "kosipa" biasanya modal baru dikumpulkan sesudah disetujui oleh rapat anggota.

Jadi "akad" pengumpulan modal dalam "kosipa" tersebut tidak sah menurut ketentuan SYARA'.

Dasar Pengambilan:

Kitab-kitab fiqih, antara lain kitab "Minhajut Thullab", hamisy dari kitab "Fath-hul Wahhab" juz I hal. 217 yang berbunyi:

ومن شركة أبدان ... الى أن قال : وشرط فيها لفظ يشتر باذن في تجارة ... الى أن قال : وفي المقتود عليه كون مثلها خلط قبل عقد بحيث لا يتميز .

2. Uang administrasi yang dipungut oleh KOSIPA dari setiap anggota kosipa yang meminjam uang, hanyalah merupakan "istilah lain" dari bunga, karena:
 - 2.1. Uang administrasi tersebut merupakan "keharusan" yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang meminjam uang; sehingga pada hakekatnya tidak berbeda dengan "manfa'at" yang ditarik oleh yang meminjamkan uang, dalam hal ini "kosipa" dari para peminjam uang.
 - 2.2. Besarnya uang administrasi yang dipungut oleh "kosipa" dari para peminjam uang telah ditentukan sesuai dengan dengan besarnya uang yang dipinjam, yaitu sekian persen dari jumlah pinjaman sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Jadi tanpa memperhatikan apakah syarat pemberian uang administrasi tersebut dilakukan pada waktu akad pinjam meminjam sedang berlangsung, atau sebelum akad ataupun sesudah akad, atau apakah syarat tersebut berbentuk ucapan atau berbentuk tulisan, yang kesemuanya itu memerlukan pembahasan tersendiri, maka pungutan uang administrasi tersebut dapat dimasukkan dalam ma'nah hadits Nabi Besar Muhammad saw yang berbunyi:

Keputusan Munas Alim Ulama NU tanggal 21-25 Januari 1992

Tentang Hukum Bunga Bank

Sumber: K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan: Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997).

→ MASALAH BANK ISLAM

1. Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut :
 - a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
 - b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
 - c. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya shubhat (tidak identik dengan haram).

Pendapat pertama dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut :

- a. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- b. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).
- c. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (hajah rojihah)

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

- a. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- b. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- c. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan kebank hukumnya boleh.
- d. Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

2. Mengingat warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonominya, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan keyakinan kehidupan warga NU, maka dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam yakni bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Keputusan Mukhtamar XIII NU

Tentang Berobat untuk Mencegah Hamil

Sumber: H.B.N.O., *Verslag-Congres Nahdloetoel-'Oelama' Jang ke-XIII* (Soerabaia: H.B.N.O., 1938).

٢٣ (س) اوراغ برقواس قدا بولن رمضان تهون ١٣٥٦ بق لالو. قواس قدا هاري حمة والي دان لباران هاري سيت فون منوروة بويبيا كترانغان المالك نهضة العلماء تهون ١٣٥٦-١٣٥٧ حال حساب امكان الرؤبة ايتو حكوما بائيمانا، واجب قضاء اقا تيداه؟ (جايغ بايولس)

(ج) بهوا اوراغ بق قواس دان لباران سبائيمانا ترسيوت قالم متوال ايتو تيداه واجب قضاء اقبلا تصديق قدا حساب اوتوك لباران (كترانغان. قاري كتاب بنية المترشدين ص ١١٠ عبارتيا: وعلى هذا يثبت اهللال بالحساب كالرؤبة للحاسب ومن صدقه فهذا الاراء قربة التكافؤ فيجوز تقليد كل منها والذي يظهر اوسطها وهو الجواز والاجزاء، فان كتاب حاشية الشرواني على التحفة ج ٣ ص ٢٧٣ عبارتيا: وفي فتاوى الشهاب الرملي مثل عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل عمله انا قطع بوجوده ورؤيته ام بوجوده وان لم يحوز رؤيته فان اتمتهم قدذكروا للهللال ثلاث حالات. حالة يقطع فيها بوجوده ويامتناع رؤيته وحالة يقصع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويحوزون رؤيته. فاجاب بان عمل الحاسب شابه للحالات الثلاث انتهى.

٢٤ (س) بهوا منوروت قالم حديث: بق تلاء سريع ذي موات قالم خطبه ٢ مكاح سقرتي ناكحوا تاملوا الحديث. برهويوغ ثغن اقا با قالم كتاب ٢ فقه بهويغ ترهيتوغ عيب ليه بنار ايتو قباليك جذام. ماكا قاري ايتو انا كه كيرابا بويه كيتا امة اسلام متاكان اوية كونا بمونوه بجي برانه بق - سوفا ايتو اوراغ جذام جاعن منورون. (جايغ ماساكرطا)

(ج) بهوا برابرة كونا بمونوه بجي برانه ايتو حرام. كترانغان قاري كتاب تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص ٢٤٧ عبارتيا مسألة اتى ابن عبدالسلام وابن يونس بانه لا يحل للمرأة ان تستعمل دواء يمنع الحمل ولو برضا الزوج: فان كتاب اطنة الطالبين ج ٤ ص ١٥٣ عبارتيا: ويحرم استعمال ما يقطع الحمل.

٢٥ (س) انا كه صخ حكما اوراغ بق تيداه مفكوتاكن اجماع دان قياس ملاينكن

Keputusan Konferensi Besar PB Syuriah NU tanggal 18-22 April 1960

Tentang Hukum Membatasi Keturunan/Merencanakan Keluarga

Sumber: K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP RMI dan

Dinamika Press, 1997).

ITTIFAQ HUKUM MENGENAI BEBERAPA MASALAH DINIYAH

→ 283. 3. *Bagaimana hukumnya membatasi keturunan/merencanakan keluarga (Family Planning)?*. (NU Cab. Situbendo Banyuwangi)

- J. Kalau dengan 'azl (mengeluarkan air mani di luar rahim) atau dengan alat yang mencegah sampainya mani ke rahim seperti Kopacis/Kondom, maka hukumnya makruh. Begitu juga makruh hukumnya kalau dengan meminum obat untuk menjarangkan kehamilan. Tetapi kalau dengan sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali, maka hukumnya haram, kecuali kalau ada bahaya. Umpamanya saja karena terlalu banyak melahirkan anak yang menurut pendapat orang yang ahli tentang hal ini bisa menjadikan bahaya, maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja yang ada.

Keterangan: a. Dalam kitab Asnal Mathalib 186

b. Dalam kitab Fatawi Ibnu Ziyad 249

c. Dalam kitab Al-Bajuri II/93

d. Dalam kitab Ahkamul Fuqaha' II/231

وفي كتاب الامراض الاجتماعية صحيفة ٢٩١ مانضه: ومن شر القمار شراء

الاوراق المسماة بياتصيب فهي حرام على اللذاهب الاربعة ا هـ .

في اسنى المطالب ونضه: والعزل تحرزا من الولد مكروه وان اذنت فيه المنزول

عنا حرة كانت او امة لانه طريق الى قطع النسل. وفي فتاوى ابن زياد ونضه:

افتى ابن عبد السلام وابن يونس بان لايجل للمرأة ان تستعمل دواء يمنع

الحبل ولو برضا الزوج ا هـ . وفي الجزء الثاني من الباجورى على فتح القريب في

كتاب النكاح صحيفة ٩٢ مانضه: وكذا استعمال المرأة الشيء الذى يبطل

الحبل ويقطعه من اصله فيكره في الاول ويحرم في الثاني ا هـ .

وعند وجود الضرورة فعلى القاعدة الفقهية . اذا تعارضت المفسدتان
روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما مفسدة اهـ -

284. S. *Bagaimana hukumnya menyerahkan kambing untuk dipelihara dengan janji mendapat separuh anaknya atau tambahannya? (NU Cab. Situbondo)*

J. Hukumnya aqad tersebut tidak sah, sebab anak dan tambahan itu bukan dari pekerjaan pemeliharaan tersebut.

Keterangan: Dalam kitab Bujairimi Iqna' III/-

في الاقتاع ونفبه : (تنبيه) لو اعطى اخردابة ليعمل عليها وليتعهد بها
وفوائدها بينهما لم يصح العقد . لانه في الاولى ايجاز لنا بة فلاحاجة
الى ايراد عقد عليها فيه غرر . والثاني الفوائد لا تضمن بعمله . ولو
اعطاها ليعملها من عنده بنصف درهما ففعل ضمن له المالك العلف
وضمن الاخر للمالك نصف الدر . وهو القدر المشروط له للحصول
بحكم بيع فاسد . ولا يضمن الدابة لانها غير مقابلة بعوض . وان قال
لعلفها بنصفها ففعل فالنصف المشروط مضمون على العالف للحصول
بحكم الشراء الفاسدون النصف الاخر اهـ .

285. S. *Apakah berkewajiban zakat bagi orang yang membeli anak ikan untuk dipelihara atau bibit tanaman yang tidak ada zakatnya 'ain, atau tanah dengan niat akan ditanami atau untuk perusahaan garam (tidak niat akan dijual lagi)? Semua itu tentu ingin mendapatkan keuntungan. Apakah itu termasuk tijarah yang diwajibkan zakat dalam akhir tahun, karena demikian itu memutarakan uang untuk mendapatkan keuntungan? Kalau termasuk apakah yang dihitung sesudah akhir tahun? (NU Cab. Demak)*

Keputusan Muktamar XXVIII NU

Tentang Hukum Vasektomi/Tubektomi dan Pemakaian Spiral dalam KB

Sumber: PBNU, Hasil-Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 (Jakarta: PBNU, tt.)



Masalah 6.

Apabila vasektomi dan tubektomi dapat direhabilitasi, bagaimana hukumnya?

Hasil pembahasan :

Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak diperkenankan, kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi.

Pengambilan dalil antara lain dari :

الباجوري على فتح القريب الجزء الثاني الصفحة ٩٣ :
يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله . اماما يطيء الحمل مدة
ولا يقطعه فلا يحرم بل ان كان لعذر كتربية ولد لم يكره
والاكره .

وقد فرق شبرا ملسي بين ما يمنع الحمل بالكلية وبين ما
يمنعه مؤقتا . وقال بتحريم الاول واعتبر الثاني شبيها
بالعزل في الاباحة . وصرح الرملي نقلا عن الزركشي بأن
استعمال ما يمنع الحمل قبل انزال المنى حال الجماع مثلا فلا
مانع منه .

وكذا استعمال المرأة الشيء الذي يطيء الحمل ويقطعه من

امنه فيكم في الاول ومحرم في الثاني اه. وعند وجود
الضرورة فعلى القاعدة القهية. اذا تعارضت الفسدان
وعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما مفسدة اه.

والكتب الاخرى :

- ٢- الجيرمى على الاقناع الجزء الرابع الصفحة ٤٠
- ٣- نهاية المحتاج (وحاشيتيه) الجزء الثامن الصفحة ٤١٢
- ٤- غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد الصفحة ٢٥

Masalah 7.

Bagaimana hukum menggunakan spiral (IUD) dalam KB mengingat caranya dengan melihat aurat?

Hasil pembahasan :

Pada dasarnya menggunakan spiral (IUD) itu hukumnya boleh, sama dengan AZAL atau alat-alat kontrasepsi yang lain. Tetapi karena cara memasangnya harus melihat aurat mughalladhah, maka hukumnya haram. Oleh karena itu harus diusahakan dengan cara yang dibenarkan oleh Syara', seperti dipasang oleh suaminya sendiri. Masalah ini telah dibahas dalam buku PBNU "Membina Kemaslahatan Keluarga". (halaman 92-95)

Pengambilan dalil antara lain dari:

- ١- مرقاة صعود التصديق الصفحة ٦٦ :
ومن معاصي العين النظر الى النساء الاجنبيات وكذا انظر هن اليم ونظر العورات فيحرم نظر الى شيء من بدن المرأة الاجنبية غير الحليلة ويحرم عليها كشف شيء من بدنها بحضرة من يحرم نظرها اليها ويحرم عليه وعليها كشف شيء مما بين السرة والركبة بحضرة مطلع على العورات ولو مع جنس ومحرمية غير حليل .
- ٢- القليوبي الجزء الثالث الصفحة ٢١١ :
ومتى حرم النظر حرم المس لانه ابلغ في اللذة منه .

٣- معنى المحتاج الجزء الثالث الصفحة ١٣٣ :

واعلم ان ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة اليها واما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة المألجة الى ذلك لان في التحريم حينئذ حرجا فالرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم او زوج او امرأة ثقة ان جوزنا خلوة اجنبي بامرأتين وهو الراجح .

٤- الباجوري الجزء الثاني الصفحة ٩٩ :

(قوله بحضرة محرم او زوج اوسيد) اي امرأة ثقة ان جوزنا خلوة رجل بامرأتين وهو الراجح حيث كانتا ثقتين لان كلامنا تستحي ان تفعل الفاحشة بحضرة مثلها

٥- كاشفة السجا الصفحة ٥٠ :

اعلم ان نظر المرأة الى زوجها جائز في جميع بدنه كعكسه نعم ان منعها من النظر الى عورتها امتنع عليها النظر بخلاف العكس فانه جائز قطعا لانه يملك التمتع بها ولا تملك التمتع به لكن نظره الى فرجها قبلا او دبرا مكروه اذا كان بغير حاجة والى باطنه اشد كراهة .

Keputusan Mukhtamar XXIX NU

Tentang Hukum Kontrasepsi dengan Injeksi Vaksin dari Sperma

Sumber: Sekretariat Jendral PBNU, *Materi Ahkam/Masail Diniyah Mukhtamar ke-29 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Setjen PBNU, tt.).

ولو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل
غيره عذر في ذلك فتصح صلاته معه لا يلزم نزعها إذا
وجد الظاهر كما في الروضة - كأصلها فإن لم يحتج
لوصله أو وجد صالحا غيره من غير آدمي وجب عليه
نزعها إن لم يخف من نزعها ضررا يبيح التيمم إهـ --

الإفتاء ج: ١ ص: ١٠٠

- 2. Sebuah rekayasa laboratoris telah mampu menghasilkan vaksin yang bahan mentahnya adalah sperma laki-laki. Vaksin tersebut dimanfaatkan untuk proses pengebalan (imunisasi), agar wanita yang telah memperoleh injeksi vaksin tersebut diharapkan tidak hamil.

Pertanyaan:

- a. Dalam rangka menyukseskan program KB, bolehkah melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan menggunakan cara tersebut?

Jawaban:

- a. Melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan cara imunisasi menggunakan injeksi faksin yang bahan mentahnya sperma laki-laki adalah boleh karena sifat istiqdzar (menjijikkan)-nya sudah lenyap dan sudah hilang.

Pengambilan dalil antara lain dari:

عبارة: (قوله ولا لاستفذارها) أي وليس تحريم تناولها
لاستفذارها وهذا القيد لإخراج المنى ونحوه من المخاط
والبزاق كما سيذكره فإنه وإن حرم تناوله لكن لاستفذاره

فليس بنجس ومحل حرمة تناوله إذا خرج من معدنه --
إلى أن قال -- وما لم يستهلك في نحو ماء وإلا جاز تناوله
لاستهلاكه إهد -- الباجوري ج: ١ ص: ٩٩-١٠٠

وإن كان غير المسكر طاهرا فإن كان مضرا بمن يتناوله
كالسم أو مستقذرا غالبا كمخاط فحرام تناوله لتضرره به
واستقذاره له -- إلى أن قال -- فإن انتفى ذلك أي ما
ذكر مما يقتضي التحريم فحلال. (قوله كمخاط) أي
وبصاق ومني (قوله مما يقتضي التحريم) وهو أربعة
الإسكار والإستقذار والإضرار والنجاسة إهد -- شرقاوي ج: ١
ص: ٤٥١

أما استعمال ما يقطع الحبل من أصله فهو حرام بخلاف ما
لا يقطعه بل يبطنه مدة فلا يحرم بل إن كان لعذر كتربية
ولم يكره أيضا وإلا كره إهد -- شرقاوي ج: ٢ ص: ٣٢٢

6

- 3/ Pasangan suami isteri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun ternyata kondisi rahim sang isteri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Tetapi, dengan kemajuan teknologi modern, keinginan pasangan tersebut dapat diwujudkan dengan cara menitipkan sperma suami dan indung telur isteri ke rahim perempuan lain dengan aqad sewa.

Pertanyaan:

- a. Bagaimana hukum meyewakan rahim untuk kepentingan tersebut di atas?

Keputusan Muktamar XIV NU

Tentang Hukum Asuransi Jiwa

Sumber: H.B.N.O., *Verslag-Congres Nahdotoel-'Gelama' Jang ke-14* (Soerabaia :H.B.N.O., 1939)

۳۱

قوتوسان ونگرکس کا ۱۴

برفیکانگ تکوہ کفدا سالا ساتو داری، مذهب . سدغکن امفات بایاو ایتو،
بتر سوانبا براسنتیاط کفدا حدیث دان قرآن ؟ (فایمبانغ).
(۲۷) الجواب: تیاف ۲ اوراغ اسلام دی واجبکن برفیکانگ تکوہ کفدا سالا ساتو داری
امفات مذهب یاله کرن منجاگا جاعن تلفیق انو مفر موداه مذهب (تلاعب
اوتسبع الرخص) . کتراعن داری بقیة المشرکین ج ۲ ص ۹: تقلید مذهب
الغیر یصعب علی علماء الوقت فضلا عن عوامهم، الی ان قال: وان لا یتبع
الرخص بأن یأخذ من کل مذهب ما هو الاحسن علیه وان لا یلحق بین قولین
تتولد منهما حقيقة لا یقول بها کل من القائلین - دان داری المیزان للشعرانی ج
(۱) ص ۳۲: کان سیدی علی الخواص رحمه الله تعالى اذا سأل انسان
عن التقید بمذهب معین الان هل هو واجب ام لا؟ یقول له: یجب عليك التقید
بمذهب مادمت لم تصل الی شهود عین الشریعة الاولی خوفا من الوقوع الی الضلال .
(۳۸) بکیمناکه حکما فرموان یغ برلاجر مقندارای سفیداه هاروس اتواتی بیداه
سباب سوتاه دئی فاندغ فرجالانبا دان اهایا بمیارکن؟ (بربائی).
(۲۸) الجواب: تتاغ بلاجر مقندارای سفیداه بائی فرمفوان . مفیقت قاعدة
اصولیه یغ مزاعکن بوا اصل تیاف سواتواتیو مباح مکا بولیہ . اکن
تتافی فرلودی ایشت بیرافا حال یغ دی لاراغ اولیه اگاما یغ ترجدی کرن
مقندارای سفیداه ایتو، ماکا مباح ایتو منجادی بروباه . دالم تفتت مقندارای
سفیداه ایتو سوتاه منجادی عادة کیاسائن بائی فرمفوان ۲ دی سینتو . مکا
تتتاغ کفتوتان (المروة) برلاتان دغن دی تفتت ۲ یغ سفیداه منجادی طاده
کیاسائن . کالو دی فر بندیشکن دغن بلاجر منولیس بائی فرمفوان مکا بلاجر
مقندارای سفیداه بائی فرمفوان ایتو مکروه . سبایمنا کتراعن الفتاوی
الحدیثیه ص ۶۲ .

(۲۹) بکیمناکه حکما مناعگوغکن جیوا (levensverzekering) سفرنی یغ
بایق برلاکو سکاراغ اینی: یاایت بمایار یوران ساین بولن . سمنی لامایا

تاهون. دان جيكا اوراغ ايتو (declinemer) ماني - بلوم سفي نيمفونغ دي
 تنتوكن. مكا وارنيا اوراغ (declinemer) ايتو مندافت اوراغ داري
 (levensverzekering) باباكيبا منوروت فرجانبجيان مولانا. بوليكة
 دميكيان ايتو؟

(تلوغ الكوغ).

(٢٩) الجواب: مناعكوغكن جيوا (اورانسي جيوا) حكما حرام كرن ترما - و قمار.
 كترانن داري نور الاسلام المجلد الاول المدد السادس ص ٣٦٧ دان داري
 رساله الشيخ نجيت مفتي الديار المصرية في صحيفة ٣٦٧ المدد السادس والمجلد
 الاول من مجلة نور الاسلام مانه:

وامد المتأمين علي الحياة فموا بعد عن العقل السليم واوجب للدهشة والاستغراب،
 فيما كانت الشركة لتطيل له عمرا، وما كانت لتمد عنه قدرا، ولكنها التمللات
 بالاماني، وما أشبهها بشؤون الدجالين والمشعوذين. سيقول لك قائلهم
 نفس المقالة الأولى (المذكورة في بحث التأمين على الاموال) أو قريبا منها،
 سيقول اني متى دفعت ولو قسطا واحدا فاذا فاحاتني المنية استحق ورتني ما
 أسنت به علي حياتي، فكان لهم بذلك عزاء وسلوة عن فقدي. واذا بقيت
 المدة المضروبة لي استرجعت كل ما دفعت بأرباحه. فانا مستفيد علي كاتا
 الحالتين وللشركة فائدتها ايضا وهي التصرف في تلك الاموال بما يجتمع لها
 مني ومن غيري، فيتكون لها رأس مال عظيم تستعمله فيما ترى من المشروعات
 التجارية، ومنتجات السطاب قليلة فمزما نادر لا يؤثر فيها لان كل امرئ
 حريص علي حياته وماله، يحافظ عليهما جهده استقطاعه مكل واحد يعمل
 لمصلحتها من حيث يعمل لمصاحبة نفسه فكلا الطرفين مستفيد. ونقول له
 ليكن كل ما تقول فما خرجت عن انها مائة فيها عزم احدا العارفين حتمابلا
 مقابل، وما كانت الدالة الا في المناوضه وأن يكون من كل طرف عوض
 يعادل ما استفاده، وان يكون بين الموضوعين مناسبة تحقق المعادلة ولو التقريبه

حتى تستقيم روح العدالة ، فأما واحد الطرفين غارم حتما بلاغتم اوغلم حتما بلاغرم فلا عدالة بل هي المقامرة والميسر ، غير انه ليس نوبا لما عا وجاه عن قوم اوليناهم نقتنا العمياء واخذنا عنهم كل ما قالوا بالتقليد الاعشى ؛ وما منشأ ذلك الا ان جماعة منهم بهروا الناس بقوة استخداهم للمادة واستنبا طهم لقوى الطبيعة مما لانمطهم حقهم فيه ، فكان اجموعهم في النفوس عزة الغلبة فاسلم الناس القيادة لهم شأن كل غالب مع كل مغلوب ؛ والافتمى وزنت تلك التصرفات بميزان العقل السليم والنقد التزبه وحدث ضررها اكبر من نفعها وهكذا شأن اغلب المضار المنهية عنها لمصالحه المجتمع تجد ضررها اكبر من نفعها فلا تكاد ترى شيئا تمحض للضرر بدون وجه نفع ولا تمحض للنفع بدون وجه ضرر حتى ان الخمر والميسر وهما ماهما في الضرر لم يخلوا عن نفع ما ولكنه ضئيل اذا قيس بكبير ضررهما كما قال جيل تائه (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واتمهما اكبر من نفعهما) وشأن التشريع الصحيح ان يعتمد على الموازنة بين النفع والضرر فما غلب نفعه احله وما غلب ضرره حرمه والله اعلم حكيم .

(۳۰) اداله سواتوعلاة ، دوا اوراغ لاکي ايبي بمبوات بيرافا ماجم اسها او فدا ساوہ ، رومہ ، اتویغ لائین ۲ب دغن دیا کدوا نیتکن کویکا بمبوات اسها ایتو تادی ہوا ایتو سوا اسها یغ دی بوتنا ایاله بوت کفویاتن اناکیا فرمفوان یغ توا سکالی دات تروس تورون منورون فدا چچوپ فون فرامفوان یغ توا فولاسہینگکا - ککاراغ ادا یغ تله سمفی ۳ انو ۱ تورون دغن حال اناکیا یغ لائین فون لاکي دان فرمنوان اداله بایک مکا کویکا کدوا لاکي استری ایتو تادی اکن منینگکال دنبا تیدام بروسیه لاکي فدا سوا اناک ۲ب ایبي سہینگکا تله چوکوب منوروت نیانیا کویکا بمبوات ایتو اسها سبائی ترسبوت دی اتس تادی اتو منوروت عادة بمساب مساج ، باگیماناک ایتو ہورتا تادی حلالنکہ انا حرا مکہ اناکیا فرمفوان یغ توا تورون منورون ایتو تادی

Keputusan Konferensi Besar PB Syuriah NU tanggal 18-22 April 1960

Tentang Hukum Asuransi

Sumber: K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997).

ولكن اذا لم تعلم الجمعة انها متوفرة فيها الشروط على القول الاول وهو القول
الجديد فيسن له اعادة الظهر بها احتياطاً. اهـ.

299. S. Apakah orang yang meninggalkan shalat itu sampai menjadi kafir?. Sebab ada hadits yang artinya: "Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka menjadi kafir yang nyata." (NU Cab. Pendopo SVPM)

J. Bahwa orang yang meninggalkan shalat itu tidak sampai menjadi kafir, tetapi menjadi fasiq dan harus taubat. Adapun arti hadits tersebut ditujukan kepada orang yang ingkar atau menganggap halal akan meninggalkan shalat. Demikian menurut pendapat kebanyakan ulama' Salaf dan Khalaf seperti Imam Abi Hanifah, Malik dan Syafi'i.

Keterangan: Dalam kitab Fiqhussunnah I/162

في الجزء الاول من فقه السنة صحيفه ١٦٨ ونصه الاحاديث المتقدمه ظاهرها
يقتضى كفر تارك الصلاة وابعاده دمه ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف منهم
ابو حنيفة ومالك والشافعي على انه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فان لم يتب قتل
حدا عند مالك والشافعي وغيرها وقال ابو حنيفة لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى
يصلى وحملوا احاديث التكفير على الجاهد والمستحل للترك. اهـ.

→ 300. S. Bagaimana hukumnya Asuransi?. Bolehkan atau tidak?.
(NU Cab. Pekalongan)

J. Majelis Musyawarah memutuskan seperti yang sudah diputuskan oleh Kongres NU ke-14 yakni: Mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor Asuransi itu haram hukumnya, karena termasuk judi.

Keterangan: a. Dalam kitab Ahkamul Fuqaha' II/soal no. 256

b. Dalam kitab Majalah Nurul Islam no VI jilid. ke pagina:
367

c. Dalam kitab An-Nahdlatul Islamiyah pagina: 471,472

في التهنئة الإسلامية صحيفه ٤٧١-٤٧٢ ونصها: واما التأمين على الاموال ففروعه كثيرة جدا. ولنتكلم على فرع واحد منها وهو فرع البيوت... الى ان قال ولكن هذا التعاقد تعاقد قمار ولا نزاع. وهو اشبه باوراق يانصيب التي تمكث المرء طول حياته يشتري منها دون ان يصادف ورقة ربح. واما تعاقد تلك الشركات مع زبائنهم اشبه بتلك الاوراق من ناحية التعاقد موعود بضمحان البيت احترق وهو ضمان محبوب له ربما مكث طول حياته بدفع ما فرس عليه في مقابله ويموت وما حدث لبيته حرق يأخذ بسببه مبلغ ذلك الضمان اذن هو قمار خالص لان المتقارمين الاصليين حين المقامرة لا يدري كل منهللن تكون الغلبة؟ حتى يكون المال الذي اتفقا يدفعه المقهور وهكذا الحال هنا. اهـ.

في رساله الشيخ بجنت مفتي الديار المصرية في مجله نورا لاسلام للعدد السادس في المجلد الاول من ٢١٧ ونصه: واما التأمين على الحياة فهو ابعد عن العقل السليم وواجب لله هشة والاستغراب فما كانت الشركة لتفيل له عمرا وما كانت لتبعد عنه قد راها الكثير التعللات بالاماني واشبهها بشؤون الدجالين والمشعوذين سيقول لك قائلهم نفس المقالة الاولى (المذكورة في بحث التأمين على الاموال) او قريبا منها سيقول اني متى دفعت ولو قسطا واحدا فاذا فاجأتني المذنية استحق ورثتي ما امننت به على حياتي فكان لهم بذلك عزاء وسلوة عن فقلدي. واذا بقيت المدة المضروبة التي استرجعت كل ما دفعت بأرباحه فانما مستفيد على كلتا الحالتين. وللشركة فائدتها ايها

وهي التصرف في تلك الاموال مما يجتمع لها متى ومن غيرى فيتكون لها رأس
مال عظيم تستغله فيما ترى من المشروعات التجارية ومفاجأة العطب قليلة
فقرها نادر لا يؤثر فيها لان كل امرئ حريص على حياته وماله ومحافظ عليها جهد
استقامته فكل واحد يعمل لمصلحتها من حيث يعمل لمصلحة نفسه فكلا الطرفين
مستفيد. ونقول له ليكن كل ما تقول فما خرجت عن انها معاملة فيها غرم احد
الطرفين حتما بلا مقابل وما كانت العدالة الا في المعاوضة وان يكون من كل طرف
عوض يعادل ما استفاده. وان يكون بين العوضين مناسبة تحقق العدالة
ولو التقريبية حتى تستقيم روح العدالة. فاما واحد الطرفين غارم حتما بلا
غرم او غانم حتما بلا غرم فلا عدالة بل هي المقامرة والميسر غير انه ليس ثوبا
لثامعا. وجاء عن قوم اولينا هم ثقتنا العبياء واخذنا عنهم كل ما قالوا بالتقليد
الاعمى. وما منشأ ذلك الا ان جماعة منهم بهروا الناس بقوة استخدامهم للمادة
واستنباطهم لقوى الطبيعة مما لا تقطعهم حزمهم فيه فكان لجموعهم في النفوس
عزة الغلبة فاسلم الناس القيادة لهم شأن كل غالب مع كل مغلوب والافسحى
وزنت تلك التصرفات بميزان العقل السليم والنقد النزيه وجدت ضررها
اكبر من نفعها وهكذا شأن اغلب المضار المنهوى عنها المصلحة المجمع بحجدها
اكبر من نفعها فلا تكاد ترى شيئا تمحض للضرر بدون وجه نفع ولا تمحض للنفع
بدون وجه ضرر حتى ان الخمر والميسر وهما ما هما في الضرر لم يخل عن نفع ما
ولكنه ضئيل اذا قيس بكبير ضررها كما قال جل شأنه : **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ**
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا اِنَّكُمْ كَثِيرٌ مِّنْ مَّنَافِعِ النَّاسِ وَاِنَّهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا . وشأن التشريع

التصحيح ان يعتمد على الموازنة بين النفع والضرر فغالبا نفعه احله وما اغلب ضرره حرمه والله اعلم حكيم . اهـ .

301. S. *Mohon ditinjau kembali Keputusan Mukhtar NU ke-1 soal no. 6 tentang membagi waris secara gono-gini. Apakah itu sudah mengikuti ketentuan dari Allah atau belum? (NU Cab. Kudus)*

J. Sesudah keputusan tersebut dibahas kembali, maka Majelis Musyawarah sepakat bahwa memberi gono-gini diperbolehkan dengan jalan perdamaian di antara para ahli waris, tidak atas ketentuan dari Allah. Sedang perdamaian mereka hendaknya menurut yang diterangkan dalam hamisy (pinggir) kitab Syarqawi bab Syirkah. Sehingga tidak boleh dilakukan gono-gini tanpa mendapat persetujuan sebagian ahli waris atau di antara ahli warisnya terdapat mahjur. Lihat Ahkamul Fuqaha' I, soal no. 6. hal 10.

Keputusan Munas Alim Ulama NU tanggal 21-25 Januari 1992

Tentang Hukum Asuransi

Sumber: K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997).

→ II. Hukum Asuransi

1. Asuransi Sosial

Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1.1. Asuransi sosial tidak termasuk akad mu'awadlah, tetapi merupakan syirkah ta'awuniah.
- 1.2. Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya ditanggung oleh Pemerintah, dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

2. Asuransi Kerugian, diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 2.1. Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi obyek-obyek yang menjadi agunan bank.
- 2.2. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena terkait oleh ketentuan-ketentuan Pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang di import dan dieksport.

3. Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 3.1. Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur saving (tabungan).
- 3.2. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung bernilai untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).
- 3.3. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.
- 3.4. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak menanggung - seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.

- 3.5. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka :
 - 3.5.1. Uang premi tersebut menjadi hutang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.
 - 3.5.2. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.
 - 3.5.3. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.
 - 3.5.4. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.
4. Para musyawarah mendukung dan menyetujui berdirinya Asuransi secara Islam.
5. Sebelum tercapainya cita-cita terwujudnya Asuransi Islam hendaknya sistem perasuransian yang ada sekarang ini diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk itu perlu diatur langkah-langkah seperti yang ada pada komisi bank.

Keputusan Muktamar XXIII NU
Tentang Hukum Mengambil Bola Mata Mayit

Sumber: K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP RMI dan
Dinamika Press, 1997).

ونصه ، واختلفوا في المعتود عليه هل الزوج والزوجة او كلاهما والارجح
الثاني اهـ (كقوله تعالى في سورة النساء ٢١ . والبقرة ٢٢١ و ٢٣٠ و ٢٣١)

→ 315. S. *Bagaimana pendapat Muktamar tentang ifta mufti Mesir yang memperbolehkan mengambil bola mata mayit untuk mengganti bola mata orang buta?. Benarkah ifta tersebut?*

J. Bahwa ifta mufti Mesir itu tidak benar, bahkan haram mengambil bola mata mayit, walaupun mayit itu tidak terhormat (muhtarom) seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain, karena bahayanya buta itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit.

Keterangan: Dalam kitab Hasyiyah Ar-Rasyidi 'Ala Ibnul Imad pagina 26

في حاشية الرشيدي على ابن العمد صحيفه ٢٦ ونصه : اما الادب فوجوده
حينئذ كالعلم كما قال الحلبي على المنهج ولو غير محترم كمرتد وحرني فيجرو
الوصل به ويجب نزعها . اهـ .

ولقوله عليه ^{صلى الله عليه وسلم} كسر عظم الميت ككسره حيا (رواه احمد في المسند و ابو
داود وابن ماجه) وعن عائشة . كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثام .
(رواه ابن ماجه عن ام سلمة) حديث حسن .

Keputusan Muktamar XXIII NU

Tentang Hukum Cangkok Mata, Ginjal dan Jantung

Sumber: K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997).

اسلاما وعصمة (نجيري على الخطيب، ج ١ ص ٢٣٩)
وماخذ المقرر الثالث: لو استمنى الرجل منيه بيدا امرأته او امته
جاز لانها محل استمتاعها (كفاية الاخير، ج ٢ ص ١١٣)

→ 332. S. Bagaimana hukumnya cangkok mata?

Transplantas - kornea atau cangkok mata ialah mengganti selaput mata seseorang dengan selaput mata orang lain atau kalau mungkin dengan selaput mata binatang. Jadi yang diganti hanya selaputnya saja bukan bola mata seluruhnya. Adapun untuk mendapatkan kornea/selaput mata ialah dengan cara mengambil bola mata seluruhnya dari orang yang sudah mati. Bola mata itu kemudian dirawat baik-baik dan mempunyai kekuatan paling lama 72 jam (tiga hari tiga malam). Sangat tipis sekali dapat dihasilkan cangkok kornea dari binatang.

J. Hukumnya ada dua pendapat:

1. Haram, walaupun mayit itu tidak terhormat seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain, bahaya buta itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit.

Keterangan Kitab:

1. Ahkamul Fuqoha III/59.
2. Hasiyah Ar-rosidi 'ala Ibnul 'Imad 26.
3. Boleh, disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan tulang manusia, asalkan memenuhi 4 syarat:
 - a. Karena dibutuhkan
 - b. Tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia.
 - c. Mata yang diambil harus dari mayit yang muhaddaroddam.
 - d. Antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama.

Keterangan dari kitab:

1. Fathul Jawa 26
2. Al Mahalli

3. Bujairomi Iqna IV/272
4. Mughnil Muhtaj IV/307
5. Al Muhadzdzab I/251
6. Al Qolyubi I/182
7. Bijaerami Wahab I/239

احكام الفقهاء ج ٢ ص ١٥٩ :مسألة ، ما قولكم في افتاء مفتي الديار المصرية بجواز اخذ حلاقة الميت لوصلها الى عين الاعى . هل هو صحيح او لا ؟

قرر المؤتمرين ذلك الافتاء غير صحيح ، بل يحرم اخذ حلاقة الميت ولو غير محترم كمرتد وحرزى . ويحرم وصله باجزاء الادمى لان ضرر العى لا يزيد على مفسدة انتهاك حرمت الميت كما فى حاشية الرشيدى على ابن العماد : ص ٢٦ وعبارته :

اما الادمى فوجوده حينئذ كالعدم كما قال الحلبي على المنهج ولو غير محترم كمرتد وحرزى فيحرم الوصل به ويجب نزعها . اهـ .
 ولقوله صلى الله عليه وسلم : كسر عظم الميت ككسره حيا (رواه احمد في السنن وابوداود وابن ماجه) . وعن عائشة كسر عظم الميت ككسر عظم الحي فى الاثم . (رواه ابن ماجه عن ام سلمة) حديث حسن .

333. S. *Bagaimana hukumnya Bank Mata?*

Bank Mata ialah semacam badan atau yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang-orang yang menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah mati untuk kepentingan manusia.

J. Hukumnya bank mata adalah sama hukumnya pencangkokan mata, sebagaimana keterangan dan penjelasan di atas. Hal ini sesuai dengan qoidah usul fiqh yang berbunyi:

للسائل حكم المقاصد .



334. S. Bagaimana hukumnya cangkok ginjal dan jantung?

- a. Cangkok ginjal ialah mengganti ginjal seseorang dengan ginjal orang lain. Ginjal pengganti itu dapat diambil dari orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati. Pengambilan ginjal dari orang hidup itu mungkin karena setiap orang mempunyai dua ginjal.
- b. Transplantasi jantung ialah mengganti jantung seseorang dengan jantung orang lain. Transplantasi jantung ini hanya dapat dilakukan dari orang yang sudah mati saja, karena setiap orang hanya mempunyai satu jantung.

Kiranya sangat sulit melakukan transplantasi ginjal dan jantung dari binatang. Karena dua hal ini dibutuhkan adanya persamaan antara darah yang memberikan ginjal atau jantung (donor) dengan orang yang mendapatkan ganti ginjal atau jantung tadi.

J. Hukumnya cangkok ginjal dan jantung sama dengan hukumnya pencangkokan mata.

335. S. Bagaimana kedudukan hukum/status syar'i lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah di hubungkan dengan ketentuan-ketentuan fiqih tentang amil.

J. Hukumnya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah adalah sah, karena pemerintah Indonesia mempunyai hak sya'i untuk membentuk amil.

Keterangan dari kitab:

1. Al Mauhibah IV/130.
2. Al Fanah III/315.
3. Minhajul Qowim 115.
4. Ahkamul Fuqoha III/8.

موهبة ج ٤ ص ١٣٠ وعبارته :

والأصنف الخامس العائلون عليها، ومنهم الساعي الذي يبعثه

Keputusan Muktamar XXVIII NU

Tentang Hukum Pencangkokan Organ Tubuh Manusia

Sumber: PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28* (Jakarta: PBNU, tt.)

III. MASALAH KESEHATAN

Masalah 1.

Sahkah wasiat mengenai organ tubuh mayit untuk diberikan dan dicangkokkan kepada orang yang memerlukan mengingat diantara sahnya wasiat adalah wujudu mutlaqil milki?

Hasil pembahasan :

Hukum wasiat tersebut tidak sah (batal), karena tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yang antara mutlaqil milki. Menurut Syara' organ tubuh mayit itu hak Allah bukan milik seseorang.

Adapun pencangkokan organ tubuh manusia ada yang membolehkan dengan syarat :

- karena diperlukan, dengan ketentuan tertib pengamanan;
- tidak ditemukan selain organ tubuh manusia itu.

Masalah ini telah dibahas pada Munas Alim Ulama NU di Kaliurang pada tahun 1981.

Pengambilan dalil antara lain dari :

١. نفاية الزين الصفحة ٢٧٩
و شرط في الوصي به كونه مباحا يقبل النقل من شخص
الى اخر فتصح بحمل وجوده ان انفصل حيا او ميتا مضمونا
بان كان ولدا لامة وجنى عليه بخلاف ولد البهيمة ان

انفضل ميتا بجناية فان الوصية تبطل وما يضر منه
الجاني حينئذ مما نقص من قيمة امة يكون للوارث
وبئر وحمل ولو معدومين ومحبهم فيرجع في تفسيره
للوارث ان لم يبينه الموصي وبمجاز عن تسليمه وتسليمه
ونجس يقتنى ككلب قابل للتعليم وزبل وخرم حرمة
وميتة لا طعام الجوارح ولو ميتة كلب او حنزير اهد .

٢- فتح الجواد الصفحة ٢٦-٢٧ :

وبقي ما لم يوجد صالح فيحتمل جواز الجبر بعظم الادمي
الميت كما يجوز للمضطر اكل الميت وان لم يخش الا
مبيع التيمم وجزم الدابي بالجواز ، حيث قال : فان لم يصالح
عظم الادمي قدم نحو الحربي كالمرتد ثم الذمي ثم
المسلم .

٣- معنى المحتاج الجزء الرابع الصفحة ٣٠٧ :

وله اي للمضطر (اكل ادمي ميت) اذا لم يجد ميتة
غيره كما قيده في الشرح والروضة ، لان حرمة الحي
اعظم من حرمة الميت .

٤- المحلى في باب الاطعمة الجزء الرابع الصفحة ٢٦٢ :

وله اي للمضطر اكل ادمي ميت لان حرمة الحي اعظم من
حرمة الميت .

- ٥- امتداد الجزء الاول الصفحة ٢٥٢ :
وان اضطرر ووجد ادما ميتا جاز اكله لان حرمة الحي
أكد من حرمة الميت .
- ٦- القلوبى الجزء الاول الصفحة ١٨٢ :
ولو وصل عظمه لانكساره واحتياجه الى الوصل بنجس من
العظم لفقد الطاهر الصالح للوصل فمعدور في ذلك .
- ٧- البجيرمى على فتح الوهاب الجزء الاول الصفحة ٢٣٩ :
ولو وصل عظمه بقيد زدته بقولى الحاجة الى وصله
بنجس من عظم لا يصح للوصل غيره عذر .
- ٨- البجيرمى على الاقناع الجزء الاول الصفحة ٢٣٩
والاوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم النظر الى افضلية
الميت مع اتحادها اسلاما وعصمة .
- ٩- احكام الفقهاء الجزء الثالث الصفحة ٥٩ :
مسألة : ما قولكم في افتاء مفتى الديار المصرية بمجواز
اخذ حداقة الميت لوصلها الى عين الاعمى . هل هو
صحيح اولاً ؟ .

Keputusan Muktamar XXIX NU

Tentang Hukum Transplantasi Organ Babi

Sumber: Sekretariat Jendral PBNU, *Materi Ahkam Masail Diniyah Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Sejen PBNU, tt.)

AHKAM / MASAIL DINIYAH MUKTAMAR KE-29 NAHDLATUL ULAMA

27 J. Akhir-2 Rajab 1415 H / 1-5 Desember 1994 M.

MATERI WAQI'YAH

- 1. Sebuah penelitian ilmiah berhasil dipertahankan dalam forum ujian disertasi doktor di Universitas Airlangga. Hasil Penelitian itu adalah bahwa tulang rawan babi efektif untuk mengganti gigi manusia. Sementara hasil pengujian tim klinis R.S. DR. Sardjito Yogyakarta membuktikan bahwa katup jantung babi paling sesuai sebagai pengganti katup jantung manusia.

Pertanyaan:

- a. Bagaimana hukum transplantasi organ babi (khinzir) untuk menggantikan organ sejenis / lainnya pada manusia?

Jawaban:

- a. Transplantasi babi untuk mengganti organ sejenis / lainnya pada manusia hukumnya tidak boleh kecuali sangat diperlukan dan tidak ada yang lebih efektif maka boleh (diberikan dispensasi hukum / dima'fu).

Pengambilan dalil antara lain dari:

عبادة : (ولو وصل عظمه) بقيد زده بقولي (حاجة) إلى
وصله (بنجس) من عظم (لا يصلح) للوصل (غيره)
هو أولى من قوله لفقده الطاهر (عذر) في ذلك فتصح
صلاته معه (قوله حاجة إلى وصله) كخلل في العضو

أو نحوه إه برماوي، وخياطه الجرح بخيط نجس (قوله من عظم) أي ولو مغلظا (قوله لا يصلح للوصل غيره) أي أصلا وقت إرادته حتى لو صلح غيره وكان هذا أصلح وأسرع إلى الجبر لم يجز الوصل به خلافا للسبكي حيث قال. ولو قال أهل الخبرة أن لحم الأدمي لا يجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب فيتجه أنه عذر ولو تعارض نجس غير مغلظ ونجس مغلظ فالظاهر تقديم غير المغلظ مع كونه بطيئ البرء وكون المغلظ سريعة. إه -- حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الأول صحيفة ٤١٦ - ٤١٧

(ولو وصل عظمه) لانكساره مثلا واحتياجه إلى الوصل (بنجس لفقد الطاهر) الصالح للوصل أو وجده وقال أهل الخبرة أنه لا ينفع ووصله بالنجس (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه للضرورة -- إلى أن قال -- ونو قال أهل الخبرة إن لحم الأدمي لا يجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب فيتجه كما قال الأسنوي إنه معذور -- إلى أن قال -- (وإلا) أي وإن وصل به مع وجود الطاهر الصالح أو نم يحتج إلى الوصل حرم عليه لتعد به (وجب) عليه نزعها واجب عليه ذلك (إن لم يخف ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم إه -- مقني المحتاج الجزء الأول صحيفة ١٩٥.

(ولو وصل) معصوم -- إلى أن قال (عظمه) لاختلاله وخشية مبيح تيمم إن لم يصله (بنجس) من العظم ولو مغلظا ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به (لفقد الطاهر) الصالح للوصل كأن قال خبير ثقة إن النجس أو المغلظ أسرع في الجبر أو مع وجوده وهو من

أدعي محترم (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته للضرورة
ولا يلزم نزعها وإن وجد طاهرا صالحا إهـ -- تحفة الطلاب

الجزء الثالث صحيفة ١٢٥

(قوله لحاجة إلى وصله) كخلل في العضو ونحوه إهـ --
برماوي، وخياطة الجرح بخيط نجس ودواء بدواء نجس
كالجبر في تفصيله المذكور إهـ -- حاشية الجمل على شرح المنهج

ج : ١ ص : ١٦؛

إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبر بعظم طاهر قال أصحابنا
ولا يجوز، أن يجبر بنجس مع قدرته على طاهر يقوم
مقامه فإن جبره بنجس نظر إن كان محتاجا إلى الجبر ولم
يجد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور وإن لم يحتج إليه أو
وجد طاهرا يقوم مقامه أثم ووجب نزعها إن لم يخف منه
تلف نفسه إهـ -- المجموع ج : ٢ ص : ١٣٨

(وجبر كسر) العظم من خاف ضررا من تركه (بعظم
الميت) النجس (مغتفر) أي للضرورة فلا تبطل به
صلاته ولا يلزم عليه نزعها وإن لم يخف من النزع ضررا
(كجابر عضوه من جلد كلبته) حيث لم يجد غيره أو قال
أهل الخبرة إنه لا ينجبر سريعا إلا به (إن لم يجد) عظما
(طاهرا) من غير الأدعي يصلح للجبر إهـ -- فتح الجواد

ص : ٢٦.

لو كان الوصل بالنجس أسرع انجبارا من الطاهر فيحتمل

أن يكون ذلك عذرا إهـ -- عميرة ج : ١ ص : ١٨٢

ولو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للتوصل
غيره عذر في ذلك فتصح صلاته معه لا يلزم نزعها إذا
وجد الطاهر كما في الروضة - كأصلها فإن لم يحتج
لوصله أو وجد صالحا غيره من غير آدمي وجب عليه
نزعها إن لم يخف من نزعها ضررا يبيح التيمم إهـ --

الإفتاء ج: ١ ص: ١٠٠

2. Sebuah rekayasa laboratoris telah mampu menghasilkan vaksin yang bahan mentahnya adalah sperma laki-laki. Vaksin tersebut dimanfaatkan untuk proses pengebalan (imunisasi), agar wanita yang telah memperoleh injeksi vaksin tersebut diharapkan tidak hamil.

Pertanyaan:

- a. Dalam rangka menyukseskan program KB, bolehkah melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan menggunakan cara tersebut?

Jawaban:

- a. Melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan cara imunisasi menggunakan injeksi vaksin yang bahan mentahnya sperma laki-laki adalah boleh karena sifat istiqdzar (menjijikkan)-nya sudah lentur dan sudah hilang.

Pengambilan dalil antara lain dari:

عبارة: (قوله ولا لاستقذارها) أي وليس تحريم تناوله
لاستقذارها وهذا القيد لإخراج المنى ونحوه من المخاط
والبزاز كما سيذكره فإنه وإن حرم تناوله لكن لاستقذاره